Danantara Indonesia

2025 LAPORAN TAHUNAN



# ENERGI *untuk MASA DEPAN*

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI DANANTARA)




*Disclaimer*

# Dasar Penyusunan dan Ruang Lingkup Laporan

Laporan Tahunan 2025 Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("BPI Danantara") disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan mandat pengelolaan investasi negara. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tata kelola, strategi, kinerja, serta pencapaian kinerja sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada kerangka peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan dan operasional BPI Danantara, di antaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Dalam laporan ini, penyebutan BPI Danantara merujuk pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai entitas tersendiri, sedangkan penyebutan "Danantara Indonesia" digunakan ketika merujuk secara kolektif kepada BPI Danantara beserta Holding Operasional dan Holding Investasi. Penggunaan istilah tersebut dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan penyajian informasi, tanpa mengubah makna, kedudukan, maupun identitas hukum masing-masing entitas.

Holding Operasional dijalankan oleh PT Danantara Asset Management ("DAM"), yang berperan dalam pengelolaan operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan didirikan dan mulai beroperasi pada 23 Mei 2025. Sementara itu, Holding Investasi dijalankan oleh PT Danantara Investment Management ("DIM"), yang berfokus pada pengelolaan investasi strategis, dan didirikan dan mulai beroperasi pada 28 Juli 2025.

Ruang lingkup pelaporan meliputi aktivitas Danantara Indonesia sebagai instrumen strategis negara yang mengemban dua mandat yakni mewujudkan dampak positif terhadap perekonomian dan ketahanan nasional, sekaligus menghasilkan imbal hasil berkelanjutan bagi kekayaan antargenerasi. Laporan ini tidak hanya menyajikan kinerja keuangan, tetapi juga menggambarkan bagaimana Danantara Indonesia menjalankan perannya sebagai pengelola dan pengembang aset negara yang bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi jangka panjang. Informasi yang disajikan meliputi antara lain profil kelembagaan, tata kelola perusahaan, pengelolaan investasi, kinerja keuangan, pengembangan sumber daya manusia, kegiatan sosial dan lingkungan, serta peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Seluruh informasi dalam laporan ini bersumber dari data dan dokumen internal yang telah melalui proses verifikasi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Informasi keuangan disusun berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan informasi non-keuangan disusun berdasarkan data operasional, laporan internal, serta sumber informasi lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini dapat memuat pernyataan yang bersifat prospektif (*forward-looking statements*), termasuk yang berkaitan dengan strategi, prioritas, target, rencana, atau ekspektasi atas perkembangan organisasi dan kegiatan investasi di masa mendatang. Pernyataan tersebut didasarkan pada kondisi, asumsi, dan informasi yang tersedia pada saat laporan ini disusun. Berbagai faktor, termasuk perubahan kondisi ekonomi, perkembangan pasar, kebijakan pemerintah, regulasi, maupun faktor eksternal lainnya, dapat menyebabkan hasil aktual berbeda dari yang diproyeksikan atau diharapkan.

# ENERGI untuk MASA DEPAN

> Masa depan Indonesia hanya dapat dibangun melalui kekuatan yang dikelola secara disiplin, transparan, dan berorientasi jangka panjang.



Tema **Energi untuk Masa Depan** berakar dari makna nama Danantara Indonesia itu sendiri — Daya Anagata Nusantara: energi bagi masa depan Indonesia. *Daya* yang berarti energi, merepresentasikan kekuatan, kapasitas, dan semangat untuk bertindak; *Anagata* bermakna masa depan; dan *Nusantara* menegaskan mandat kebangsaan yang diemban. Sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, Danantara Indonesia adalah wujud dari kekuatan dan potensi masa depan bangsa, dan menjadi fondasi filosofis bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan lintas generasi.

Dari filosofi inilah lahir keyakinan bahwa masa depan Indonesia hanya dapat dibangun melalui kekuatan yang dikelola secara disiplin, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Ketangguhan Danantara Indonesia tidak diukur semata dari skala aset yang dikelola, melainkan dari konsistensi arah strategis, integritas tata kelola dan kepemimpinan dalam mengelola kekayaan negara untuk menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan.

Di tengah dinamika global, Danantara Indonesia hadir sebagai instrumen kedaulatan ekonomi nasional, mengonsolidasikan kekuatan ekonomi bangsa dan mengubah potensi menjadi keunggulan kompetitif yang nyata. Komitmen ini diwujudkan melalui pengelolaan aset yang profesional dan akuntabel, investasi pada sektor-sektor prioritas yang berdampak strategis, serta keseimbangan yang cermat antara perspektif global dan kepentingan nasional.

Energi untuk Masa Depan lebih dari sekadar tema laporan tahunan perdana. Tema ini adalah tonggak awal perjalanan Danantara Indonesia-sebuah pernyataan komitmen untuk membangun pijakan yang kokoh, bukan hanya bagi operasional hari ini, melainkan sebagai landasan strategis bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui pijakan inilah, Danantara Indonesia melangkah ke depan dengan satu tekad: mewujudkan ketahanan ekonomi dan kemakmuran jangka panjang bagi generasi mendatang bangsa Indonesia.



# Daftar Isi





| | |
|---|---|
| Tema: Energi untuk Masa Depan | 2 |
| Sambutan Ketua Dewan Pengawas | 8 |
| Sambutan Kepala Badan Pelaksana | 14 |
| Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan | 18 |
| Ikhtisar Pencapaian 2025 | 20 |

## 01 Pembahasan Kelembagaan

| | |
|---|---|
| Profil Lembaga | 26 |
| • Sekilas Danantara Indonesia<br>• Ekosistem Kami<br>• Aliran Dana dalam Ekosistem<br>• Visi, Misi, dan Prinsip-prinsip Utama | |
| Struktur Kelembagaan dan Organisasi | 32 |
| • Struktur Organisasi<br>• Struktur Kepemilikan<br>• Profil Pimpinan | |
| Peristiwa Penting 2025 | 46 |

## 02 Analisis Ekonomi dan Pasar

| | |
|---|---|
| Tinjauan Makroekonomi 2025 | 54 |
| Peran Danantara Indonesia dalam Masa Depan Ekonomi Indonesia | 57 |

## 03 Pencapaian

| | |
|---|---|
| Membangun Fondasi Organisasi | 60 |
| Tata Kelola | 61 |
| • Kerangka Tata Kelola<br>• Model Tata Kelola Tiga Lini<br>• Kode Etik<br>• Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) | |

| | |
|---|---|
| • Pembentukan dan Laporan Komite BPI Danantara<br>• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan<br>• Pembentukan dan Laporan Komite Dewan Pengawas | |
| Fungsi Kepatuhan | 74 |
| • Pembentukan Organisasi Kepatuhan<br>• Kepatuhan terhadap Penyusunan Kebijakan Dasar Tata Kelola<br>• Pemenuhan Organ Komite Badan Pelaksana<br>• Kebijakan Anti-Korupsi, Anti-Suap, dan Anti-Gratifikasi | |
| Fungsi Internal Audit | 77 |
| • Struktur dan Kedudukan Organisasi Internal Audit<br>• Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit<br>• Kewenangan Internal Audit<br>• Standar dan Kode Etik Internal Audit<br>• Komposisi Auditor dan Pengembangan Kompetensi<br>• Pelaksanaan Kegiatan Audit Tahun 2025<br>• *Whistleblowing System* (WBS) | |
| Manajemen Risiko | 83 |
| • Tata Kelola Manajemen Risiko<br>• Kerangka Manajemen Risiko<br>• Budaya Risiko | |
| Keberlanjutan | 85 |
| • Prinsip-prinsip Keberlanjutan<br>• Kerangka Keberlanjutan | |
| Ikhtisar Keuangan | 87 |
| • Sumber Pendanaan dan Alokasi Modal | |
| Kelembagaan dan Kerja Sama Strategis | 90 |
| • Kerja Sama Investasi Global dan Kolaborasi Internasional<br>• Kemitraan Strategis dengan DPR RI<br>• Konsultasi RKAP<br>• Rapat Dengar Pendapat<br>• Koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L) | |



## 04 Transformasi BUMN melalui Danantara Asset Management


| | |
|---|---|
| Tugas dan Fungsi | 96 |
| • Program Transformasi BUMN<br>• Tahapan Transformasi Pengelolaan Portofolio BUMN<br>• Kebijakan Dividen | |
| Program dan Proyek Strategis | 99 |
| • Tiga *Workstream* untuk Mewujudkan Transformasi di 2025<br>• Inisiatif Transformasi BUMN: Penguatan Struktur Garuda Indonesia<br>• Inisiatif Transformasi BUMN: Dukungan Pendanaan Krakatau Steel<br>• Inisiatif Transformasi BUMN: Konsolidasi Bisnis Hilir Pertamina | |
| Penerapan Tata Kelola | 102 |
| Transformasi *Human Capital* | 104 |
| Kolaborasi Strategis | 106 |
| Mentransformasikan Pelayanan Publik: Melayani Sepenuh Hati | 107 |


## 05 Investasi Strategis melalui Danantara Investment Management


| | |
|---|---|
| Tugas dan Fungsi | 111 |
| • Tren yang Mendorong Arah Investasi DIM<br>• Strategi Investasi<br>• Dua Segmen Investasi-Publik & Privat | |
| Program dan Proyek Strategis | 117 |
| • Fasilitas *Chlor Alkali* & *Ethylene Dichloride* (CA-EDC)<br>• Kerja sama dengan Qatar Investment Authority (QIA)<br>• Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah di Makkah<br>• Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) | |

| | |
|---|---|
| Instrumen Pendanaan | 121 |
| • *Revolving Credit Facility* (RCF)<br>• Patriot Bonds<br>• Pengelolaan Struktur Pendanaan | |
| Penerapan Tata Kelola | 122 |
| • Komite Investasi<br>• Manajemen Risiko | |
| Kolaborasi Strategis | 125 |
| • Pengajuan *Associate Member* IFSWF pada 2025 | |


## 06 Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia


| | |
|---|---|
| Memperkuat Talenta dan Kapabilitas Organisasi untuk Mendukung Pertumbuhan Jangka Panjang | 128 |
| Data Demografi Pegawai | 130 |


## 07 Nilai dan Dampak untuk Indonesia


| | |
|---|---|
| Danantara Indonesia Trust | 134 |
| Rumah Hunian Danantara | 136 |

# Sambutan Ketua Dewan Pengawas



## Erick Thohir

**Ketua Dewan Pengawas**
**BPI Danantara**

**Dalam pandangan Dewan Pengawas, kehadiran BPI Danantara merupakan bagian integral dari langkah strategis negara untuk memastikan kekayaan nasional dikelola secara lebih efektif dan berorientasi lintas generasi, sekaligus mendukung Asta Cita, prioritas pembangunan nasional, dan visi Indonesia Emas 2045.**

**Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,**

Pertama-tama, kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta karunia-Nya sehingga BPI Danantara dapat menjalankan amanah yang dipercayakan oleh negara sepanjang tahun 2025.

Mewakili seluruh anggota Dewan Pengawas, izinkanlah kami menyampaikan sambutan yang berisi pandangan dan refleksi atas perjalanan sepanjang tahun dalam Laporan Tahunan 2025 BPI Danantara. Melalui Laporan Tahunan ini, kami menyampaikan pertanggungjawaban atas pengawasan yang diamanahkan kepada Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tahun 2025 menandai tahap awal pembentukan BPI Danantara sebagai badan pengelola investasi yang menjalankan mandat untuk menangani, mengoptimalkan, dan mengembangkan aset strategis Indonesia. Dalam pandangan Dewan Pengawas, kehadiran BPI Danantara merupakan bagian integral dari langkah strategis negara untuk memastikan kekayaan nasional dikelola secara lebih efektif dan berorientasi lintas generasi, sekaligus mendukung Asta Cita, prioritas pembangunan nasional, dan visi Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks tersebut, Dewan Pengawas memaknai pengawasan bukan semata sebagai pemenuhan fungsi kepatuhan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjaga amanah negara, mengawal konsistensi arah institusi, dan memastikan setiap keputusan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang Indonesia. Pengawasan diarahkan agar pertumbuhan, optimalisasi aset, investasi, dan penciptaan nilai berjalan dalam batas risiko yang terukur, didukung tata kelola yang kuat, serta menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, nilai yang diciptakan tidak berhenti pada capaian finansial saat ini, tetapi turut memperkuat kapasitas ekonomi nasional dan memperluas ruang kemakmuran bagi generasi mendatang.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas menempatkan disiplin institusional sebagai landasan pengawasan. Pada fase pembangunan institusi, perhatian tidak hanya diarahkan pada kecepatan eksekusi atau besarnya transaksi, tetapi terutama pada kualitas pengambilan keputusan, ketepatan alokasi modal, pengelolaan risiko, kepatuhan, serta akuntabilitas. Disiplin tersebut diperlukan agar setiap langkah Badan Pelaksana mampu menghasilkan nilai saat ini sekaligus memperkuat ketahanan dan keberlanjutan BPI Danantara dalam jangka panjang.

Kami menyadari bahwa keunikan peran Dewan Pengawas terletak pada kompleksitas mandatnya, yakni tantangan untuk menyeimbangkan akuntabilitas publik (*public accountability*), disiplin pasar (*market discipline*), dan kepentingan strategis nasional (*national strategic interest*). Hal ini menuntut pengawasan yang senantiasa menjaga kepatuhan terhadap prinsip dan ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, pengawasan juga harus memastikan lembaga ini mampu mengantisipasi perubahan, memahami dinamika ekonomi global, serta merespons prioritas pembangunan nasional secara tepat dan bertanggung jawab.

**Sebagai organisasi yang baru dibentuk, fokus utama pengawasan Dewan Pengawas pada tahun 2025 diarahkan pada tiga area strategis, yaitu integritas alokasi modal; pembentukan organisasi dan tata kelola; serta disiplin eksekusi dalam pelaksanaan mandat ganda.**

## Fokus Pengawasan di Tahun Fondasi

Sebagai organisasi yang baru dibentuk, fokus utama pengawasan Dewan Pengawas pada tahun 2025 diarahkan pada tiga area strategis, yaitu integritas alokasi modal; pembentukan organisasi dan tata kelola; serta disiplin eksekusi dalam pelaksanaan mandat ganda. Fokus tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pembangunan institusi pengelola investasi negara tidak cukup diukur dari imbal hasil, tetapi juga dari kemampuan membangun sistem pengambilan keputusan yang kuat, menjaga kepercayaan, mengelola risiko secara baik, dan menciptakan nilai secara berkelanjutan demi masa depan bangsa.

Fokus pertama adalah integritas atas alokasi modal. Bagi Dewan Pengawas, setiap alokasi modal merupakan keputusan strategis yang membawa konsekuensi jangka panjang bagi perekonomian nasional. Karena itu, Dewan Pengawas memastikan bahwa setiap investasi ditempatkan pada sektor-sektor yang memiliki relevansi strategis bagi masa depan Indonesia, mulai dari penguatan ketahanan energi, hilirisasi industri, infrastruktur, transformasi digital, hingga sektor-sektor yang mendorong produktivitas nasional. Di saat yang sama, setiap peluang investasi harus memenuhi standar fundamental ekonomi yang kuat, melalui proses kajian yang disiplin serta pengujian yang menyeluruh.

Fokus kedua adalah pembentukan organisasi dan tata kelola. Bagi *sovereign wealth fund* dan institusi investasi terkemuka dunia, keberlanjutan sebuah lembaga selain capaian yang diraih dalam jangka pendek juga ditentukan oleh kapasitas organisasi dan kualitas penerapan tata kelola. Atas dasar itu, Dewan Pengawas memberikan perhatian besar pada pembentukan kapasitas organisasi, kerangka tata kelola, efektivitas manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengembangan budaya integritas di seluruh institusi. Tujuannya adalah memastikan bahwa organisasi telah didukung oleh sumber daya yang memadai, keputusan dapat dipertanggungjawabkan, risiko telah dikelola secara *prudent*, serta aktivitas berjalan dalam koridor tata kelola yang mendukung keberlanjutan institusi dalam jangka panjang.

Fokus ketiga adalah disiplin eksekusi dalam pelaksanaan mandat ganda, yaitu memastikan keterpaduan antara Danantara Asset Management (DAM) dan Danantara Investment Management (DIM). Melalui DAM, aset BUMN diarahkan agar semakin sehat, efisien, produktif, dan kompetitif, adapun melalui DIM, nilai yang dihasilkan dari pengelolaan aset dikembangkan menjadi kapasitas investasi jangka panjang pada sektor-sektor yang relevan dengan prioritas nasional dan memiliki prospek imbal hasil yang sehat. Dewan Pengawas mengarahkan pengawasan pada kejelasan peran, keselarasan tujuan, disiplin pengambilan keputusan, dan sinergi antarfungsi agar kedua mandat tersebut membentuk satu siklus penciptaan nilai yang saling memperkuat.

Ketiga area strategis tersebut membentuk satu kesatuan kerangka pengawasan untuk memastikan bahwa pertumbuhan BPI Danantara berlangsung secara bertanggung jawab. Bagi Dewan Pengawas, orientasi jangka panjang menuntut setiap keputusan hari ini diuji tidak hanya berdasarkan manfaat segera, tetapi juga berdasarkan daya tahannya terhadap perubahan, pengaruhnya terhadap kualitas portofolio kelolaan, serta kemampuannya menjaga dan meningkatkan nilai aset negara bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, ketahanan institusi, kesinambungan mandat, dan kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi penciptaan nilai lintas generasi.

Beberapa keputusan investasi paling penting pada tahun 2025 justru lahir di tengah lingkungan global yang penuh ketidakpastian. Pada saat pasar menafsirkan risiko secara berbeda-beda dan arah ekonomi dunia terus berubah, Dewan Pengawas memandang bahwa kehati-hatian harus berjalan beriringan dengan keberanian mengambil keputusan. Karena itu, setiap investasi strategis senantiasa diuji melalui berbagai skenario yang dirancang untuk menantang asumsi dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan. *Rigorous stress-testing* dilakukan untuk menilai dampaknya

terhadap portofolio, ketahanan institusi, dan implikasi yang lebih luas terhadap ekonomi nasional. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil bukan sekadar tepat untuk kondisi hari ini, tetapi juga tetap relevan dan tangguh ketika menghadapi berbagai kemungkinan ke depan.

## Pandangan atas Kinerja Badan Pelaksana Tahun 2025

Dewan Pengawas berpandangan bahwa Badan Pelaksana telah menunjukkan kapabilitasnya dalam menerjemahkan mandat strategis BPI Danantara ke dalam pembangunan fondasi organisasi dan pelaksanaan awal agenda pengelolaan aset serta investasi sepanjang tahun 2025. Dalam periode pembentukan yang relatif singkat, Badan Pelaksana telah memperkuat struktur organisasi, menyusun kerangka tata kelola, mengembangkan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, serta membangun mekanisme pengambilan keputusan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan mandat secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dewan Pengawas melakukan pemantauan terhadap berbagai agenda strategis Badan Pelaksana, antara lain Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah di Makkah, rencana Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), penguatan industri *chlor alkali* dan petrokimia, pengembangan ekosistem baterai listrik, investasi pada sektor kesehatan, serta agenda transformasi BUMN melalui restrukturisasi bisnis dan keuangan, konsolidasi portofolio, dan transformasi operasional. Pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap inisiatif memiliki landasan komersial yang memadai, relevan dengan kepentingan nasional, dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan berpotensi memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Di samping itu, salah satu fokus pengawasan Dewan Pengawas di tahun 2025 adalah memastikan bahwa arah strategis institusi diterjemahkan ke dalam perencanaan dan target kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, proses penyusunan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta Indikator Kinerja Utama (IKU) BPI Danantara Tahun 2025 mendapat perhatian yang intensif. Pengawasan dilakukan secara berlapis, dimulai dari penerimaan usulan RKAT dan IKU, dilanjutkan dengan proses reviu dan pembahasan mendalam dalam Rapat Dewan Pengawas hingga persetujuan penuh Dewan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan Presiden.

> **Bagi Dewan Pengawas, orientasi jangka panjang menuntut setiap keputusan hari ini diuji tidak hanya berdasarkan manfaat segera, tetapi juga berdasarkan daya tahannya terhadap perubahan, pengaruhnya terhadap kualitas portofolio kelolaan, serta kemampuannya menjaga dan meningkatkan nilai aset negara bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, ketahanan institusi, kesinambungan mandat, dan kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi penciptaan nilai lintas generasi.**

Dewan Pengawas menjadikan lanskap persetujuan prinsip RKAT dan IKU BPI Danantara Tahun 2025 sebagai dasar penilaian dalam setiap proses evaluasi. Setiap keputusan investasi strategis yang diajukan oleh Badan Pelaksana menjadi perhatian Dewan Pengawas. Kami memastikan bahwa setiap keputusan didukung oleh analisis yang memadai, risiko-risiko utama telah diidentifikasi, berbagai alternatif telah dipertimbangkan, dan dasar pertimbangannya dapat dipertanggungjawabkan secara kuat. Di tengah ketidakpastian global, berbagai keputusan juga diuji melalui *stress-testing* untuk menilai dampaknya terhadap portofolio dan ketahanan institusi.

Dalam periode yang relatif singkat pula, Badan Pelaksana mulai membangun kerangka operasional yang menghubungkan pengelolaan aset dan investasi dalam satu ekosistem yang terintegrasi. DAM telah memulai agenda penyehatan fundamental BUMN, penataan dan konsolidasi portofolio, serta transformasi operasional dan model bisnis. Pada saat yang sama, DIM membangun *pipeline* investasi strategis, menajamkan sektor prioritas, memperkuat instrumen pendanaan, serta menerapkan proses evaluasi dan uji tuntas yang disiplin. Dewan Pengawas memandang perkembangan tersebut sebagai langkah awal yang penting untuk memastikan optimalisasi aset dapat membentuk kapasitas investasi, sementara investasi baru pada gilirannya memperkuat kualitas dan daya saing portofolio.

Dewan Pengawas memandang bahwa keberhasilan BPI Danantara pada tahap awal perlu dinilai secara menyeluruh. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada skala aset atau imbal hasil, tetapi juga pada kualitas portofolio, kesiapan *pipeline* investasi, penerapan tata kelola, disiplin pengelolaan risiko, dan kemampuan institusi menghasilkan dampak ekonomi. Dalam kerangka tersebut, capaian awal tahun 2025 menjadi indikasi bahwa fondasi kelembagaan mulai berfungsi. Namun demikian, sejumlah area masih perlu terus diperkuat, termasuk optimalisasi kinerja konsolidasian, penyelesaian perangkat operasional inti, penguatan pengendalian internal, serta penyempurnaan kebijakan investasi dan manajemen risiko.

Secara khusus, Dewan Pengawas mencatat telah terbangun *institutional architecture* yang mumpuni untuk menjadi fondasi operasional dan tata kelola institusi. Arsitektur kelembagaan inilah yang nantinya akan menentukan pengelolaan permodalan, pengendalian risiko, pengambilan keputusan investasi, serta penciptaan nilai jangka panjang.

Dewan Pengawas juga mengapresiasi komitmen dan upaya Badan Pelaksana dalam menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian BPI Danantara Tahun 2025 dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Di tengah kompleksitas konsolidasi berbagai entitas dalam ekosistem BPI Danantara, langkah tersebut merupakan bagian penting dari pembangunan fondasi transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas kelembagaan. Dewan Pengawas mendorong agar momentum ini terus diperkuat melalui peningkatan kualitas dan konsistensi pelaporan keuangan sebagai salah satu landasan bagi pengelolaan aset dan investasi negara yang *prudent* dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Penerapan Tata Kelola yang Baik

Sejak awal pendiriannya, BPI Danantara dirancang dengan mandat yang jelas untuk mengelola amanah negara melalui tata kelola yang kuat, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang. Dalam kerangka tersebut, Dewan Pengawas menjalankan tugas untuk mengawasi seluruh penyelenggaraan BPI Danantara yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Oleh karena itu, sejak tahun pertama pembentukannya, perhatian utama Dewan Pengawas diarahkan pada pembangunan fondasi tata kelola yang kokoh sebagai landasan bagi pertumbuhan, pengelolaan risiko, dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Dewan Pengawas telah menetapkan empat Peraturan Dewan Pengawas di awal pendirian BPI Danantara. Keempat peraturan tersebut menjadi kerangka kerja yang mengatur bagaimana pengawasan dijalankan, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dikelola. Secara paralel, Dewan Pengawas membentuk seluruh perangkat pendukungnya, yaitu Sekretariat Dewan Pengawas dan pembentukan komite-komite.

Mekanisme *checks and balances* di BPI Danantara dibangun di atas satu prinsip yang bersifat formal kelembagaan, di mana setiap interaksi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dilandasi mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana saling menghormati tugas dan wewenang masing-masing, namun setiap keputusan strategis yang diajukan Badan Pelaksana harus dilengkapi analisis dari aspek manajemen risiko, hukum, kepatuhan, dan aspek terkait lainnya sebelum dapat memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. Mekanisme tersebut dituangkan dalam piagam tata kelola antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam kerangka tata kelola BPI Danantara, Dewan Pengawas berwenang memberikan persetujuan atas sejumlah keputusan strategis, yang sebagian besar memerlukan persetujuan Presiden terlebih dahulu, sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan akuntabilitas berjenjang. Selain itu, koordinasi antara Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dalam penyusunan regulasi internal terus diperkuat dan disempurnakan guna memastikan keselarasan regulasi, kejelasan kewenangan, dan efektivitas tata kelola, dengan tetap menjaga pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ.

## Memperkuat Pengawasan melalui Komite

Dewan Pengawas meyakini bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan kedalaman analisis, sudut pandang yang beragam, serta kemampuan untuk menelaah berbagai isu dari perspektif yang berbeda. Atas dasar itu, komite-komite di bawah Dewan Pengawas memegang peran penting dalam memperkuat kualitas pengawasan yang dijalankan, sekaligus memastikan setiap rekomendasi dan pertimbangan strategis didukung oleh kajian yang komprehensif dan objektif.

Dewan Pengawas didukung oleh Komite Audit, Komite Etik, serta Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia, yang seluruhnya telah lengkap dan bekerja penuh pada tahun 2025. Kehadiran komite-komite memperluas jangkauan dan memperkuat kedalaman analisis dalam rangka mendorong efektivitas pengawasan Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas menilai bahwa komite-komite telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas dan ketajaman pengawasan. Komite Audit mendukung penguatan perencanaan audit, pengendalian internal, serta integrasi tata kelola, risiko, dan kepatuhan; sementara Komite Etik mengawal penetapan Pedoman Kode Etik beserta mekanisme penanganan pelanggaran dan pengawasan melalui *Whistleblowing System*.

Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia turut memberikan rekomendasi atas RKAT dan IKU, mengevaluasi penerapan kebijakan Sumber Daya Manusia, serta menelaah isu strategis remunerasi dan tata kelola Sumber Daya Manusia. Dewan Pengawas mengapresiasi capaian ketiga komite tersebut yang telah mendukung penguatan akuntabilitas, integritas, pengendalian, dan tata kelola organisasi.

## Penutup

Dewan Pengawas menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas kepercayaan dan dukungan bagi BPI Danantara. Penghargaan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan seluruh pegawai atas kerja keras, dedikasi, dan integritas dalam mewujudkan berbagai capaian sepanjang tahun 2025, serta kepada kementerian dan lembaga, mitra strategis, badan usaha milik negara, dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kontribusinya. Sinergi seluruh pihak menjadi landasan penting bagi BPI Danantara dalam melaksanakan mandat dan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi bangsa dan negara.

Memasuki tahap berikutnya, Dewan Pengawas memandang bahwa fondasi yang dibangun sepanjang tahun 2025 perlu diteruskan melalui penguatan kualitas eksekusi, pendalaman optimalisasi aset, peningkatan skala dan kualitas investasi, serta integrasi yang semakin erat di dalam ekosistem BPI Danantara. Arah tersebut penting agar BPI Danantara tumbuh bukan hanya sebagai institusi dengan skala aset yang besar, tetapi juga sebagai institusi yang kuat dalam kualitas keputusan, disiplin risiko, akuntabilitas, dan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Seiring dengan meningkatnya skala dan kompleksitas tanggung jawab yang diemban, Dewan Pengawas akan terus menjalankan pengawasan secara independen, objektif, dan berkesinambungan. Pengawasan diarahkan untuk memastikan pertumbuhan selalu diimbangi dengan penguatan tata kelola, disiplin risiko, kualitas pengendalian, dan akuntabilitas pelaksanaan mandat. Pengawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk menjaga agar keberanian mengambil peluang tetap berada dalam koridor kehati-hatian, sehingga kepercayaan negara dan masyarakat dapat dipelihara serta nilai yang dihasilkan tetap bertahan dari generasi ke generasi.

Tahun 2025 merupakan fondasi awal perjalanan jangka panjang BPI Danantara. Dewan Pengawas meyakini bahwa nilai lintas generasi hanya dapat diwujudkan apabila aset negara dikelola dengan disiplin, berintegritas, berdasarkan tata kelola yang kuat, serta didukung oleh keberanian mengambil keputusan yang terukur. Dengan pengawasan yang teguh dan konstruktif, Dewan Pengawas berkomitmen mengawal agar kekayaan yang dikelola hari ini berkembang menjadi kapasitas ekonomi, ketahanan, dan kemakmuran yang dapat diwariskan kepada generasi Indonesia yang akan datang, selaras dengan Asta Cita, prioritas pembangunan nasional, dan visi Indonesia Emas 2045.

Atas nama Dewan Pengawas,



**Erick Thohir**
**Ketua Dewan Pengawas**
**BPI Danantara**

# Sambutan Kepala Badan Pelaksana



## Rosan Perkasa Roeslani

**Kepala Badan Pelaksana (Chief Executive Officer)**
**BPI Danantara**

**Kami melihat tahun 2025 sebagai tahun membangun fondasi – membangun institusi, transformasi portofolio, dan mulai mengubah kekayaan negara hari ini menjadi investasi untuk generasi mendatang Indonesia.**

**Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya.

Tahun 2025 merupakan tahun yang sangat penting dalam perjalanan Danantara Indonesia. Sebagai tahun pertama operasional, 2025 adalah tahun ketika kami mulai membangun sebuah institusi baru dengan mandat yang besar dan tanggung jawab yang tidak ringan: memastikan kekayaan negara dikelola secara profesional, produktif, akuntabel, dan mampu menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Kami memulai perjalanan ini di tengah lingkungan global yang penuh ketidakpastian, dinamika geopolitik yang semakin kompleks, serta tantangan transformasi ekonomi dan konsolidasi BUMN dalam skala yang besar. Dalam kondisi tersebut, kami menyadari bahwa membangun Danantara Indonesia bukan semata-mata mengenai mengelola aset dalam jumlah besar. Yang jauh lebih penting adalah membangun institusi yang kuat, tata kelola yang kredibel, disiplin investasi, dan kemampuan eksekusi yang konsisten.

Karena itu, kami melihat tahun 2025 sebagai tahun membangun fondasi—membangun institusi, transformasi portofolio, dan mulai mengubah kekayaan negara hari ini menjadi investasi untuk generasi mendatang Indonesia.

## Membangun Institusi

Prioritas pertama kami pada tahun 2025 adalah membangun fondasi kelembagaan Danantara Indonesia.

Kami memperkuat struktur organisasi, membangun fungsi dan kapasitas sumber daya manusia, menyusun kerangka tata kelola, memperkuat manajemen risiko dan kepatuhan, serta membangun mekanisme pengambilan keputusan yang profesional, disiplin, dan terukur.

Kami juga menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem konsolidasi dan pelaporan keuangan atas portofolio yang mencakup lebih dari seribu entitas. Kompleksitas struktur kepemilikan, perbedaan sistem, kebijakan akuntansi, dan siklus pelaporan membutuhkan proses harmonisasi dan standardisasi yang menyeluruh.

Bagi kami, seluruh proses tersebut bukan sekadar pembangunan infrastruktur organisasi. Ini adalah upaya membangun kapasitas institusi yang menjadi prasyarat agar Danantara Indonesia dapat menjalankan mandatnya secara kredibel dalam jangka panjang.

Kami meyakini bahwa tata kelola yang baik bukan hanya mengenai kepatuhan; melainkan membangun kepercayaan. Kepercayaan hanya dapat dibangun melalui transparansi, integritas, kualitas keputusan, dan konsistensi dalam menjalankan amanah yang diberikan negara.

## Transformasi dan *Streamlining* Portofolio BUMN

Prioritas kedua adalah memastikan bahwa aset dan perusahaan negara yang berada dalam pengelolaan Danantara Indonesia dapat memberikan produktivitas dan nilai yang semakin tinggi.

Melalui **Danantara Asset Management (DAM)**, kami mulai menjalankan agenda transformasi dan *streamlining* portofolio BUMN. Fokus kami bukan hanya pada menjaga nilai aset, tetapi pada bagaimana aset tersebut dapat dikelola secara lebih efisien, produktif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Transformasi tersebut mencakup penguatan fundamental bisnis, peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi struktur dan penggunaan aset, serta penataan portofolio agar setiap perusahaan dapat menjalankan perannya secara lebih jelas dan memberikan kontribusi yang optimal.

Beberapa perusahaan strategis menjadi bagian penting dari agenda tersebut.

Pada **Garuda Indonesia**, kami mendukung proses transformasi untuk memperkuat keberlanjutan usaha, meningkatkan efisiensi, dan memulihkan kinerja perusahaan. Sebagai maskapai nasional, Garuda Indonesia memiliki peran strategis dalam menghubungkan masyarakat, wilayah, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada **Krakatau Steel**, kami mendukung langkah-langkah untuk memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan struktur aset, dan memperkuat keberlanjutan operasional. Transformasi ini penting untuk meningkatkan daya saing industri baja nasional yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan dan industrialisasi Indonesia.

Pada **Pertamina**, kami melakukan proses efisiensi bisnis, operasional dan rantai pasok melalui konsolidasi bisnis hilir (*downstream*). Transformasi ini diarahkan untuk mengintegrasikan kegiatan pengolahan, distribusi dan logistik, serta pemasaran dan perdagangan dalam satu rantai nilai *downstream* untuk memperkuat Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi nasional.

Ketiga contoh tersebut mencerminkan pendekatan kami: transformasi BUMN bukan sekadar melakukan efisiensi, tetapi membangun perusahaan yang lebih sehat, kompetitif, dan mampu menciptakan nilai dalam jangka panjang.

## Mengarahkan Modal untuk Prioritas Strategis

Di saat yang sama, Danantara Indonesia mulai menjalankan mandat investasinya melalui **Danantara Investment Management (DIM)**.

Kami meyakini bahwa kekayaan negara tidak boleh berhenti sebagai aset yang dimiliki. Aset tersebut harus dapat dikembangkan menjadi modal produktif, yang kemudian dapat diinvestasikan kembali untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia.

Pada tahun 2025, kami mulai menerjemahkan prinsip tersebut melalui sejumlah inisiatif strategis. Salah satunya adalah Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah di Makkah. Investasi ini memiliki karakter yang unik karena menghubungkan kebutuhan strategis Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah dengan pembangunan aset produktif yang memiliki nilai ekonomi jangka panjang. Langkah awal yang dilakukan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem layanan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Kami juga mulai mendorong pengembangan *Waste-to-Energy* sebagai bagian dari upaya menjawab salah satu tantangan lingkungan dan perkotaan yang semakin mendesak di Indonesia. Bagi kami, investasi pada *Waste-to-Energy* bukan hanya mengenai penyelesaian persoalan sampah, tetapi juga mengenai bagaimana tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang untuk menciptakan energi, teknologi, industri, dan nilai ekonomi baru.

Selain itu, berbagai inisiatif strategis mulai dikembangkan di sektor-sektor yang memiliki arti penting bagi kemandirian dan daya saing nasional.

Pendekatan kami jelas: setiap investasi harus memenuhi disiplin komersial, namun pada saat yang sama memiliki relevansi strategis bagi Indonesia. Kami percaya bahwa *financial return* dan *economic impact* bukanlah dua tujuan yang bertentangan. Keduanya harus dapat dicapai melalui investasi yang disiplin, tata kelola yang kuat, dan orientasi jangka panjang.

## 2025: Fondasi untuk Skala yang Lebih Besar

Tahun 2025 pada akhirnya bukanlah tentang seberapa jauh Danantara Indonesia telah mencapai tujuan akhirnya. Sebaliknya, tahun ini adalah tentang seberapa kuat fondasi yang telah kami bangun untuk perjalanan yang jauh lebih panjang.

Kami telah membangun organisasi, memperkuat tata kelola, mulai melakukan transformasi portofolio BUMN, dan mulai mengarahkan modal kepada berbagai peluang investasi strategis. Berbagai capaian tersebut memberikan dasar yang penting untuk memasuki tahap berikutnya.

Ke depan, tantangan kami adalah meningkatkan kualitas eksekusi. Kami harus mempercepat transformasi perusahaan dan portofolio, memperkuat kapasitas investasi, meningkatkan produktivitas aset, memperluas kemitraan strategis, serta memastikan bahwa setiap rupiah modal negara dikelola dengan disiplin dan menghasilkan nilai yang optimal.

Kami menyadari bahwa perjalanan membangun Danantara Indonesia adalah perjalanan jangka panjang. Kepercayaan tidak dibangun melalui satu transaksi, satu investasi, atau satu tahun kinerja. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi, integritas, kualitas keputusan, dan kemampuan untuk menciptakan nilai secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan Danantara Indonesia tidak akan diukur semata-mata dari besarnya aset yang kami kelola, tetapi dari kemampuan kami mengubah aset tersebut menjadi produktivitas, investasi, pertumbuhan, dan kemakmuran yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Amanah yang diberikan kepada kami adalah memastikan bahwa kekayaan yang dimiliki Indonesia hari ini dapat menjadi fondasi kesejahteraan bagi generasi yang akan datang.

Dengan disiplin, integritas, tata kelola yang kuat, dan orientasi jangka panjang, kami akan terus bekerja untuk menjadikan aset negara sebagai mesin pertumbuhan, sumber investasi, penguat daya saing, dan fondasi kemakmuran Indonesia.

Atas nama Badan Pelaksana,



**Rosan Perkasa Roeslani**
**Kepala Badan Pelaksana (Chief Executive Officer)**
**BPI Danantara**

# Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan*)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Tahunan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**Jakarta, November 2026,**

**DEWAN PENGAWAS**

**Erick Thohir**
Ketua Dewan Pengawas

**Muliaman D. Hadad**
Wakil Ketua Dewan Pengawas

**Dudung Abdurachman**
Anggota Dewan Pengawas

**Yusril Ihza Mahendra**
Anggota Dewan Pengawas

**Airlangga Hartarto**
Anggota Dewan Pengawas

**Sugiono**
Anggota Dewan Pengawas

**Agus Harimurti Yudhoyono**
Anggota Dewan Pengawas

**Abdul Muhaimin Iskandar**
Anggota Dewan Pengawas

**Zulkifli Hasan**
Anggota Dewan Pengawas

**Bahlil Lahadalia**
Anggota Dewan Pengawas

**Prasetyo Hadi**
Anggota Dewan Pengawas

**Suahasil Nazara**
Anggota Dewan Pengawas

*) Bahwa yang menandatangani adalah Dewan Pengawas yang menjabat pada saat Laporan Tahunan ini dikeluarkan.

# Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Tahunan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**Jakarta, November 2026,**

**BADAN PELAKSANA**



**Rosan Perkasa Roeslani**
**Kepala Badan Pelaksana**
**(Chief Executive Officer)**



**Dony Oskaria**
**Anggota Badan Pelaksana**
**(Chief Operating Officer)**



**Pandu Patria Sjahrir**
**Anggota Badan Pelaksana**
**(Chief Investment Officer)**



**Sigit Puji Santosa**
**Anggota Badan Pelaksana**
**(Chief Technology Officer)**

Ikhtisar Pencapaian 2025

# Capaian Danantara Indonesia dalam Angka

Sepanjang tahun 2025, tahun pertama perjalanannya, Danantara Indonesia telah membangun fondasi kelembagaan, memperkuat tata kelola, serta memulai berbagai inisiatif strategis yang berdampak bagi perekonomian nasional. Beberapa capaian utama yang menandai tahun pertama perjalanan Danantara Indonesia antara lain:

**Rp203,4** *triliun*

Laba di tahun pertama beroperasi

**8,7** *%*

*Return on Equity* kinerja pro forma 12 bulan*)

**Rp11.607,04** *triliun*

Total aset konsolidasian

**USD100+** *juta*

Komitmen filantropi untuk Danantara Indonesia Trust

**11** *kemitraan*

Kemitraan strategis global dengan komitmen investasi

*) Angka pro forma mencerminkan periode Januari-Desember 2025 dan tidak diaudit.

# Strategi Danantara Indonesia menuju Mandatnya

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPI Danantara tahun 2025 yang telah disetujui sesuai ketentuan yang berlaku, Danantara Indonesia telah merumuskan strategi indikatif melalui fokus tahunan untuk mencapai mandatnya:

**2025**

Tahun perdana ini menjadi fondasi awal dengan fokus pada pembentukan *Sovereign Fund* kelas dunia dengan tata kelola institusi yang unggul.

**2026-2027**

Danantara Indonesia akan menjalankan perannya untuk mengembangkan kapabilitas operasional dan investasi secara menyeluruh.

**2028-2029**

Danantara Indonesia memiliki aspirasi untuk menjaga *value creation* yang berkelanjutan.

Setiap langkah ini didukung oleh rencana kerja terfokus dari masing-masing fungsi utama, mulai dari pengelolaan keuangan, *treasury*, manajemen risiko, pengembangan talenta, penguatan hubungan global, manajemen pemangku kepentingan, penguatan fungsi hukum dan kepatuhan, audit internal, ekonomi, solusi digital, tata kelola, kemajuan teknologi, industrialisasi, serta inisiatif teknologi strategis.

Danantara Indonesia menjalankan mandatnya melalui dua *holding* yang dibentuk dan dimiliki sepenuhnya oleh BPI Danantara, yaitu Holding Operasional yakni PT Danantara Asset Management ("DAM") dan Holding Investasi yakni PT Danantara Investment Management ("DIM").






### Membangun Fondasi Organisasi dan Tata Kelola

- Membangun fondasi tata kelola melalui penyusunan kebijakan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, pembentukan komite di bawah Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, pembentukan dan pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan audit internal, serta penetapan pedoman etika dan perilaku.
- Membangun fondasi organisasi melalui penetapan struktur kelembagaan dan pemenuhan sumber daya manusia profesional untuk mendukung kapasitas operasional Danantara Indonesia pada tahun pertama pembentukannya.

### Transformasi Pengelolaan BUMN

- Memulai penyederhanaan portofolio BUMN melalui likuidasi, merger, dan divestasi perusahaan non-prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
  - Langkah ini ditargetkan dapat mengurangi jumlah BUMN dari semula berjumlah lebih dari 1.000 BUMN menjadi sekitar 250-300 entitas pada akhir 2026.
- Mulai memperkuat peran pengelolaan aset melalui dukungan pinjaman pemegang saham dan penyertaan modal untuk restrukturisasi keuangan serta pengembangan bisnis BUMN.
- Mengembangkan skema pembiayaan bersama Himpunan Bank Milik Negara (“Himbara”) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk untuk mendukung pengembangan bisnis BUMN serta program penugasan pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan dukungan pada program 3 Juta Rumah.



# Pencapaian Tahun Pertama:
# Energi untuk Masa Depan

**Tahun pertama Danantara Indonesia menjadi fase peletakan fondasi untuk membangun Energi untuk Masa Depan: kekuatan kelembagaan, tata kelola, kapasitas investasi, dan kemitraan yang dibutuhkan untuk mengubah potensi ekonomi bangsa menjadi nilai jangka panjang.**

## Membangun Kapasitas Investasi

- Mulai menjalankan mandat investasi strategis melalui berbagai proyek, seperti Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah di Makkah dan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), serta penguatan kapasitas investasi.
- Proyek Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas layanan bagi jemaah, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem halal global melalui pengembangan aset produktif yang bernilai jangka panjang.
- PSEL menjadi bagian dari komitmen untuk mengatasi masalah krisis sampah nasional sekaligus mendukung transisi energi bersih dan memberi manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial bagi masyarakat.
- Meningkatkan kapasitas investasi melalui berbagai instrumen pembiayaan seperti penyertaan modal BPI Danantara, Patriot Bonds, *Revolving Credit Facility*, dan lainnya.

## Memperkuat Peran Global

- Menandatangani 11 (sebelas) nota kesepahaman strategis untuk mempererat hubungan bilateral institusional, menyalurkan investasi global, keahlian, dan teknologi ke sektor-sektor prioritas Indonesia.
- Memposisikan Danantara Indonesia sebagai mitra investasi kredibel dan terpercaya bagi SWF, institusi keuangan, dan korporasi internasional melalui berbagai kegiatan *thought leadership* dan tingkat global lainnya.

# Pembahasan Kelembagaan



Danantara Indonesia hadir untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan investasi sebagai landasan pertumbuhan jangka panjang. Dengan tata kelola yang kuat dan visi yang berorientasi ke depan, Danantara Indonesia berkomitmen mengembangkan potensi Indonesia untuk menciptakan nilai bagi generasi yang akan datang.

Danantara Indonesia




01




# Profil Lembaga

## Sekilas Danantara Indonesia

### Sejarah dan Tujuan Pembentukan BPI Danantara

BPI Danantara merupakan badan pengelola investasi milik negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), dengan organisasi dan tata kelolanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, serta tata cara pengelolaan asetnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

BPI Danantara resmi didirikan dan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Pendirian BPI Danantara dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang oleh BUMN dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPI Danantara diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan kewenangan BUMN dengan berbagai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut antara lain mencakup pengelolaan aset, pelaksanaan investasi, pengembangan portofolio, serta penguatan nilai strategis BUMN sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

**Danantara Indonesia menjalankan mandatnya melalui dua *holding* yang dibentuk dan dimiliki sepenuhnya oleh BPI Danantara, yaitu PT Danantara Asset Management ("DAM") dan PT Danantara Investment Management ("DIM").**

## Danantara Indonesia, Langkah Berani menuju Asta Cita

Danantara Indonesia hadir sebagai instrumen strategis negara dalam mewujudkan Asta Cita dan mesin transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Danantara Indonesia menjadi instrumen strategis negara yang mengemban dua mandat yakni mewujudkan dampak positif terhadap perekonomian dan ketahanan nasional, sekaligus menghasilkan imbal hasil berkelanjutan bagi kekayaan antargenerasi.

Melalui pengelolaan kekayaan negara dan investasi secara terintegrasi, Danantara Indonesia mengarahkan fokus kerjanya untuk memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan produktivitas, mempercepat hilirisasi, serta meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Strategi ini juga diharapkan dapat mendorong keterlibatan sektor swasta dan mitra global untuk memfokuskan sumber daya pada sektor prioritas nasional, guna mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi yang berkelanjutan.



# Ekosistem Kami

Danantara Indonesia dibentuk sebagai ekosistem kelembagaan terintegrasi untuk mengoptimalkan dan mengembangkan nilai BUMN serta sumber dana lainnya. Dalam menjalankan kewenangannya, BPI Danantara mendirikan Holding Investasi dan Holding Operasional (sebagaimana disebut secara kolektif sebagai "Danantara Indonesia") dengan ruang lingkup masing-masing sebagai berikut:

| BPI Danantara | Danantara Asset Management atau DAM (Holding Operasional) | Danantara Investment Management atau DIM (Holding Investasi) |
|---|---|---|
| Menjalankan mandat strategis negara dalam mengelola BUMN. BPI Danantara bertindak sebagai pengarah strategis dan induk dari Holding Operasional DAM dan Holding Investasi DIM. Peran ini memastikan pengelolaan BUMN, investasi, dividen, dan pemberdayaan aset berjalan secara terarah, dan selaras dengan kepentingan nasional. | Mengelola operasional BUMN dan tugas lain yang ditetapkan oleh BPI Danantara, untuk menghasilkan nilai ekonomi dan sosial jangka panjang, meningkatkan daya saing, serta mendukung pembangunan nasional. Pada tahun 2025, DAM mengelola portofolio yang terdiri dari sekitar 50 *holding* BUMN. Rincian mengenai DAM dijelaskan pada Bab "Transformasi BUMN Melalui Danantara Asset Management" dalam Laporan Tahunan ini. | Mengelola investasi strategis untuk menghasilkan imbal hasil yang berkelanjutan, memperluas kapasitas investasi, dan memperkuat ketahanan ekonomi di sektor prioritas. Rincian mengenai DIM dijelaskan pada Bab "Investasi Strategis Melalui Danantara Investment Management" dalam Laporan Tahunan ini. |

Struktur ekosistem Danantara Indonesia yang disajikan dalam bagian ini mencerminkan kondisi per 31 Desember 2025, yang mencakup BPI Danantara, Danantara Asset Management (DAM), dan Danantara Investment Management (DIM). Danantara Development Management Fund (DDMF) dan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dibentuk pada tahun 2026 sehingga belum tercakup dalam laporan ini.

**Melalui sinergi DAM dan DIM, Danantara Indonesia memastikan aset negara dikelola secara optimal dan diinvestasikan kembali secara efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.**

Dalam ekosistem ini, pengelolaan dan transformasi BUMN yang dilakukan oleh DAM secara langsung mendukung kapasitas investasi DIM di sektor prioritas nasional. Sebaliknya, hasil investasi strategis DIM turut memperkuat kinerja serta daya saing BUMN yang dikelola oleh DAM. Keduanya beroperasi dalam satu ekosistem yang saling memperkuat, dengan penerapan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik sebagai landasan bersama.

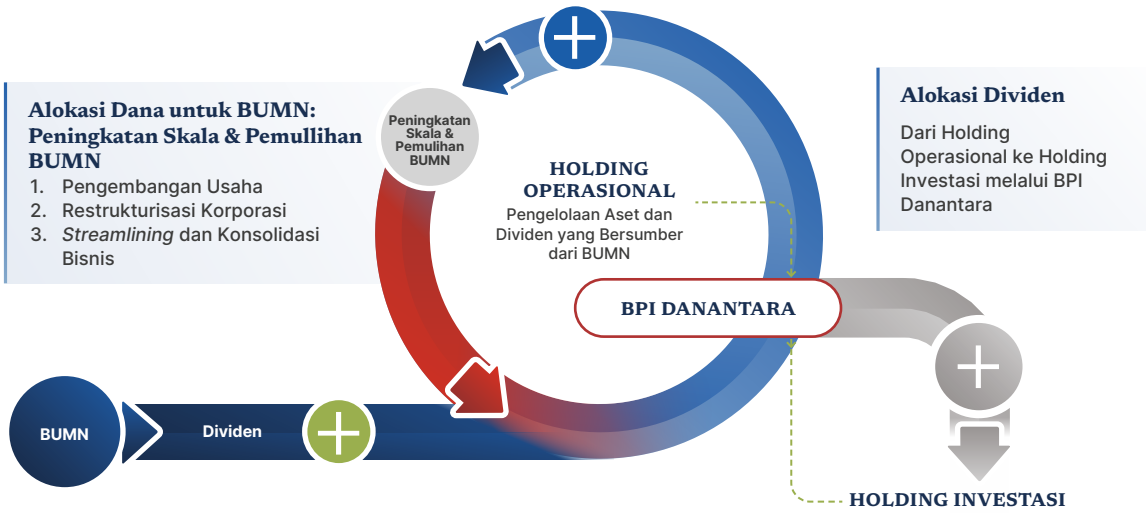
Sinergi ini diarahkan untuk mencapai tujuh objektif strategis, yakni:

- Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
- Penciptaan Lapangan Kerja
- Manajemen Risiko Berkelas Dunia
- Menghasilkan Imbal Hasil
- Meningkatkan Kolaborasi dengan Sektor Swasta
- Bermitra dengan Investor Global
- Mendorong Inovasi

# Aliran Dana dalam Ekosistem

**Mekanisme Penyaluran Modal**

- Holding Operasional dan Holding Investasi mengajukan proposal pendanaan kepada BPI Danantara
- BPI Danantara akan menyalurkan modal berdasarkan nilai strategis dan prioritas program yang diajukan




Danantara Indonesia menerapkan mekanisme pengelolaan dana yang terstruktur dan berkelanjutan, di mana hasil dividen BUMN dialokasikan kembali secara strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kerangka ini, BPI Danantara berperan sebagai pengelola utama yang mengarahkan dana agar menghasilkan nilai tambah yang optimal bagi negara dan masyarakat.

**Sumber pendanaan utama berasal dari dividen BUMN.** Dividen tersebut dihimpun dan dikelola oleh DAM, yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan operasional atas aset, mengonsolidasikan seluruh aset dan dividen BUMN ke dalam satu kesatuan permodalan yang terintegrasi.



Danantara Indonesia dibentuk sebagai ekosistem kelembagaan terintegrasi untuk mengoptimalkan dan mengembangkan nilai BUMN serta sumber dana lainnya. Dalam menjalankan kewenangannya, BPI Danantara mendirikan Holding Investasi (DIM) dan Holding Operasional (DAM).

Dana yang terhimpun selanjutnya dialokasikan ke dua jalur strategis. Pertama, sebagian dana disalurkan kembali kepada BUMN yang tengah dalam fase pengembangan (*scale-up*) maupun pembenahan kinerja (*turnaround*), melalui pendanaan pengembangan bisnis atau restrukturisasi korporasi. Kedua, sebagian dividen dialirkan ke DIM melalui BPI Danantara untuk ditempatkan pada proyek-proyek strategis nasional, mencakup sektor energi, infrastruktur digital, ketahanan pangan, serta hilirisasi industri.

Seluruh penyaluran modal berjalan melalui mekanisme terstruktur dan akuntabel. DAM maupun DIM wajib mengajukan proposal pendanaan kepada BPI Danantara untuk dievaluasi dan dicairkan berdasarkan nilai strategis serta prioritas dari setiap program yang diusulkan.

Dengan demikian, aliran dana dalam ekosistem dirancang sebagai siklus nilai yang produktif dan berkelanjutan.

# Visi, Misi, dan Prinsip-prinsip Utama

## Visi

**Membangun Kemakmuran untuk Indonesia**

- Menjadi *Sovereign Fund* terkemuka
- Memberikan kontribusi signifikan kepada perekonomian Indonesia

## Misi

**Agen pertumbuhan melalui investasi, membangun ketahanan nasional dan sumber daya manusia yang berdaya saing**

- Membangun BUMN yang adaptif, kompetitif, dan menciptakan nilai ekonomi dan sosial
- Mendorong investasi berkualitas tinggi dan berkelanjutan
- Menumbuhkan kekayaan negara dan mendukung terbukanya lapangan kerja dalam negeri
- Mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan

## Mandat

**Menjalankan dwi mandat:**

- Mewujudkan dampak positif terhadap ekonomi dan memastikan ketahanan nasional
- Mewujudkan imbal-hasil berkelanjutan untuk membangun kekayaan antar generasi



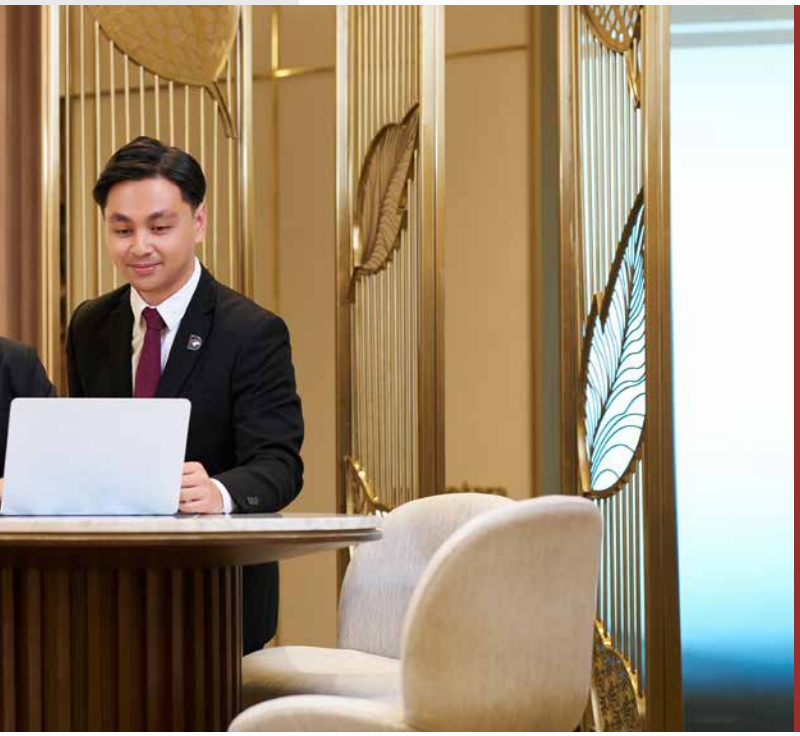
# Prinsip-prinsip Utama

**Tata Kelola yang Baik**

**Manajemen Risiko untuk Mitigasi**

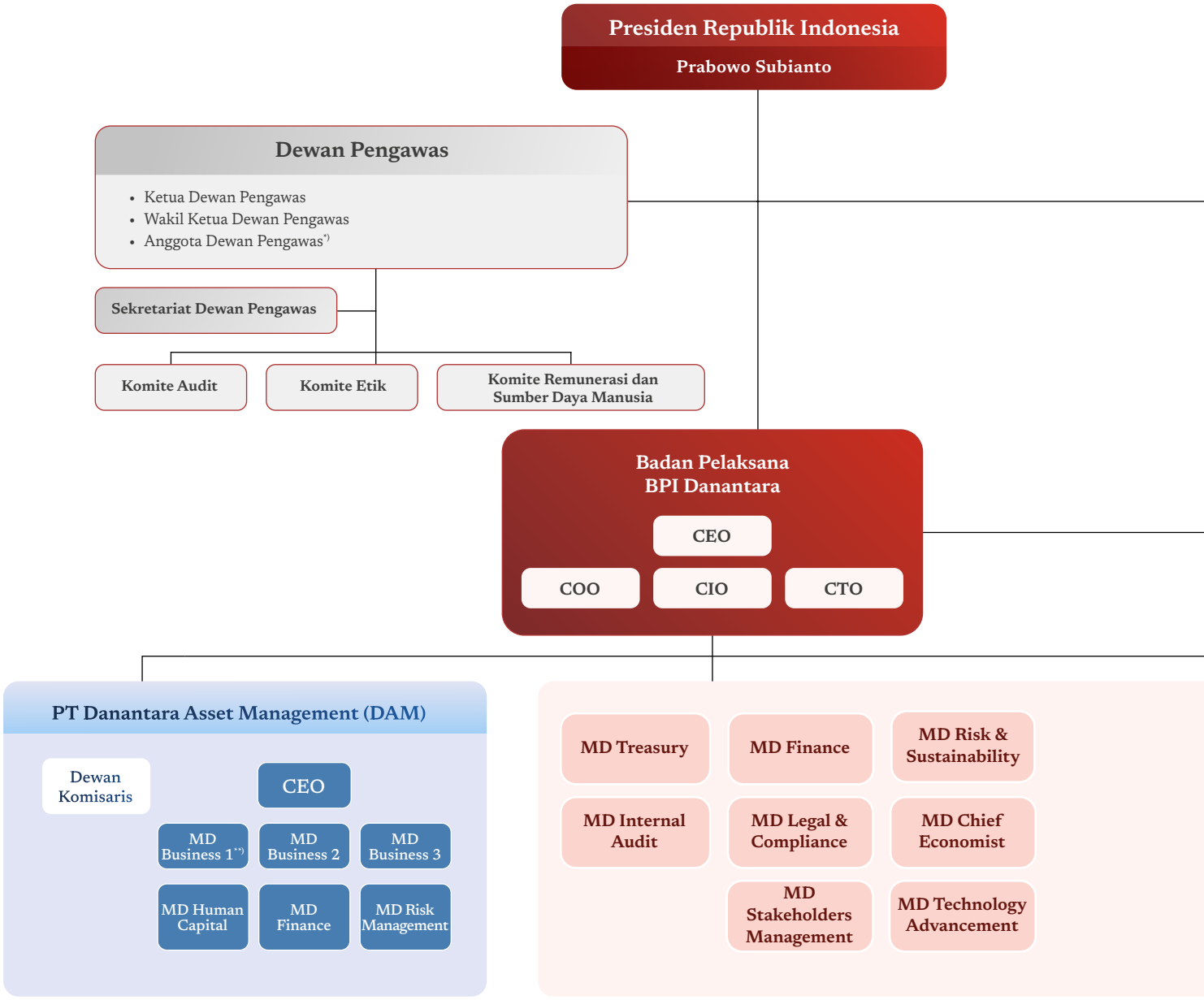
**Sumber Daya Manusia Kompeten**

**Sistem dan Prosedur Terukur**



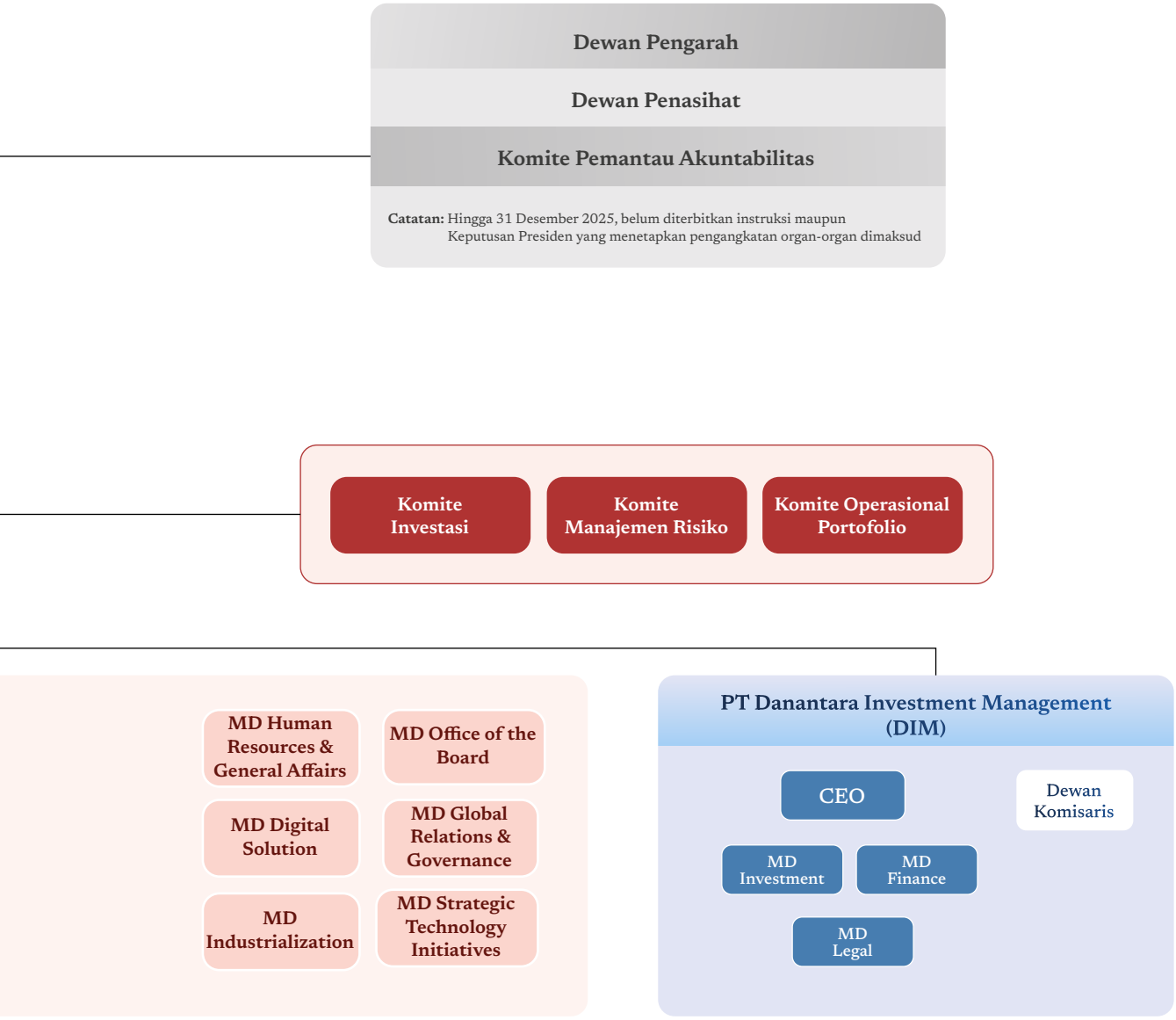
# Struktur Kelembagaan dan Organisasi

## Struktur Organisasi




*) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari:
1. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
2. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan
8. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi
9. Menteri Keuangan
10. Menteri Sekretaris Negara

**) Posisi belum terisi, tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh CEO DAM selaku Plt.


Dewan Pengarah
Dewan Penasihat
Komite Pemantau Akuntabilitas
Catatan: Hingga 31 Desember 2025, belum diterbitkan instruksi maupun Keputusan Presiden yang menetapkan pengangkatan organ-organ dimaksud
Komite Investasi
Komite Manajemen Risiko
Komite Operasional Portofolio
MD Human Resources & General Affairs
MD Office of the Board
MD Digital Solution
MD Global Relations & Governance
MD Industrialization
MD Strategic Technology Initiatives
PT Danantara Investment Management (DIM)
CEO
Dewan Komisaris
MD Investment
MD Finance
MD Legal

## Tugas & Fungsi Jabatan:

- **Badan Pelaksana:** Organ BPI Danantara yang bertugas menyelenggarakan pengurusan operasional BPI Danantara.
- **Managing Director:** Pimpinan Direktorat yang memimpin fungsi-fungsi strategis serta mengoordinasikan kebijakan lintas Direktorat.
- **Komite Investasi:** Membantu Badan Pelaksana dengan memberikan rekomendasi terkait strategi, rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan investasi, termasuk parameter risiko investasi, kinerja portofolio.
- **Komite Manajemen Risiko:** Membantu Badan Pelaksana memberikan rekomendasi terkait pengelolaan risiko, termasuk kerangka, kebijakan, dan implementasi manajemen risiko.
- **Komite Operasional Portofolio:** Membantu Badan Pelaksana memberikan rekomendasi terkait pengelolaan operasional portofolio, termasuk dividen, penyertaan modal, penugasan khusus, restrukturisasi, dan aksi korporasi.
- **Dewan Komisaris DAM:** Melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, serta memberikan persetujuan, tanggapan, atau rekomendasi sesuai Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan ketentuan perundang-undangan. Dewan Komisaris juga memastikan penerapan GCG, memantau pelaksanaan rencana kerja dan KPI Direksi, menyampaikan laporan pengawasan kepada RUPS, serta mengoordinasikan komite-komite pendukung untuk memperkuat efektivitas pengawasan.
- **Dewan Komisaris DIM:** Melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi, serta memberikan persetujuan, tanggapan, atau rekomendasi sesuai Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan ketentuan perundang-undangan. Dewan Komisaris juga memastikan penerapan GCG, memantau pelaksanaan rencana kerja dan KPI Direksi, menyampaikan laporan pengawasan kepada RUPS, serta mengoordinasikan komite-komite pendukung untuk memperkuat efektivitas pengawasan.
- **Dewan Pengawas:** Organ BPI Danantara yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan BPI Danantara yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.
- **Sekretariat Dewan Pengawas:** Sekretariat Dewan Pengawas bertugas memberikan dukungan administratif, koordinatif, dan substantif kepada Dewan Pengawas dan komite-komite di bawahnya. Dukungan tersebut ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara tertib, efektif, dan akuntabel.
- **Komite Audit:** Membantu Dewan Pengawas memberikan masukan atas perencanaan kerja dan anggaran, proses audit dan pelaporan keuangan, serta efektivitas fungsi audit internal.
- **Komite Etik:** Membantu Dewan Pengawas memberikan rekomendasi atas penyusunan, penerapan, dan evaluasi kode etik, termasuk penanganan dugaan pelanggaran dan tindak lanjutnya.
- **Komite Remunerasi dan SDM:** Membantu Dewan Pengawas menelaah, memantau, dan memberikan rekomendasi terkait tata kelola SDM, remunerasi, serta pengelolaan kinerja Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

* Sehubungan dengan jabatan Dewan Pengarah, Dewan Penasihat dan Komite Pemantau Akuntabilitas, belum terbit instruksi maupun Keputusan Presiden yang menetapkan pengangkatan pihak terkait.

## Struktur Kepemilikan

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025**




**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025**




Berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan, BPI Danantara merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Struktur kepemilikan saham DAM dan DIM terdiri atas 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Kementerian BUMN dan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham Seri B yang dimiliki oleh BPI Danantara. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat tata kelola serta mengoptimalkan pengelolaan aset strategis negara, struktur kepemilikan DAM dan DIM disempurnakan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh saham DAM dan DIM akan menjadi 100% (seratus persen) milik BPI Danantara.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 juga memperkuat arsitektur kelembagaan BUMN melalui transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN ("BP BUMN"), yang menjalankan fungsi sebagai regulator dengan tugas menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN. Sejalan dengan perubahan tersebut, struktur kepemilikan saham BUMN disempurnakan menjadi terdiri atas 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Kepala BP BUMN dan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham Seri B yang dimiliki oleh BPI Danantara.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, proses implementasi perubahan struktur kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 masih berlangsung. Dalam rangka implementasi tersebut, pengalihan 1% (satu persen) saham DIM yang dimiliki oleh BP BUMN kepada BPI Danantara telah direalisasikan pada tanggal 22 Desember 2025. Adapun pengalihan 1% (satu persen) saham DAM yang dimiliki oleh BP BUMN kepada BPI Danantara serta pengalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham BUMN yang dimiliki oleh DAM kepada BPI Danantara masih dalam proses.

# Profil Pimpinan

## Dewan Pengawas





**Erick Thohir**

Ketua Dewan Pengawas



**Muliaman D. Hadad**

Wakil Ketua Dewan Pengawas

PINDAI

UNTUK PROFIL
LEBIH LENGKAP



**Dudung Abdurachman**

Anggota Dewan Pengawas



**Yusril Ihza Mahendra**

Anggota Dewan Pengawas



**Airlangga Hartarto**

Anggota Dewan Pengawas



**Sugiono**

Anggota Dewan Pengawas



**Agus Harimurti Yudhoyono**

Anggota Dewan Pengawas



**Abdul Muhaimin Iskandar**

Anggota Dewan Pengawas



**Zulkifli Hasan**

Anggota Dewan Pengawas



**Bahlil Lahadalia**

Anggota Dewan Pengawas



**Prasetyo Hadi**

Anggota Dewan Pengawas



**Suahasil Nazara**

Anggota Dewan Pengawas

## Dewan Pengawas
(yang Telah Berakhir Masa Jabatannya)



**Djamari Chaniago*)**

Anggota Dewan Pengawas



**Pratikno**)**

Anggota Dewan Pengawas



**Purbaya Yudhi Sadewa***)**

Anggota Dewan Pengawas



**Sri Mulyani Indrawati****)**

Anggota Dewan Pengawas



**Budi Gunawan*****)**

Anggota Dewan Pengawas

*) Tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas sehubungan dengan berakhirnya jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 1 Oktober 2026.
**) Tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas sehubungan dengan berakhirnya jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 1 Oktober 2026.
***) Tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas sehubungan dengan berakhirnya jabatan sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026.
****) Tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas sehubungan dengan berakhirnya jabatan sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025.
*****) Tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas sehubungan dengan berakhirnya jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 8 September 2025.

## Struktur Dewan Pengawas



**Ketua Dewan Pengawas**
Erick Thohir



**Wakil Ketua Dewan Pengawas**
Muliaman D. Hadad

**Anggota Dewan Pengawas**



**Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan**
Dudung Abdurachman



**Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan**
Yusril Ihza Mahendra



**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian**
Airlangga Hartarto



**Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**
Sugiono



**Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**
Agus Harimurti Yudhoyono



**Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
Abdul Muhaimin Iskandar



**Menteri Koordinator Bidang Pangan**
Zulkifli Hasan



**Menko Hilirisasi dan Energi**
Bahlil Lahadalia



**Menteri Sekretaris Negara**
Prasetyo Hadi



**Menteri Keuangan**
Suahasil Nazara



**Kepala Sekretariat Dewan Pengawas/ Managing Director Office of the Supervisory Board**
Hadiyan Sumintaatmadja

### Komite Audit

Ketua: Hadiyati Munawaroh
Anggota:
1. Erick Thohir
2. Muliaman D. Hadad
3. Prasetyo Hadi
4. Agus Harimurti Yudhoyono
5. Zulkifli Hasan
6. Ancella Anitawati Hermawan
7. Irwan Lubis

### Komite Etik

Ketua: Komaruddin Hidayat
Anggota:
1. Erick Thohir
2. Muliaman D. Hadad
3. Dudung Abdurachman
4. Yusril Ihza Mahendra
5. Abdul Muhaimin Iskandar
6. Yos Johan Utama
7. Mari Elka Pangestu

### Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia

Ketua: Marina R. Tusin
Anggota:
1. Erick Thohir
2. Muliaman D. Hadad
3. Sugiono
4. Airlangga Hartarto
5. Suahasil Nazara
6. Kemal Azis Stamboel
7. Iggi H. Achsien

## Badan Pelaksana





## Rosan Perkasa Roeslani

Chief Executive Officer

Seorang pengusaha, diplomat, dan abdi negara Indonesia dengan pengalaman luas di bidang investasi, keuangan, pertambangan, kesehatan, properti, dan media. Sejak Agustus 2024, beliau menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Beliau pernah menduduki berbagai posisi penting, termasuk Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (2023–2024), Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (2021–2023), serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) periode 2015–2020. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PABSI (Persatuan Angkat Besi Indonesia), Penasihat/Anggota Dewan Kehormatan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), serta pernah menjabat Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional



## Dony Oskaria

Chief Operating Officer

Seorang profesional yang memiliki rekam jejak kepemimpinan di sektor penerbangan, pariwisata, keuangan, serta pengalaman dalam pemerintahan. Beliau menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara pada periode 2024–2025 sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN pada 8 Oktober 2025. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney pada periode 2021–2024. Dalam peran tersebut, beliau turut mendorong konsolidasi dan revitalisasi ekosistem pariwisata serta kebandarudaraan nasional. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia pada periode 2020–2021 dan berkontribusi dalam berbagai inisiatif restrukturisasi serta pembenahan operasional perusahaan. Pengalaman kepemimpinan beliau juga mencakup jabatan sebagai Komisaris Garuda Indonesia pada periode 2014–2019 serta anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) pada periode 2015-2019, dengan fokus pada strategi pengembangan pariwisata.



## Pandu Patria Sjahrir

Chief Investment Officer

Seorang profesional investasi yang berfokus pada transformasi digital, teknologi finansial, dan investasi strategis. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Chairman SEA Group Indonesia di mana beliau mengawal ekspansi perusahaan di tengah pertumbuhan ekonomi digital Asia Tenggara, dan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan platform digital terkemuka. Sebagai salah satu pendiri AC Ventures, beliau turut menyalurkan modal ke berbagai perusahaan yang bertumbuh pesat di Indonesia serta Asia Tenggara. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Bursa Efek Indonesia (BEI) dan saat ini memimpin Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai Ketua Umum. Beliau memiliki gelar BA Ekonomi dari University of Chicago, serta MBA dari Stanford University.



## Sigit Puji Santosa

Chief Technology Officer

Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO PT Pindad, produsen pertahanan Indonesia, di mana beliau memimpin pengembangan kendaraan taktis, sistem persenjataan, dan amunisi, termasuk Limusin Garuda kepresidenan. Karier beliau mencakup kepemimpinan di Pusat Teknologi Transportasi Berkelanjutan Nasional ITB dan Institut Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan. Karier beliau di luar negeri meliputi inovasi produk terkemuka di General Motors USA, mengembangkan kendaraan performa tinggi, mewah, dan SUV untuk GM Amerika Utara, GM Korea, dan Eropa.




## BPI Danantara

## Managing Directors*)

**01 Lieng-Seng Wee**
Managing Director,
Risk & Sustainability

**02 Ricardo Irwan Rei**
Managing Director,
Strategic Technology Initiatives

**03 Rohan Hafas**
Managing Director,
Stakeholders Management

**04 Jonathon Allaway**
Managing Director,
Digital Solutions

**05 Sanjay Bharwani**
Managing Director, Human
Resources & General Affairs

**06 Ahmad Hidayat**
Managing Director,
Internal Audit

**07 Dwi Susanto**
Managing Director,
Technology Advancement

**08 Mohamad Al-Arief**
Managing Director,
Global Relations & Governance

*) Posisi per 31 Desember 2025




**09** **Ardy Muawin**
Managing Director,
Industrialization

**10** **Ivy Santoso**
Managing Director,
Office of the Board

**11** **Robertus Billitea**
Managing Director,
Legal & Compliance

**12** **Reza Yamora Siregar**
Managing Director,
Chief Economist

**13** **Ali Setiawan**
Managing Director,
Treasury

**14** **Arief Budiman**
Managing Director,
Finance

PINDAI

UNTUK PROFIL
LEBIH LENGKAP




## Danantara Asset Management
## Managing Directors*)

**01** | **Riko Banardi**
Managing Director,
Risk Management

**02** | **Setyanto Hantoro**
Managing Director, Business 2

**03** | **Febriany Eddy**
Managing Director, Business 3

**04** | **Sahala Situmorang**
Managing Director, Finance

**05** | **Agus Dwi Handaya**
Managing Director, Human Capital

PINDAI

UNTUK PROFIL
LEBIH LENGKAP

*) Posisi per 31 Desember 2025




## Danantara Investment Management
## Managing Directors*)

**01** | **Djamal Attamimi**
Managing Director, Finance

**02** | **Stefanus Ade Hadiwidjaja**
Managing Director, Investment

**03** | **Bono Daru Adji**
Managing Director, Legal

PINDAI

UNTUK PROFIL
LEBIH LENGKAP

*) Posisi per 31 Desember 2025

# Peristiwa Penting 2025

## Peluncuran Danantara Indonesia



> **Lebih dari pengelola investasi, Danantara Indonesia adalah instrumen pembangunan nasional yang menggerakkan kekayaan negara untuk menciptakan nilai jangka panjang.**

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025. Peluncuran ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mentransformasi pengelolaan kekayaan negara guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan nilai jangka panjang.

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa Danantara Indonesia bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional untuk mengoptimalkan kekayaan bangsa. Transformasi ini berangkat dari refleksi perjalanan delapan dekade kemerdekaan Indonesia untuk memastikan bahwa kekayaan nasional memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai penggerak berbagai proyek strategis berdampak tinggi, Danantara Indonesia diarahkan untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Melalui investasi yang produktif dan berorientasi jangka panjang, proyek-proyek tersebut diharapkan dapat memperluas lapangan kerja berkualitas, meningkatkan daya saing nasional, serta menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan.

Kehadiran Danantara Indonesia menjadi tonggak penting menuju kemandirian ekonomi, penguatan ketahanan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Presiden menekankan agar pengelolaan Danantara Indonesia yang dilaksanakan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel demi mendukung terwujudnya visi Indonesia sebagai negara maju, makmur, dan berdaya saing global.




> **Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penerapan *good corporate governance* (GCG) profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas di seluruh jajaran BUMN, sekaligus mendorong pembenahan praktik-praktik yang menghambat efisiensi dan penciptaan nilai.**

# *Town Hall* Danantara Indonesia

BPI Danantara menggelar *Town Hall* bertajuk "Memperkuat Kolaborasi dan Arah Baru BUMN Bersama Danantara Indonesia", di Jakarta Convention Center (JCC) pada 28 April 2025. Forum yang dihadiri sekitar 1.500 peserta ini menegaskan peran BPI Danantara sebagai pengelola strategis BUMN yang profesional dan berdampak, sekaligus penggerak untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Direksi dan Komisaris Utama seluruh BUMN, Dewan Pengawas, Kepala dan Anggota Badan Pelaksana BPI Danantara beserta jajaran.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penerapan *good corporate governance* (GCG), profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas di seluruh jajaran BUMN, sekaligus mendorong penghapusan praktik-praktik yang menghambat efisiensi dan penciptaan nilai. Sejalan dengan hal tersebut, BPI Danantara diberikan mandat untuk mengevaluasi kinerja, integritas, dan kapasitas BUMN agar selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Presiden menegaskan BUMN wajib mengemban amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengelola aset dan sumber daya negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, aset BUMN perlu dikelola secara optimal melalui sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan disiplin, sehingga dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga kepercayaan publik.

*Town Hall* ini sekaligus menjadi forum koordinasi perdana sejak pengalihan seluruh BUMN ke dalam portofolio BPI Danantara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 dan 16 Tahun 2025. Lewat struktur yang lebih ramping, prinsip tata kelola modern, dan semangat profesionalisme, BPI Danantara telah mulai membangun kerangka transformasi BUMN menuju entitas yang kompetitif di tingkat global.

Dalam sambutannya, CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan keberhasilan pelaksanaan mandat ini berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu *Character, Competence,* dan *Commitment*. Ketiga prinsip ini menjadi fondasi bagi seluruh pimpinan BUMN dalam menjalankan peran strategis, dengan mengedepankan profesionalisme, kapabilitas dalam menghadapi tantangan, serta komitmen yang kuat terhadap penerapan tata kelola yang baik. Lebih lanjut, BPI Danantara menjunjung prinsip *zero tolerance* terhadap setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Rosan juga menekankan bahwa:

- *Character* tercermin melalui profesionalisme dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- *Competence* diwujudkan melalui kemampuan untuk memberikan solusi dan menciptakan nilai sesuai bidang tugas masing-masing; dan
- *Commitment* tercermin dalam konsistensi menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, transparansi, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Melalui forum ini, BPI Danantara menegaskan komitmennya sebagai institusi investasi negara yang berpihak pada rakyat, memajukan kemandirian nasional, dan menjawab tantangan global melalui solusi berbasis kolaborasi dan inovasi. *Town Hall* ini menjadi awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia Emas 2045.

## Peristiwa Penting Lainnya

24 Maret 2025




*Meet the Team* — perkenalan jajaran kepemimpinan Danantara Indonesia, pembentukan Dewan Komite, serta keterlibatan tokoh internasional sebagai anggota Dewan Penasihat.

11 April 2025



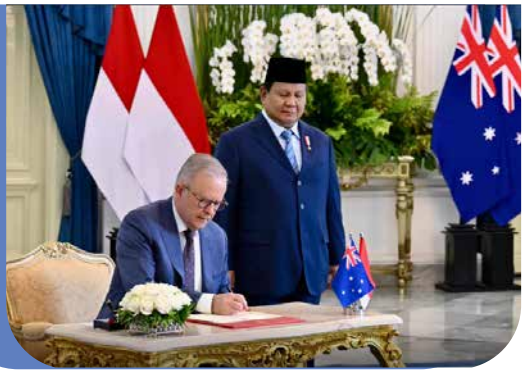

Penandatanganan MoU kolaborasi strategis dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam perencanaan dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

15 April 2025



BPI Danantara dan Qatar Investment Authority (QIA) membentuk dana investasi bersama senilai USD4 miliar untuk pengembangan sektor strategis di Indonesia.

15 Mei 2025



BPI Danantara dan Future Fund Australia memperkuat kerja sama dalam peta investasi global dan pembiayaan proyek strategis.

25 Mei 2025



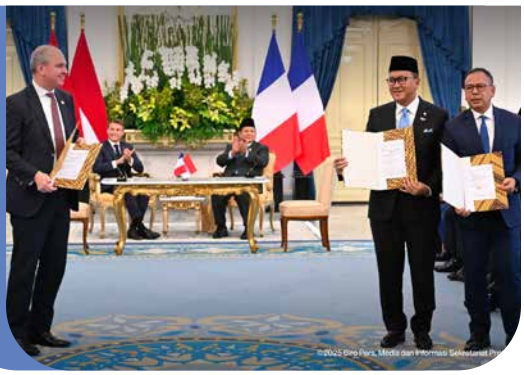
Kolaborasi Indonesia–Tiongkok diperkuat melalui kerja sama BPI Danantara dan China Investment Corporation dalam transfer teknologi, investasi digital, dan pembiayaan lintas negara.

28 Mei 2025



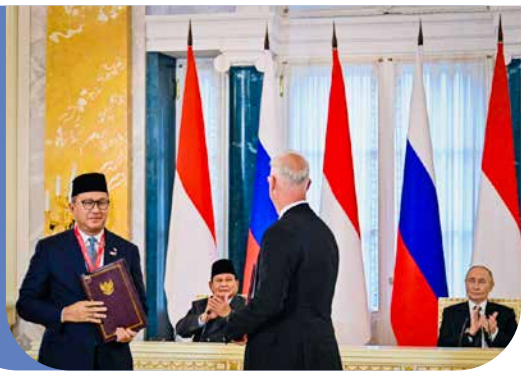
Penandatanganan MoU antara BPI Danantara dan Crédit Agricole CIB untuk mempercepat investasi di sektor energi terbarukan, hilirisasi mineral, infrastruktur digital, dan ketahanan pangan.

28 Mei 2025



BPI Danantara, INA, dan Eramet menandatangani MoU strategis untuk memperkuat rantai pasok nikel Indonesia dan bahan baku baterai kendaraan listrik.

20 Juni 2025



MoU antara BPI Danantara dan Russian Direct Investment Fund untuk pembentukan *joint investment fund* guna memperkuat kerja sama teknologi, perdagangan, dan ekonomi.

29 Juni 2025




Peresmian proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi konsorsium ANTAM–IBC–CBL di Karawang.

1 Juli 2025




Penandatanganan MoU antara BPI Danantara dan ACWA Power senilai USD10 miliar untuk pengembangan energi terbarukan, turbin gas siklus gabungan, hidrogen hijau, dan desalinasi air di Indonesia.

25 Juli 2025




Pertemuan pimpinan Danantara Indonesia dengan para Pemimpin Redaksi media nasional dan internasional.

10 Juli 2025



BPI Danantara menjalin kemitraan strategis dengan Japan Bank for International Cooperation untuk mendukung transisi energi, ekonomi sirkular, dan digitalisasi berkelanjutan.

13 Agustus 2025



Presiden Republik Indonesia menugaskan CEO Danantara Indonesia untuk mengawal rencana Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah di Makkah.

27 Agustus 2025



MoU antara BPI Danantara dan GEM Limited China untuk memperkuat jaringan global DIM ke rantai pasok baterai kelas dunia.

30 September 2025



Rapat Koordinasi Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai langkah strategis penanganan sampah berbasis energi terbarukan.

17 Oktober 2025



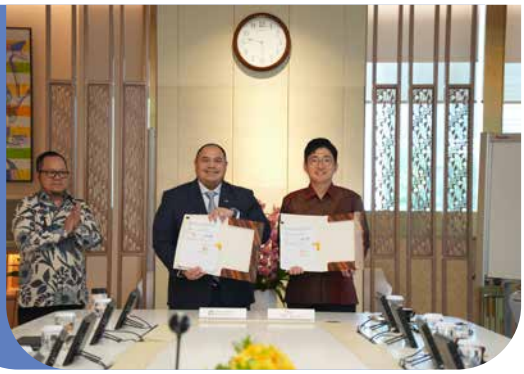
Pendirian Danantara Indonesia Trust sebagai unit filantropi Danantara Indonesia.

16 Oktober 2025 &
10 Desember 2025



Penerbitan Patriot Bonds di tahun 2025 melalui *private placement* masing-masing senilai Rp50 triliun dan Rp11,38 triliun.

1 November 2025



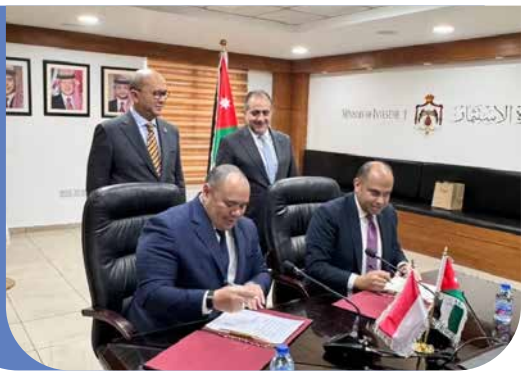
Penandatanganan MoU antara DIM, dengan SK Plasma Co., Ltd. dan PT SKPlasma Core Indonesia untuk pembangunan fasilitas produksi obat di Karawang.

13 November 2025



COO Danantara Indonesia menegaskan transformasi Garuda Indonesia sebagai fondasi layanan unggul dan kebanggaan nasional.

10 Desember 2025



MoU antara DIM dan Jordan Capital & Investment Capital (JCIC) terkait kerja sama investasi dan kemitraan strategis dengan Jordan Investment Fund.

14 Desember 2025




DIM menandatangani *Integrated Framework Agreement* dengan Thakher Development Company terkait akuisisi aset perhotelan dan real estat di kawasan Thakher City, Makkah.

15 Desember 2025



Peluncuran Kampanye Melayani Sepenuh Hati oleh DAM sebagai komitmen transformasi layanan bangsa.

19 Desember 2025



Danantara Indonesia dan BP BUMN mengerahkan lebih dari 1.000 relawan dan 109 truk bantuan kemanusiaan untuk penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera.

23 Desember 2025




DIM bersama PLN menjajaki kolaborasi strategis untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia.

# Analisis Ekonomi dan Pasar



Di tengah perubahan dinamika ekonomi global, kebutuhan akan perekonomian Indonesia yang lebih berbasis investasi kian nyata. Dalam konteks tersebut, Danantara Indonesia didirikan untuk mengoptimalkan aset negara demi membangun Indonesia yang lebih kuat dan tangguh.

Danantara Indonesia



02



# Tinjauan Makroekonomi 2025

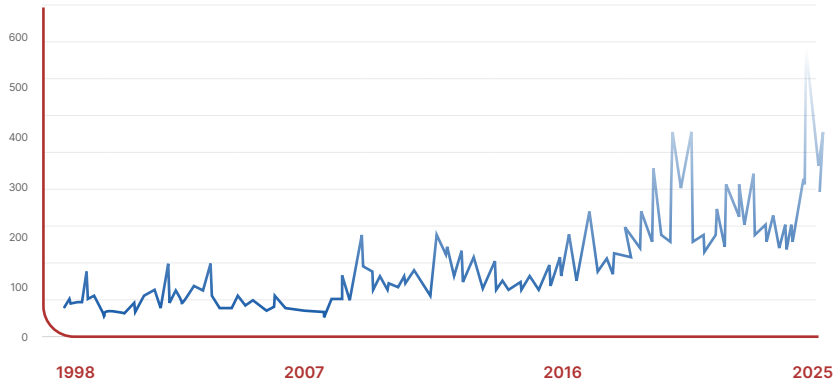
**Danantara Indonesia didirikan di tengah pergeseran besar dalam lanskap ekonomi global. Ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan yang semakin lebar seiring transformasi teknologi yang terus berubah, telah mengubah arus perdagangan dan investasi di seluruh dunia.**

Bagi Indonesia, pergeseran ini menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kapasitas investasi, dan memastikan posisi strategis dalam rantai nilai global yang terus berkembang. Tinjauan berikut menguraikan kondisi yang menggambarkan tahun pertama Danantara Indonesia, yakni tantangan, peluang, dan fondasi dari mandat yang diembannya.

Kondisi ekonomi global di tahun 2025 ditandai oleh perkembangan yang dinamis dan ketidakpastian yang relatif tinggi (*Exhibit* 1). PDB global tumbuh sebesar 3,4% (*year-on-year*), dengan tingkat inflasi yang moderat di negara-negara utama. Kinerja ini terbilang stabil meski berhadapan dengan sejumlah perubahan kebijakan dan lanskap perdagangan internasional.

Salah satu perkembangan utama adalah kenaikan tarif resiprokal Amerika Serikat ke angka tertinggi dalam satu abad terakhir. Kebijakan ini memicu respons dari sejumlah negara, termasuk Tiongkok, yang kemudian membatasi ekspor tanah jarang sehingga berpotensi memperlebar fragmentasi perdagangan global. Meski demikian, kekhawatiran atas tarif justru mendorong produksi industri global dalam jangka pendek di mana berbagai negara menyegerakan ekspor sebelum tarif mulai diberlakukan.

***Exhibit* 1: Ketidakpastian kebijakan ekonomi global meningkat signifikan pada tahun 2025, dengan tarif AS sebagai pemicu utama**




**145%**

PDB dalam negeri tumbuh 5,11% (*year-on-year*), naik dari 5,03% tahun sebelumnya. Hal ini didorong di antaranya oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.

Sumber: Economic Policy Uncertainty Index

Sementara itu, konsumsi domestik Tiongkok, sebagai salah satu motor utama pertumbuhan global, tetap berada di bawah ekspektasi. Setelah lebih dari empat tahun mengalami koreksi, pasar properti Tiongkok masih belum menunjukkan pemulihan. Hal ini turut memengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga, menahan pertumbuhan kredit, dan mendorong terjadinya deflasi. Meskipun PDB Tiongkok masih mampu mencatat pertumbuhan kuat 5,0% di 2025, angka ini sebagian besar bersumber dari ekspor bersih, dengan dampak positif yang tidak terlalu dirasakan di banyak negara lain.

Sejumlah isu struktural turut membebani kinerja global, mulai dari ketegangan geopolitik dan peningkatan pengeluaran pertahanan, hingga meningkatnya *sovereign debt* di Amerika Serikat dan sejumlah negara maju.

Investasi teknologi, khususnya dalam *Artificial Intelligence* (AI), cukup menjadi angin segar, khususnya di Amerika Utara dan Asia Timur. Optimisme terhadap prospek AI tidak saja mendorong ekuitas global, namun juga permintaan komoditas dunia. Karena adanya ketegangan geopolitik, harga-harga komoditas tersebut beranjak menguat menjelang 2026; hal ini turut berdampak, baik secara positif maupun negatif, pada inflasi, pendapatan ekspor, dan neraca fiskal di seluruh dunia.

Di sisi domestik, perekonomian Indonesia menjalani periode konsolidasi seiring transisi pemerintahan baru. Dari sisi fiskal, pemerintah melakukan penyesuaian prioritas belanja untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3%. Dari sisi moneter, pengetatan likuiditas yang telah terjadi sebelumnya, serta jeda transmisi perubahan kebijakan Bank Indonesia (BI), memengaruhi kondisi likuiditas dan laju pertumbuhan kredit yakni di bawah tingkat pertumbuhan dua digit yang tercatat pada awal 2024.

Namun demikian, Indonesia masih mencatat kinerja ekonomi solid di 2025. Inflasi tetap stabil dan berada dalam rentang target BI pada 2,9% (*year-on-year*). Neraca transaksi berjalan hanya mencatat defisit sebesar 0,1% dari PDB, didukung oleh surplus perdagangan yang berkelanjutan. PDB tumbuh 5,11% (*year-on-year*), naik dari 5,03% tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi—yang masing-masing tumbuh 5,0% dan 5,1% (*year-on-year*) serta mampu mengimbangi perlambatan konsumsi pemerintah (*Exhibit* 2).

Dari perspektif pasar saham, IDX Composite menghasilkan kinerja kuat di 2025, ditutup pada level 8.646,9 pada 30 Desember 2025, dengan peningkatan per tahun 22,13%, lebih kuat dibandingkan penurunan sebesar 3% yang tercatat di 2024 dan menandai *return* tahunan terkuat dalam lebih dari satu dekade. Namun, bukan berarti tahun 2025 tidak mengalami turbulensi sama sekali. Hal ini dapat dilihat dari indeks yang mengalami *sell-off* tajam di paruh pertama akibat kekhawatiran global dan domestik yang terjadi serentak.

Pasar mengalami pemulihan kuat di paruh kedua, seiring meredanya kekhawatiran atas tarif Amerika Serikat dan meningkatnya sentimen domestik. IDX Composite mencapai rekor tertinggi baru sekitar 8.710,7 pada 8 Desember 2025, dan mencatat 24 rekor tertinggi sepanjang tahun. Namun, terlepas dari kenaikan tersebut, sebagian besar lonjakan yang menggerakkan JCI (Jakarta Composite Index/IHSG) didorong oleh saham-saham yang dikategorikan sebagai "*momentum stocks*", yang menjadi salah satu perhatian di kalangan pengamat pasar global.

Dalam situasi ini, saham-saham BUMN berhasil menunjukkan kinerja solid, dengan indeks IDXBUMN20 naik sekitar 7,5% di 2025. Dalam beberapa kasus, kenaikan tersebut mencerminkan respons pasar yang positif terhadap proses restrukturisasi yang sedang berlangsung di bawah naungan Danantara Indonesia. Krakatau Steel (KRAS) naik 239%, Timah (TINS) naik 191%, dan Garuda Indonesia (GIAA) naik 78%, sementara BUMN dengan kapitalisasi pasar besar seperti Telkom Indonesia (TLKM) juga naik 28%.

Latar belakang makroekonomi ini memberikan konteks tujuan institusional yang ingin dicapai Danantara Indonesia, sesuai dengan maksud pendiriannya.

***Exhibit* 2: Indonesia mempertahankan kinerja makroekonomi yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global**

| Indikator Makroekonomi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| **Produk Domestik Bruto (% YoY)** | **5,0%** | **5,1%** |
| Konsumsi Rumah Tangga | 4,9% | 5,0% |
| Konsumsi Pemerintah | 6,8% | 2,5% |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 4,6% | 5,1% |
| Ekspor Barang dan Jasa | 6,9% | 7,0% |
| Impor Barang dan Jasa | 8,2% | 4,8% |
| **Indeks Harga Konsumen (% YoY)** | **1,6%** | **2,9%** |
| **Defisit Transaksi Berjalan (% PDB)** | **-0,6%** | **-0,1%** |
| **Defisit Anggaran (% PDB)** | **2,3%** | **2,9%** |

Sumber: BPS, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia




# Peran Danantara Indonesia dalam Masa Depan Ekonomi Indonesia

Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah mencatatkan kinerja makroekonomi yang kuat dan konsisten. Pertumbuhan PDB sekitar 5% disertai tren inflasi yang terus melambat. Namun, Indonesia juga sedang mendekati akhir pertumbuhan demografisnya, yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada peringatan seratus tahun kemerdekaan di tahun 2045.

Karena itu, pola bisnis seperti biasa yang pada masa lalu masih memadai, kini berpotensi tidak lagi cukup apabila Indonesia ingin mencapai tingkat PDB per kapita yang tinggi ("*get rich*") sebelum bonus demografinya berakhir ("*get old*"). Untuk mewujudkannya, Indonesia perlu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang secara historis jarang dapat dipertahankan tanpa dukungan siklus kenaikan harga komoditas. Pencapaian tersebut menuntut transformasi model pertumbuhan nasional yang selama ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor komoditas mentah, menuju ekonomi yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi, produktivitas yang lebih kuat, dan daya saing yang berkelanjutan.

Di sinilah Danantara Indonesia mengambil perannya. Danantara Indonesia menjadi salah satu penggerak paradigma pertumbuhan baru yang menempatkan investasi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Mandat yang diemban tidak hanya untuk meningkatkan kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan investasi nasional, tetapi juga untuk memobilisasi partisipasi modal swasta, baik domestik maupun internasional, yang secara historis menjadi sumber terbesar investasi di Indonesia.

Danantara Indonesia merupakan bagian dari upaya nasional yang melibatkan berbagai sektor, mempertemukan institusi pemerintah, pelaku usaha, dan investor internasional dalam agenda bersama untuk mendorong fase pertumbuhan ekonomi Indonesia berikutnya. Dalam ekosistem tersebut, Danantara Indonesia menjalankan peran strategis sebagai jembatan antara prioritas pembangunan nasional dan prinsip-prinsip komersial, sekaligus mengoptimalkan kekuatan aset negara menjadi sumber modal jangka panjang yang mendukung terciptanya perekonomian yang lebih tangguh, produktif, dan bernilai tambah tinggi.

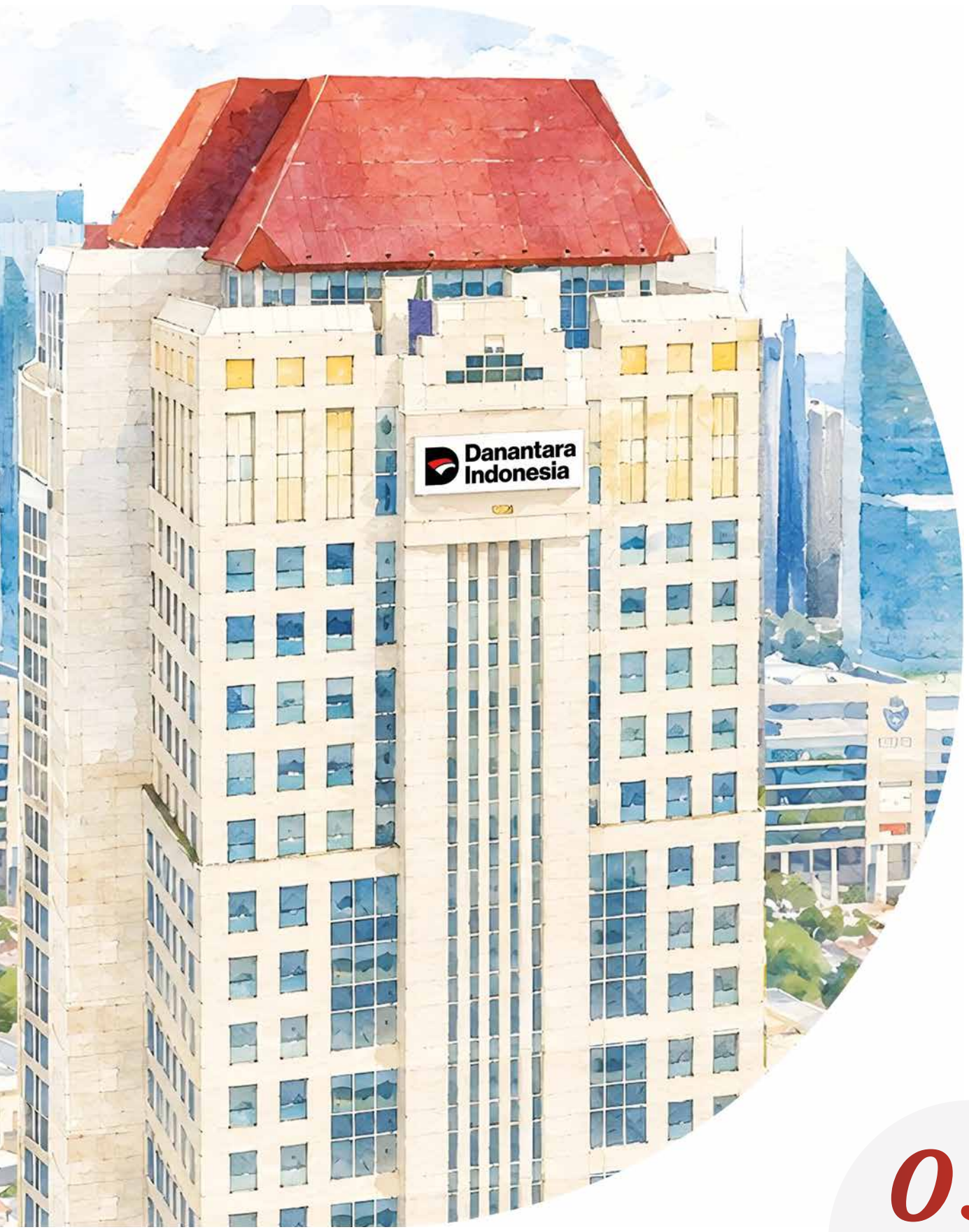
Inilah fondasi yang menjadi titik awal perjalanan Danantara Indonesia. Di tengah berbagai tantangan yang mewarnai tahun 2025, Danantara Indonesia membangun ketangguhan untuk masa depan, menciptakan nilai jangka panjang yang akan menjadi warisan bagi generasi Indonesia yang akan datang.

# Pencapaian



Setiap langkah sepanjang tahun 2025 adalah bagian dari upaya membangun fondasi kelembagaan dan kinerja yang kokoh di masa depan. Kemajuan ini menyiapkan Danantara Indonesia untuk terus menjalankan mandatnya dan melangkah lebih jauh dalam menciptakan nilai bagi Indonesia.

Danantara Indonesia




# 03




# Membangun Fondasi Organisasi

**Pada tahun pertama pembentukannya, Danantara Indonesia fokus membangun fondasi organisasi dan tata kelola sebagai dasar pelaksanaan mandatnya. Upaya ini mencakup penetapan struktur kelembagaan, pemenuhan sumber daya manusia profesional, serta penguatan kebijakan, organ pendukung, manajemen risiko, dan audit internal. Fondasi tersebut diperlukan untuk mendukung kapasitas operasional ekosistem Danantara Indonesia secara keseluruhan dan memastikan proses pengambilan keputusan berjalan lebih terstruktur, disiplin, dan akuntabel.**

**Melalui langkah-langkah tersebut, Danantara Indonesia membangun kerangka kelembagaan awal yang mendukung pelaksanaan mandat strategis negara serta pengelolaan investasi jangka panjang secara profesional dan berkelanjutan.**

# Tata Kelola

Pada tahun pertama operasional, Danantara Indonesia memprioritaskan pembangunan fondasi kelembagaan yang kuat sebagai dasar bagi pengelolaan investasi jangka panjang.

Beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain:

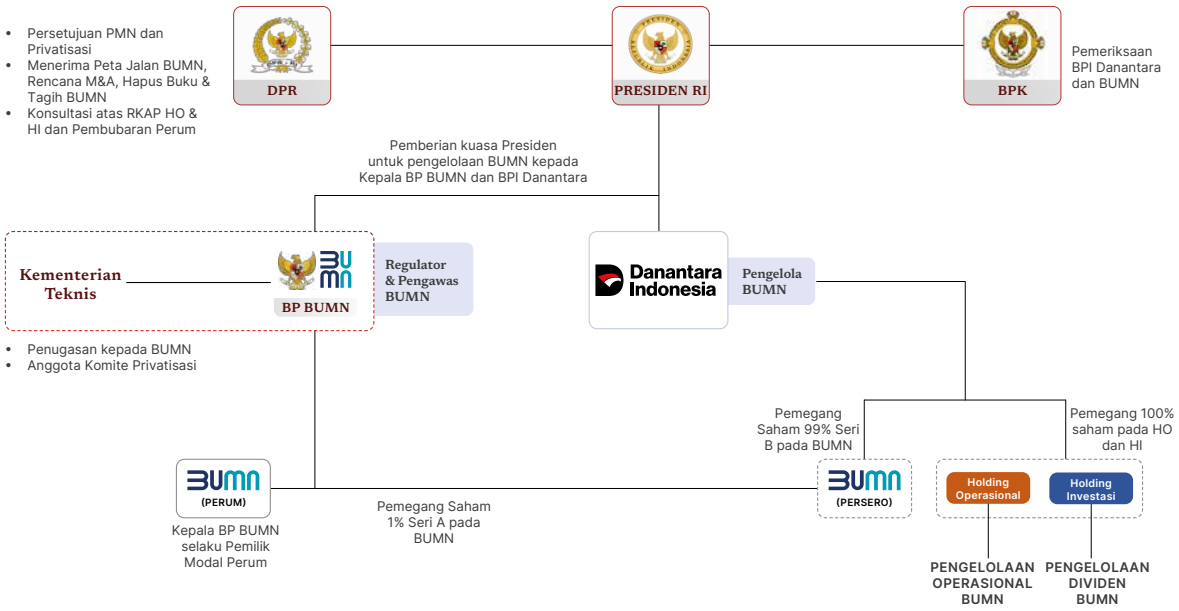
- Penyusunan kebijakan tata kelola yang selaras dengan peraturan perundang-undangan
- Pembentukan struktur organisasi yang mendukung fungsi *asset management* dan *investment management*
- Pembentukan organ komite di bawah Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana
- Penguatan sistem manajemen risiko dan kepatuhan
- Penyusunan kerangka kerja investasi yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional
- Pemenuhan sumber daya manusia profesional dan fungsi-fungsi kunci organisasi

## Kerangka Tata Kelola

BPI Danantara dan seluruh entitasnya beroperasi dalam suatu kerangka tata kelola terintegrasi yang mengacu pada praktik terbaik internasional. Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, kerangka ini membagi peran yang jelas antara lembaga pengawas, pengelola, dan regulator untuk memastikan seluruh keputusan selaras dengan tujuan strategis nasional.

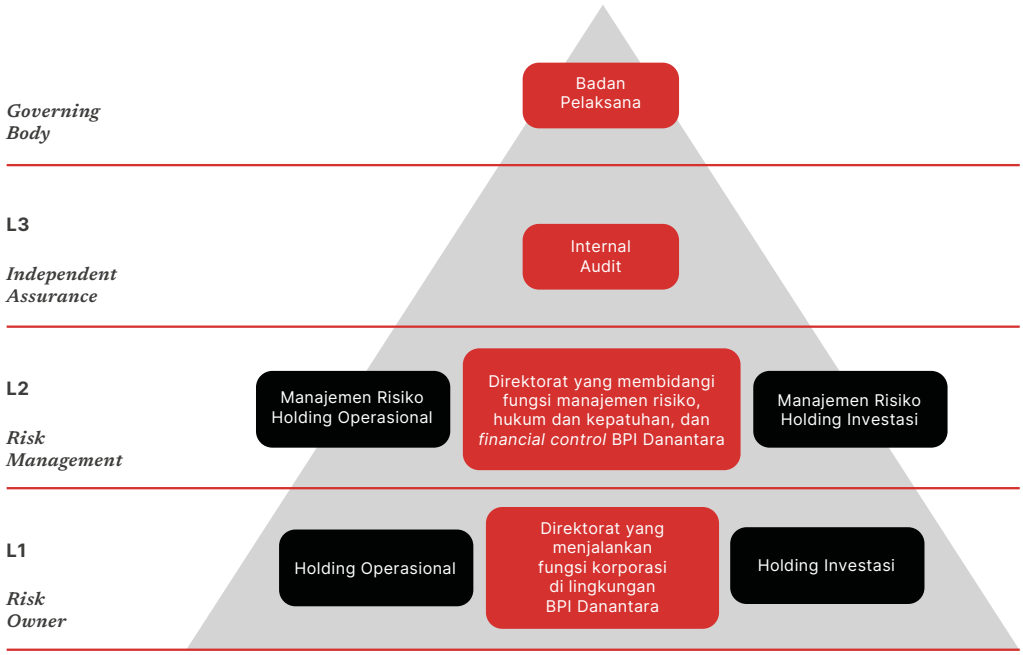
Melalui kerangka ini, BPI Danantara diawasi secara ketat melalui mekanisme pelaporan langsung kepada Presiden dan diawasi oleh Dewan Pengawas yang beranggotakan para Menteri dari berbagai kementerian koordinator dan kementerian teknis. Selain itu, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPI Danantara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara konsultasi atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Holding Operasional dan Holding Investasi, persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan privatisasi, serta penerimaan peta jalan BUMN dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BPI Danantara juga berkoordinasi secara aktif dengan BP BUMN sebagai regulator dan kementerian teknis lainnya, untuk memastikan bahwa kebijakan tata kelola BUMN selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

**Pengelolaan BUMN menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025**



## Model Tata Kelola Tiga Lini

Struktur tata kelola Danantara Indonesia mengadopsi pendekatan model tiga lini ("*three lines model*") untuk memperjelas akuntabilitas serta mempertegas peran dan tanggung jawab setiap fungsi, sehingga pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan aktivitas *assurance* dapat berjalan secara efektif.




Peran masing-masing fungsi dalam struktur tata kelola risiko:

**Badan Pelaksana**

Badan Pelaksana berwenang menetapkan landasan fundamental pengelolaan investasi dan operasional Danantara Indonesia. Hal ini mencakup penetapan selera risiko BPI Danantara secara keseluruhan, kerangka alokasi modal strategis, serta batasan eksposur risiko portofolio. Badan Pelaksana juga berwenang menetapkan tingkat imbal hasil (*hurdle rate*) dan tolok ukur investasi sebagai acuan kelayakan setiap keputusan investasi, evaluasi portofolio dan manajemen risiko, serta menyetujui struktur tata kelola institusi.

Dalam tugasnya terkait manajemen risiko, Badan Pelaksana didukung oleh komite pendukung yang terdiri dari Komite Investasi, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Operasional Portofolio sebagaimana dijelaskan dalam bab "Pencapaian Danantara Indonesia" sub bab "Pembentukan dan Laporan Komite BPI Danantara". Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga dapat dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dan Peraturan BPI Danantara di mana komite tersebut memiliki peran untuk menyediakan tata kelola risiko secara menyeluruh.

**Lini pertama**

Lini pertama merupakan fungsi yang menjalankan kegiatan operasional dan investasi secara langsung, sehingga bertanggung jawab atas pengelolaan risiko yang melekat pada aktivitas operasionalnya, mulai dari identifikasi, penilaian hingga mitigasi risiko. Lini pertama terdiri dari Holding Operasional, Holding Investasi, serta direktorat yang menjalankan fungsi manajemen korporasi di lingkungan BPI Danantara.

**Lini kedua**

Lini kedua terdiri dari unit kerja yang membidangi fungsi-fungsi manajemen risiko (baik di dalam BPI Danantara, Holding Operasional dan Holding Investasi), hukum, kepatuhan, dan keuangan pada BPI Danantara. Lini kedua melakukan pengawasan dan pemantauan atas penerapan manajemen risiko, kepatuhan, dan tata kelola, sekaligus mengembangkan kerangka kerja dan kebijakan serta memberikan dukungan keahlian kepada lini pertama.

**Lini ketiga**

Sebagai Lini Ketiga, Direktorat Internal Audit memberikan keyakinan yang independen dan objektif atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal Badan. Hasil evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan kepada manajemen dan organ pengurus mendukung penguatan tata kelola serta mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

## Pedoman Kode Etik(*Code of Ethics*)

BPI Danantara menerapkan Kode Etik sebagai pedoman perilaku bagi seluruh insan organisasi dalam menjalankan tugas, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Kode Etik BPI Danantara mengacu pada Pedoman Kode Etik (*Code of Ethics*) yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana pada 22 Desember 2025. Kode Etik tersebut memuat prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang mencerminkan nilai integritas, akuntabilitas, kehati-hatian, objektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku.

Kode Etik berlaku bagi seluruh insan BPI Danantara, termasuk Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, pegawai, serta pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPI Danantara sesuai dengan cakupan ketentuan yang berlaku. Penerapannya diarahkan untuk membangun budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, wajar, etis, dan dapat dipercaya dalam setiap aktivitas kelembagaan.

Melalui penerapan Kode Etik secara konsisten dan berkelanjutan, BPI Danantara memperkuat fondasi integritas organisasi, mencegah perilaku yang menyimpang, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung pelaksanaan mandat strategis negara secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi Indonesia.

## Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)

BPI Danantara memiliki Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* sebagai panduan bagi seluruh insan organisasi dalam menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Pedoman ini menjadi bagian penting dari komitmen BPI Danantara untuk membangun budaya kerja yang etis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang organisasi serta para pemangku kepentingan.

Pedoman Perilaku tersebut mengatur prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, termasuk:

- Integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum;
- Pencegahan benturan kepentingan;
- Larangan terhadap *fraud*, korupsi, gratifikasi, suap, pencucian uang, dan pendanaan terorisme;
- Perlindungan aset, informasi, dan kekayaan intelektual organisasi;
- Penyusunan pelaporan yang akurat, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Komunikasi publik yang bertanggung jawab dan menjaga reputasi organisasi;
- Hubungan yang etis dengan pegawai, mitra kerja, investor, pemerintah, masyarakat, media, serta pemangku kepentingan lainnya; dan
- Pedoman ini juga menekankan pentingnya lingkungan kerja yang aman, sehat, inklusif, dan bebas dari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai organisasi.



Seluruh insan BPI Danantara diharapkan menerapkan standar perilaku yang konsisten dalam setiap aktivitas, baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pekerjaan, maupun interaksi dengan pihak internal dan eksternal. Setiap insan juga wajib memiliki salinan Pedoman Perilaku serta menandatangani Pakta Integritas pada saat mulai bekerja sebagai bagian dari proses *onboarding* dan setiap tahun sebagai bentuk kesungguhan mematuhi Pedoman Perilaku.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, BPI Danantara juga menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran serta proses penanganan yang bertujuan untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tepat, objektif, dan bertanggung jawab. Dengan penerapan Pedoman Perilaku ini, BPI Danantara memperkuat fondasi budaya kepatuhan, integritas, dan akuntabilitas yang sejalan dengan praktik lembaga investasi dan organisasi bereputasi global.



## Pembentukan dan Laporan Komite BPI Danantara

Pada tahun 2025, sebagai pelaksanaan amanat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara telah membentuk organ komite Badan Pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Komite Investasi**
   Tugas dan kewenangan Komite Investasi sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Investasi yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 15 Tahun 2025, yaitu:
   a. Tugas Komite Investasi
      Komite Investasi bertugas untuk:
      1) memberikan rekomendasi kepada Badan Pelaksana terkait pelaksanaan investasi BPI Danantara, yang antara lain meliputi:
         a) penyusunan strategi dan rencana investasi;
         b) penetapan parameter risiko investasi;
         c) pelaksanaan investasi;
         d) evaluasi dan pemantauan kinerja portofolio investasi; dan/atau
         e) perolehan pinjaman, pemberian pinjaman, dan pemberian penjaminan;
      2) memberikan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dalam rangka mendukung pengambilan keputusan:
         a) selaku RUPS Holding Investasi atau Holding Operasional; atau
         b) selaku RUPS atau pemegang saham seri B pada BUMN;
         terkait dengan pelaksanaan investasi di luar RKAP;
      3) memberikan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dalam rangka mendukung pengambilan keputusan:
         a) selaku RUPS Holding Investasi atau Holding Operasional; atau
         b) selaku RUPS atau pemegang saham seri B pada BUMN;
         terkait dengan pelaksanaan investasi sesuai RKAP yang dilakukan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional atau BUMN sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar;

4) memberikan saran dalam rangka pelaksanaan *monitoring* atas rencana investasi yang dilakukan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional atau BUMN, baik terhadap investasi yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun yang ditetapkan di luar RKAP, apabila diperlukan; dan/atau
5) hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Investasi sesuai permintaan Badan Pelaksana.

b. Wewenang Komite Investasi
Dalam rangka menjalankan tugasnya, Komite Investasi berwenang:
1) memperoleh data dan/atau informasi yang dibutuhkan; dan/atau
2) mengundang narasumber atau ahli (yang dapat berasal dari pihak eksternal BPI Danantara) untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Investasi.

**Komposisi Komite Investasi:**
a. Rosan Perkasa Roeslani sebagai ketua merangkap anggota
b. Pandu Patria Sjahrir sebagai anggota
c. Robertus Billitea sebagai anggota
d. Sony Harsono sebagai anggota

**2. Komite Manajemen Risiko**
Tugas dan kewenangan Komite Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 16 Tahun 2025, yaitu:
a. Tugas Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Badan Pelaksana terkait pengelolaan manajemen risiko BPI Danantara, yang meliputi:
1) penetapan profil risiko, yang antara lain mencakup risiko operasional, risiko investasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi;
2) penetapan *risk appetite statement*, yang antara lain mencakup risiko operasional, risiko investasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi;
3) penetapan *framework* manajemen risiko;
4) pelaksanaan reviu atas kebijakan manajemen risiko;
5) pelaksanaan reviu atas implementasi manajemen risiko;
6) pelaksanaan reviu risiko atas implementasi investasi (termasuk pelaksanaan *cut loss* dan/atau *total loss*) atau atas operasional portofolio BPI Danantara;
7) pelaksanaan reviu risiko atas:
a) rencana aktivitas Holding Investasi atau Holding Operasional yang memerlukan persetujuan BPI Danantara selaku RUPS; atau
b) rencana aktivitas BUMN yang memerlukan persetujuan BPI Danantara selaku RUPS atau pemegang saham seri B; dan/atau
8) hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko sesuai permintaan Badan Pelaksana.

b. Wewenang Komite Manajemen Risiko
Dalam rangka menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Risiko berwenang:
1) memperoleh data dan/atau informasi yang dibutuhkan; dan/atau
2) mengundang narasumber atau ahli (yang dapat berasal dari pihak eksternal BPI Danantara) untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.

**Komposisi Komite Manajemen Risiko:**
a. Rosan Perkasa Roeslani sebagai ketua merangkap anggota
b. Lieng-Seng Wee sebagai anggota
c. John Prasetio sebagai anggota

**3. Komite Operasional Portofolio**
Tugas dan kewenangan Komite Operasional Portofolio sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Operasional Portofolio yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 17 Tahun 2025, yaitu:
a. Tugas Komite Operasional Portofolio
Komite Operasional Portofolio bertugas untuk:
1) memberikan rekomendasi kepada Badan Pelaksana terkait pelaksanaan pengelolaan operasional portofolio BPI Danantara, yang antara lain meliputi:
a) pelaksanaan penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada Holding Investasi dan/atau Holding Operasional yang bersumber dari pengelolaan dividen; dan/atau
b) pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan aset BPI Danantara;

2) memberikan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dalam rangka mendukung pengambilan keputusan:
   a) selaku RUPS Holding Investasi atau Holding Operasional; atau
   b) selaku RUPS atau pemegang saham seri B pada BUMN;
   antara lain terkait dengan:
      a) pembayaran dividen kepada BPI Danantara;
      b) pelaksanaan Penugasan Khusus;
      c) perolehan pinjaman, pemberian pinjaman, dan pemberian agunan atau penjaminan;
      d) pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih aset Holding Investasi atau Holding Operasional atau BUMN;
      e) pelaksanaan reviu atas implementasi investasi (termasuk pelaksanaan *cut loss* dan/atau *total loss*) atau operasional portofolio Holding Investasi atau Holding Operasional atau BUMN;
      f) pendirian BUMN;
      g) pelaksanaan restrukturisasi BUMN; dan/atau
      h) pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan BUMN;
3) memberikan saran dalam rangka pelaksanaan *monitoring* pengelolaan operasional portofolio Holding Investasi atau Holding Operasional atau BUMN, apabila diperlukan; dan/atau
4) hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Operasional Portofolio sesuai dengan permintaan Badan Pelaksana.

b. Wewenang Komite Operasional Portofolio
   Dalam rangka menjalankan tugasnya, Komite Operasional Portofolio berwenang:
   1) memperoleh data dan/atau informasi yang dibutuhkan; dan/atau
   2) mengundang narasumber atau ahli (yang dapat berasal dari pihak eksternal BPI Danantara) untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Operasional Portofolio.

**Komposisi Komite Operasional Portofolio:**

a. Dony Oskaria sebagai ketua merangkap anggota
b. Rosan Perkasa Roeslani sebagai anggota
c. Robertus Billitea sebagai anggota
d. Arief Budiman sebagai anggota

Sejak pembentukan komite sampai dengan 31 Desember 2025, telah diselenggarakan rapat komite dengan rincian sebagai berikut:

1. Komite Investasi: 1 (satu) kali rapat komite, yang merupakan rapat komite gabungan dengan Komite Manajemen Risiko;
2. Komite Manajemen Risiko: 6 (enam) kali rapat komite, yang terdiri dari 2 (dua) kali rapat Komite Manajemen Risiko, 1 (satu) kali rapat komite gabungan dengan Komite Investasi, dan 3 (tiga) kali rapat komite gabungan dengan Komite Operasional Portofolio; dan
3. Komite Operasional Portofolio: 3 (tiga) kali rapat komite, yang seluruhnya merupakan rapat komite gabungan dengan Komite Manajemen Risiko.

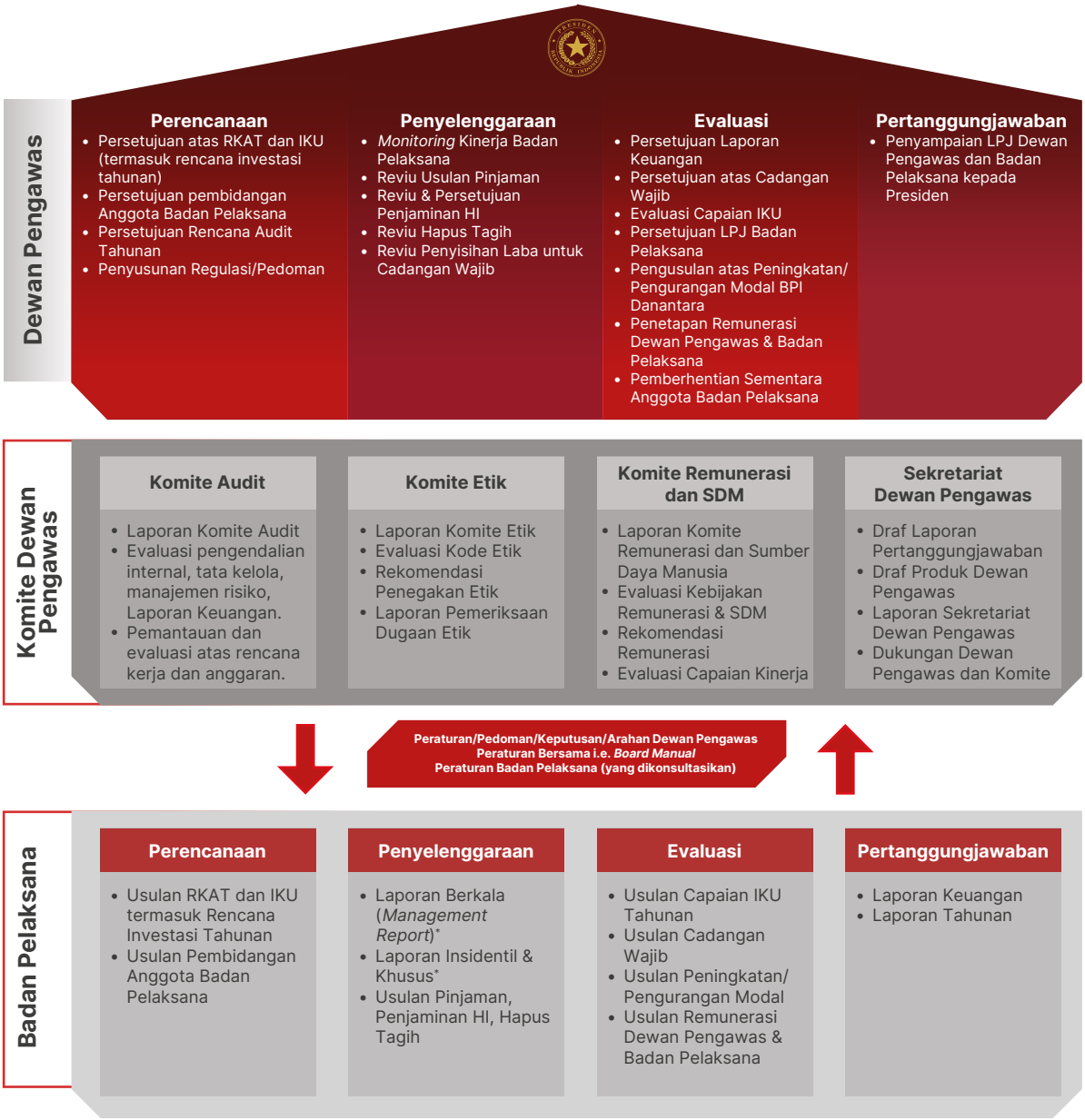
**Frekuensi Rapat**

Sepanjang tahun 2025, Badan Pelaksana BPI Danantara menyelenggarakan 26 kali rapat yang membahas perkembangan BPI Danantara, Holding Investasi dan Holding Operasional. Frekuensi rapat tersebut mencerminkan intensitas koordinasi pada tahun pertama operasional, khususnya dalam membangun fondasi kelembagaan, memastikan keselarasan lintas entitas, dan mengawal eksekusi program prioritas.

Sementara itu, Dewan Pengawas menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat sepanjang tahun 2025, termasuk rapat gabungan dengan Badan Pelaksana.

## Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan secara sinergis dan kolaboratif, khususnya antara Komite, Sekretariat Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Pengawasan berfokus pada 4 (empat) siklus utama kelembagaan: (1) perencanaan, (2) penyelenggaraan, (3) evaluasi, dan (4) pertanggungjawaban. Kerangka ini memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga pelaporan berjalan terintegrasi dan akuntabel.




* diatur lebih lanjut dalam *Board Manual* yang sedang disusun

Pada tingkat strategis, Dewan Pengawas memegang peran sentral dalam penetapan arah kebijakan BPI Danantara melalui persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di dalamnya juga memuat rencana investasi tahunan dan peningkatan/pengurangan modal BPI Danantara, persetujuan atas usulan pembidangan Anggota Badan Pelaksana, serta penyusunan regulasi/ pedoman internal.

Dewan Pengawas juga menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan operasional BPI Danantara melalui *monitoring* kinerja serta reviu dan/atau persetujuan atas usulan pinjaman, penjaminan Holding Investasi, hapus tagih, dan penyisihan laba untuk cadangan wajib. Selanjutnya, Dewan Pengawas melakukan evaluasi atas laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban, dan realisasi IKU BPI Danantara serta menetapkan remunerasi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana sebagai bagian dari persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban, Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Pengawas didukung oleh komite-komite dan Sekretariat Dewan Pengawas yang menyampaikan laporan, reviu, dan rekomendasi tematik yang mencakup aspek audit, etik, kepatuhan, kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM), remunerasi, serta penyusunan dokumen-dokumen pengawasan. Peran komite dan Sekretariat Dewan Pengawas menjadi penguat bagi objektivitas, kualitas analisis, dan kedalaman pengawasan Dewan Pengawas.

Sementara itu, Badan Pelaksana bertanggung jawab untuk menyusun dan mengusulkan RKAT dan IKU, melaksanakan program dan kegiatan operasional, mengelola keuangan dan risiko, serta menyampaikan laporan kinerja dan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas. Fungsi operasional ini dijalankan dalam satu kesatuan alur kerja yang selaras dengan pedoman dan keputusan Dewan Pengawas serta regulasi internal organisasi.

Keseluruhan interaksi dan mekanisme tersebut beroperasi dalam kerangka Peraturan/Pedoman/Keputusan Dewan Pengawas, termasuk Piagam Tata Kelola antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dan pedoman pelaksanaan lainnya yang disusun secara konsultatif dengan Badan Pelaksana. Dengan demikian, alur tata kelola dalam diagram tersebut mencerminkan prinsip koordinasi, *checks and balances*, serta kesinambungan siklus manajemen kinerja yang menjadi fondasi bagi penyelenggaraan BPI Danantara yang efektif, akuntabel, dan profesional.

## Pembentukan dan Laporan Komite Dewan Pengawas

Pembentukan Komite Audit, Komite Etik, serta Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia (RSDM) dilaksanakan berdasarkan kewenangan Dewan Pengawas sebagaimana tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Dijelaskan di bawah ini merupakan gambaran umum pelaksanaan tugas dan kewenangan, serta aktivitas masing–masing komite Dewan Pengawas yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025.

### 1. Komite Audit

**Tugas Komite Audit**

Komite Audit bertugas membantu untuk memberikan masukan kepada Dewan Pengawas dalam melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, tata kelola, pelaksanaan manajemen risiko, serta keandalan informasi dan audit laporan keuangan. Komite Audit juga bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. Dalam pelaksanaan tugasnya pada tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat dan koordinasi, baik dengan pihak internal BPI Danantara maupun pihak eksternal.

**Komposisi Komite Audit**

a. Hadiyati Munawaroh sebagai ketua merangkap anggota
b. Erick Thohir sebagai anggota
c. Muliaman D. Hadad sebagai anggota
d. Prasetyo Hadi sebagai anggota
e. Agus Harimurti Yudhoyono sebagai anggota
f. Zulkifli Hasan sebagai anggota
g. Ancella Anitawati Hermawan sebagai anggota
h. Irwan Lubis sebagai anggota



## Hadiyati Munawaroh*

Ketua Komite Audit

Hadiyati Munawaroh merupakan profesional di bidang audit, tata kelola keuangan, dan administrasi publik yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan keuangan negara. Beliau pernah menjabat sebagai Deputi Internal Audit di Badan Pengelola Keuangan Haji (2018–2023) dan Auditor Senior di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (1996–2018). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Deputi Perencanaan, Riset, dan Pengembangan di Badan Pengelola Keuangan Haji (2023–saat ini), dan anggota Komite Audit di Lembaga Penjamin Simpanan (2026-saat ini). Di bidang akademik, beliau mengajar mata kuliah Audit Sektor Publik di Universitas Padjadjaran, Bandung (2018–saat ini), dan menjadi dosen pada Program Doktor Administrasi Publik di Universitas Diponegoro, Semarang (2015-saat ini).

* merupakan anggota independen

## Erick Thohir

Anggota Komite Audit

Informasi mengenai profil anggota telah diungkapkan pada bagian Profil Dewan Pengawas.

## Zulkifli Hasan

Anggota Komite Audit

Informasi mengenai profil anggota telah diungkapkan pada bagian Profil Dewan Pengawas.

## Muliaman D. Hadad

Anggota Komite Audit

Informasi mengenai profil anggota telah diungkapkan pada bagian Profil Dewan Pengawas.

## Prasetyo Hadi

Anggota Komite Audit

Informasi mengenai profil anggota telah diungkapkan pada bagian Profil Dewan Pengawas.

## Agus Harimurti Yudhoyono

Anggota Komite Audit

Informasi mengenai profil anggota telah diungkapkan pada bagian Profil Dewan Pengawas.



## Ancella Anitawati Hermawan*

Anggota Komite Audit

Ancella Anitawati Hermawan adalah akademisi dan profesional bidang akuntansi yang juga menjadi Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) serta Pusat Pengembangan Akuntansi FEB UI. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2014-2022). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen, Ketua Komite Audit, dan Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Prudential Life Assurance Indonesia (2022-saat ini), Komisaris Independen, Ketua Komite Audit, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), (2024-saat ini), Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia (2024-saat ini), dan Staf Pengajar Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1990-saat ini).

* merupakan anggota independen



## Irwan Lubis*

Anggota Komite Audit

Irwan Lubis adalah profesional di bidang keuangan dan pengawasan perbankan. Beliau pernah menjabat sebagai Senior Advisor Strategic Committee, Otoritas Jasa Keuangan (2017-2023), Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III, Otoritas Jasa Keuangan (2013-2017), Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia (2013), Kepala Biro Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia (2010-2013), Pengawas Bank Madya Senior/DPB1, Bank Indonesia (2009-2010), dan Pemimpin Bank Indonesia Batam (2007-2009). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (2023-saat ini).

* merupakan anggota independen

## 2. Komite Etik

**Tugas Komite Etik**

Komite Etik bertugas membantu Dewan Pengawas dengan memberikan rekomendasi penyusunan kode etik, mengawasi dan mengevaluasi penerapan serta kepatuhannya, menangani pelanggaran dan tindak lanjutnya, menilai efektivitas fungsi auditor internal terkait dugaan pelanggaran, serta mengawasi proses hukum atas pelanggaran kode etik. Adapun pelaksanaan tugas utama Komite Etik sepanjang tahun 2025 adalah membangun kerangka dan fondasi nilai dan etika yang akan menjadi dasar etika dan budaya di BPI Danantara. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Etik telah melakukan 3 (tiga) kali rapat dan koordinasi, meliputi agenda utama melakukan pembahasan dan koordinasi dengan perangkat Badan Pelaksana dalam penyusunan Pedoman Kode Etik BPI Danantara.

**Komposisi Komite Etik**

a. Komaruddin Hidayat sebagai ketua merangkap anggota
b. Erick Thohir sebagai anggota
c. Muliaman D. Hadad sebagai anggota
d. Dudung Abdurachman sebagai anggota
e. Yusril Ihza Mahendra sebagai anggota
f. Abdul Muhaimin Iskandar sebagai anggota
g. Mari Elka Pangestu sebagai anggota
h. Yos Johan Utama sebagai anggota



### Komaruddin Hidayat*

Ketua Komite Etik

Komaruddin Hidayat merupakan cendekiawan dan akademisi yang aktif menulis di berbagai media dan terlibat dalam diskusi publik tentang keislaman, kebudayaan, dan demokrasi. Beliau pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (2019–2024) dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah (2006–2015). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pers (2025–saat ini).

* merupakan anggota independen

### Erick Thohir

Anggota Komite Etik

Informasi mengenai profil anggota telah diungkapkan pada bagian Profil Dewan Pengawas.

### Muliaman D. Hadad

Anggota Komite Etik

Informasi mengenai profil anggota telah diungkapkan pada bagian Profil Dewan Pengawas.

### Dudung Abdurachman

Anggota Komite Etik

Informasi mengenai profil anggota telah diungkapkan pada bagian Profil Dewan Pengawas.

### Yusril Ihza Mahendra

Anggota Komite Etik

Informasi mengenai profil anggota telah diungkapkan pada bagian Profil Dewan Pengawas

### Abdul Muhaimin Iskandar

Anggota Komite Etik

Informasi mengenai profil anggota telah diungkapkan pada bagian Profil Dewan Pengawas.



## Mari Elka Pangestu*

Anggota Komite Etik

Mari Elka Pangestu adalah ekonom dan akademisi Indonesia yang memiliki pengalaman luas dalam bidang perdagangan internasional, investasi, dan pembangunan. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan di Bank Dunia (2020–2023), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2011–2014), dan Menteri Perdagangan (2004–2011). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (2024–saat ini) dan Penasihat Khusus Presiden untuk Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral (2024-saat ini) dan Dewan Komisaris PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) (2026-saat ini).

* merupakan anggota independen



## Yos Johan Utama*

Anggota Komite Etik

Yos Johan Utama adalah akademisi dan pakar Hukum Acara Tata Usaha Negara. Beliau pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro selama dua periode (2015-2024), setelah sebelumnya mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro (2011-2015). Saat ini beliau masih aktif sebagai Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia (1986-saat ini).

* merupakan anggota independen

### 3. Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia

**Tugas Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia**

Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia bertugas membantu Dewan Pengawas dalam melakukan penelaahan, pemantauan, dan pemberian rekomendasi yang dianggap perlu terkait tata kelola sumber daya manusia, kebijakan dan praktik remunerasi, serta pengelolaan kinerja Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, guna memastikan pengelolaan BPI Danantara berjalan secara efektif, berdaya saing, dan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Sejak pembentukan hingga akhir tahun 2025, Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia melaksanakan tugas pengawasan dengan fokus pada penguatan fondasi tata kelola SDM dan remunerasi, penyelarasan kebijakan lintas entitas BPI Danantara, serta identifikasi isu dan risiko strategis yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia telah melakukan 4 (empat) kali rapat.

**Komposisi Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia**

a. Marina R. Tusin sebagai ketua merangkap anggota
b. Erick Thohir sebagai anggota
c. Muliaman D. Hadad sebagai anggota
d. Sugiono sebagai anggota
e. Airlangga Hartarto sebagai anggota
f. Suahasil Nazara sebagai anggota
g. Kemal Azis Stamboel sebagai anggota
h. Iggi H. Achsien sebagai anggota



## Marina R. Tusin*

Ketua Komite Remunerasi & Sumber Daya Manusia

Marina R. Tusin merupakan profesional yang berpengalaman dalam konsultasi manajemen, kepemimpinan organisasi, dan tata kelola perusahaan. Beliau pernah menjabat sebagai Advisor di PWC Consulting Indonesia (2024-2025); President Director, Partner, PWC Consulting Indonesia (2013-2024); Managing Partner di TASS Consulting Indonesia (2002-2013); Partner di PWC Consulting Indonesia (1983-2002), serta Peneliti, Pusat Penelitian UNIKA Atma Jaya (1981-1983). Saat ini, beliau menjabat juga sebagai Komisaris Independen, Maybank Indonesia sejak tahun 2024.

* merupakan anggota independen

## Erick Thohir

Anggota Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia

Informasi mengenai profil anggota telah diungkapkan pada bagian Profil Dewan Pengawas.

## Muliaman D. Hadad

Anggota Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia

Informasi mengenai profil anggota telah diungkapkan pada bagian Profil Dewan Pengawas.

## Airlangga Hartarto

Anggota Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia

Informasi mengenai profil anggota telah diungkapkan pada bagian Profil Dewan Pengawas.

## Sugiono

Anggota Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia

Informasi mengenai profil anggota telah diungkapkan pada bagian Profil Dewan Pengawas.

## Suahasil Nazara

Anggota Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia

Informasi mengenai profil anggota telah diungkapkan pada bagian Profil Dewan Pengawas.



## Kemal Azis Stamboel*

Anggota Komite Remunerasi & Sumber Daya Manusia

Kemal Azis Stamboel adalah profesional dengan pengalaman di bidang konsultasi manajemen, tata kelola perusahaan, sektor keuangan, dan pemerintahan. Beliau pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI pada 2009–2013, termasuk sebagai anggota Komisi XI dan ketua Komisi I. Sebelum berkiprah di DPR RI, beliau antara lain menjabat sebagai Managing Partner di MCS PricewaterhouseCoopers (1992–2002) dan Partner di IBM Indonesia (2002–2004). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Digital Solusi Pratama sejak 2019 dan Presiden Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk sejak 2017.

* merupakan anggota independen



## Iggi H. Achsien*

Anggota Komite Remunerasi & Sumber Daya Manusia

Iggi H. Achsien merupakan profesional di bidang pasar modal dan keuangan syariah dengan pengalaman lebih dari dua dekade dalam perbankan investasi, pengelolaan dana, asuransi, dan perbankan syariah. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Pertamina (Persero) pada 2021–2025, Komisaris Independen di PT Pertamina Hulu Energi pada 2025–2026, Anggota Tim Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia pada 2019–2024, serta Komisaris Independen PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada 2014–2022. Saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris PT PLN Indonesia Power sejak 2026. Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah pada 2021–2023 dan Ketua Bidang Pasar Modal Syariah pada Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk masa bakti 2021–2025.

* merupakan anggota independen

## Sekretariat Dewan Pengawas

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengawas yang terdiri atas Sekretaris sebagai Kepala Sekretariat Dewan Pengawas merangkap anggota, serta pihak yang ditugaskan oleh anggota Dewan Pengawas yang mewakili kementerian/lembaga negara sesuai ketentuan keanggotaan Dewan Pengawas sebagai anggota. Sepanjang tahun 2025, Sekretariat Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang dapat dirangkum sebagai berikut:

- Pembangunan fondasi organisasi dan tata kelola Sekretariat Dewan Pengawas
- Penyusunan peraturan, pedoman, dan kebijakan Dewan Pengawas
- Fasilitasi pembentukan komite-komite Dewan Pengawas serta pengangkatan anggotanya
- Penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas
- Dukungan pengawasan atas RKAT dan IKU serta pemantauan kinerja BPI Danantara
- Penyusunan program kerja Sekretariat Dewan Pengawas
- Dukungan administratif dan kesekretariatan bagi Dewan Pengawas



### Hadiyan Sumintaatmadja

Kepala Sekretariat Dewan Pengawas

Hadiyan Sumintaatmadja ditunjuk sebagai Kepala Sekretariat Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara tanggal 15 Mei 2025.

Hadiyan Sumintaatmadja merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara dengan pengalaman kepemimpinan pada institusi pertahanan dan organisasi militer. Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah mengemban sejumlah jabatan strategis, antara lain Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau) dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Dalam pengembangan kompetensi profesional, Hadiyan Sumintaatmadja menempuh pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Indonesia, serta The Air War College (AWC), Alabama, Amerika Serikat. Latar belakang pendidikan tersebut memperkuat kapasitas beliau dalam kepemimpinan strategis, pengelolaan organisasi, dan koordinasi kelembagaan.

# Fungsi Kepatuhan



**Kepercayaan merupakan aset yang dibangun dalam waktu panjang dan dijaga melalui konsistensi dalam setiap tindakan. Dalam perjalanan BPI Danantara mengelola mandat strategis negara, fungsi kepatuhan berperan dalam menjaga agar setiap langkah pertumbuhan berjalan seiring dengan integritas, tata kelola yang baik, dan tanggung jawab kelembagaan.**

Dengan memastikan keselarasan antara tujuan, proses, dan prinsip yang diterapkan, fungsi kepatuhan membantu membangun fondasi yang kokoh bagi pengelolaan investasi yang terpercaya dan berkelanjutan.

## Pembentukan Organisasi Kepatuhan

Sepanjang tahun 2025, BPI Danantara berfokus membentuk organisasi kepatuhan sebagai fondasi tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Inisiatif utama mencakup penyusunan struktur organisasi, penetapan fungsi dan tanggung jawab kepatuhan, serta perumusan kebijakan dan prosedur dasar yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan regulasi berlaku.

Lebih lanjut, BPI Danantara juga memperkuat koordinasi antarfungsi kerja guna menumbuhkan budaya kepatuhan dalam operasional harian. Langkah ini menjadi dasar bagi pengembangan fungsi kepatuhan seiring dengan pertumbuhan BPI Danantara ke depan.

## Kepatuhan terhadap Penyusunan Kebijakan Dasar Tata Kelola

Dalam menjalankan pengelolaan BPI Danantara, Badan Pelaksana memastikan implementasi tata kelola perusahaan di seluruh aspek kelembagaan dan aktivitas organisasi. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan fondasi yang menghubungkan mandat institusi, pengambilan keputusan, dan penciptaan nilai jangka panjang agar setiap kebijakan selaras dengan tujuan strategis, akuntabilitas, serta kepentingan para pemangku kepentingan.

Melalui struktur dan proses yang terintegrasi, tata kelola menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pertumbuhan, pengelolaan risiko, dan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan berjalan secara seimbang, transparan, akuntabel, serta patuh pada hukum dan prinsip etika.

Ketentuan mengenai pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BPI Danantara diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana ("PERKA"). Peraturan tersebut menjadi acuan dalam mengatur berbagai aspek strategis pengelolaan BPI Danantara, mulai dari pengelolaan dividen BUMN, manajemen risiko dan kepatuhan, sumber daya manusia, keuangan, dan hukum, hingga sistem informasi, audit, pengadaan barang dan jasa, serta rencana kerja.[1]

Pada tahun 2025, seluruh PERKA yang diamanatkan dalam Pasal 25 PP Nomor 10 Tahun 2025 telah ditetapkan. Selain itu, beberapa PERKA lainnya juga telah diterbitkan untuk mendukung kebutuhan organisasi.

## Pemenuhan Organ Komite Badan Pelaksana

Badan Pelaksana membentuk komite-komite dengan susunan keanggotaan yang berasal dari Badan Pelaksana, pegawai BPI Danantara, dan/atau pihak lain yang memiliki pengalaman yang diperlukan komite dengan mempertimbangkan praktik terbaik internasional.

Komite sebagaimana dimaksud terdiri atas: (1) Komite Investasi; (2) Komite Manajemen Risiko; dan (3) Komite Operasional Portofolio. Komite-komite tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana. Sebagai bagian dari pembangunan fondasi tata kelola yang kokoh, selama tahun 2025 Badan Pelaksana melengkapi struktur pendukung pengambilan keputusan melalui pembentukan berbagai komite strategis. Untuk memastikan kejelasan mandat dan efektivitas pelaksanaannya, setiap komite dibekali dengan piagam yang mengatur ruang lingkup tugas, kewenangan, serta tata tertib kerja yang berlaku.

Laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan masing-masing komite selama tahun 2025 telah diuraikan dalam bab "Pencapaian Danantara Indonesia" sub bab "Pembentukan dan Laporan Komite BPI Danantara".

## Pelaksanaan Penyelarasan Fungsi Kepatuhan dengan Holding Investasi dan Holding Operasional

Dalam membangun fondasi tata kelola yang kuat, BPI Danantara menyelenggarakan kegiatan Penyelarasan Fungsi Kepatuhan bersama Holding Investasi dan Holding Operasional yang dimulai di tahun 2025 dan akan dilakukan secara berkala ke depan. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi untuk menyatukan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab fungsi kepatuhan, sekaligus memperkuat sinergi dalam menumbuhkan budaya integritas, meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, dan memastikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik terimplementasi secara konsisten di lingkungan BPI Danantara.



[1] Referensi: Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.




## Kebijakan Anti-Korupsi, Anti-Suap, dan Anti-Gratifikasi

Dalam membangun organisasi yang baru dibentuk untuk mengelola mandat strategis negara, BPI Danantara memulai dengan memperkuat fondasi integritas organisasi. Penetapan Kebijakan Anti-Korupsi, Anti-Suap, dan Anti-Gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun sistem pengendalian dan kepatuhan yang kokoh, guna memastikan seluruh aktivitas organisasi dijalankan secara transparan, akuntabel, serta selaras dengan nilai-nilai etika yang menjadi landasan BPI Danantara.

Pada tahun 2025, Badan Pelaksana menetapkan Kebijakan Anti-Korupsi, Anti-Suap, dan Anti-Gratifikasi melalui PERKA Nomor 20 Tahun 2025 sebagai bagian dari pembentukan kerangka tata kelola dan integritas organisasi. Kebijakan Anti-Korupsi, Anti-Suap, dan Anti-Gratifikasi antara lain mengatur mengenai:

1. komitmen, tujuan, dan prinsip utama;
2. tugas, kewenangan, dan tanggung jawab;
3. pelaporan atas indikasi tindak korupsi, suap dan/atau gratifikasi; dan
4. sanksi dan tindakan disipliner.

Kebijakan Anti-Korupsi, Anti-Suap, dan Anti-Gratifikasi juga mengatur Direktorat Legal & Compliance BPI Danantara sebagai unit pengendali gratifikasi di lingkungan BPI Danantara.

Dalam rangka mendukung penerapan Kebijakan Anti-Korupsi, Anti-Suap, dan Anti-Gratifikasi, BPI Danantara menyelenggarakan berbagai sosialisasi kepada insan organisasi guna memperkuat pemahaman atas prinsip, ketentuan, dan kewajiban yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Sosialisasi dilakukan, antara lain, melalui memo internal resmi, *town hall* karyawan, kampanye komunikasi internal, dan berbagai bentuk keterlibatan karyawan lainnya.

# Fungsi Internal Audit

Selain struktur tata kelola dan pengawasan yang kokoh, BPI Danantara juga telah membentuk Direktorat Internal Audit yang secara khusus menjalankan fungsi audit internal dan bertugas dalam mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal telah efektif. Melalui *assurance* yang independen dan terstruktur, direktorat ini membantu menjaga konsistensi kepatuhan di seluruh unit kerja BPI Danantara.

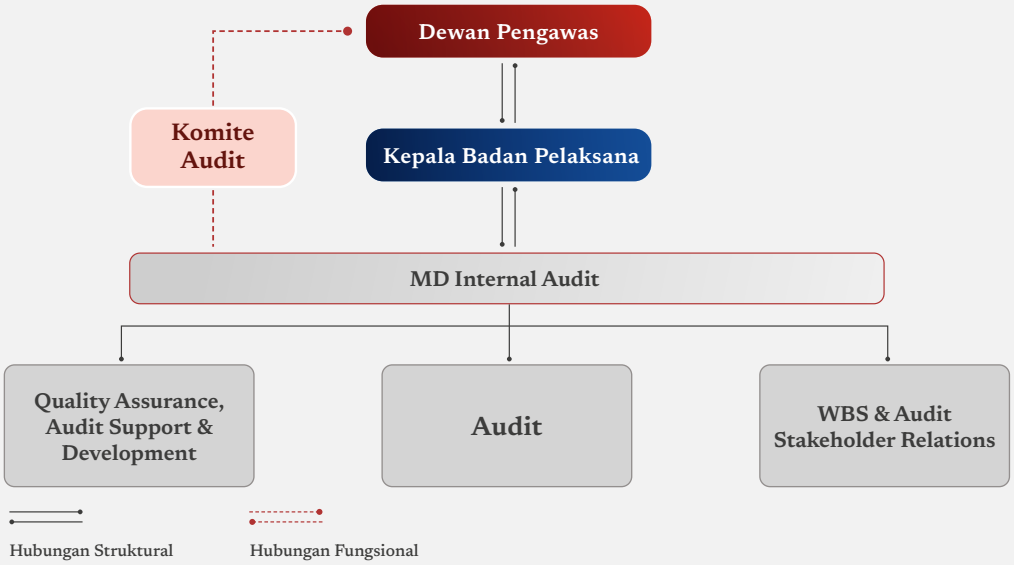
Direktorat Internal Audit mengacu pada Global Internal Audit Standards (GIAS) 2025 sebagai standar profesi dan *best practice* internasional. Untuk menjaga kualitas dan efektivitas fungsi audit internal, telah diterapkan Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) secara berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan direviu oleh pihak eksternal yang independen guna memastikan kesesuaian dengan standar profesional, meningkatkan kapabilitas fungsi audit, serta mendukung penerapan tata kelola yang baik di lingkungan BPI Danantara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Internal Audit memiliki akses penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap seluruh catatan, data, aset fisik, serta personel yang relevan dengan penugasan audit. Akses ini menjadi dasar penting untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh. Di sisi lain, Direktorat Internal Audit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan integritas informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan, sesuai prinsip profesionalisme dan kode etik audit.

## Struktur dan Kedudukan Organisasi Direktorat Internal Audit

Direktorat Internal Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan objektif dengan dipimpin oleh Managing Director yang bertanggung jawab langsung kepada Badan Pelaksana dan berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Pengawas serta Komite Audit. Managing Director Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pelaksana setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

**Struktur Internal Audit**




Hubungan kerja antara direktorat yang bertanggung jawab atas fungsi audit internal pada BPI Danantara dengan direktorat atau grup audit internal pada Holding Investasi dan Holding Operasional adalah menjalankan fungsi koordinatif dan kolaboratif dengan mempertimbangkan kepentingan, risiko, ukuran, karakteristik, dan kompleksitas kegiatan operasional dan penugasan serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan sinergi dalam pelaksanaan aktivitas audit internal, yang mencakup antara lain penyelarasan rencana strategis; kecukupan cakupan audit dalam rencana audit tahunan; metodologi dan pendekatan audit; penyelarasan format laporan audit; *monitoring* tindak lanjut hasil audit; program pengembangan kapabilitas fungsi audit internal; serta pelaksanaan audit gabungan (*joint audit*).

## Tugas dan Tanggung Jawab Direktorat Internal Audit

Direktorat Internal Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari auditor internal maupun auditor eksternal telah ditindaklanjuti secara memadai oleh masing-masing direktorat yang berada di bawah kewenangannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, fungsi audit internal memiliki ruang lingkup kerja yang mencakup seluruh direktorat dalam BPI Danantara, meliputi: perencanaan dan pelaksanaan aktivitas audit, evaluasi serta identifikasi akar penyebab atas temuan audit, pemantauan tindak lanjut rekomendasi, serta investigasi atas indikasi kecurangan (*fraud*) bilamana diperlukan dan pelanggaran kode etik sesuai tata kelola yang berlaku. Seluruh aktivitas hasil audit dikomunikasikan secara tepat waktu kepada pihak terkait guna memastikan efektivitas tindak lanjut.

## Kewenangan Direktorat Internal Audit

Direktorat yang membidangi fungsi audit internal memperoleh mandat dari Kepala Badan Pelaksana untuk memberikan layanan *assurance*, konsultasi (*advisory*), wawasan (*insight*), pandangan ke depan (*foresight*) yang objektif di lingkungan BPI Danantara serta investigasi bilamana diperlukan. Dalam menjalankan mandatnya, fungsi audit internal memiliki akses penuh dan tak terbatas terhadap seluruh direktorat, data, informasi, dokumen, serta personel yang relevan, dengan tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi.

Fungsi audit internal juga berwenang mengalokasikan sumber daya, menetapkan ruang lingkup dan metodologi audit, memberikan peringkat maupun opini atas hasil audit, serta berkoordinasi dengan penyedia jasa *assurance* lainnya untuk menghindari duplikasi dan memastikan efisiensi. Dalam kapasitas strategis, fungsi audit internal dapat mengikuti rapat strategis sebagai pengamat (*observer*) dan memberikan jasa konsultasi baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan operasional.

## Standar dan Kode Etik Direktorat Internal Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, direktorat yang membidangi fungsi audit internal mengacu pada Piagam Audit Internal dan standar yang berlaku umum termasuk prinsip etik dan profesionalisme, yaitu:

a. **Integritas**
   Auditor Internal harus mendemonstrasikan integritas dalam pekerjaan dan perilaku mereka, termasuk kejujuran dan keberanian menyatakan kebenaran, dan bertindak sesuai nilai moral tinggi sehingga membentuk keyakinan dan kepercayaan terhadap penilaian fungsi audit internal. Auditor Internal tidak boleh menyembunyikan informasi atau menyesatkan pihak lain demi keuntungan pribadi atau pihak lain.

b. **Objektivitas**
   Auditor Internal mempertahankan sikap tidak memihak dan tidak bias termasuk bersikap netral dan bebas dari tekanan, konflik kepentingan, atau pengaruh yang dapat mengganggu profesionalisme dalam memberikan penilaian dan rekomendasi. Auditor Internal tidak diperkenankan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional organisasi. Fungsi audit internal yang diposisikan secara independen mendukung kemampuan Auditor Internal untuk menjaga objektivitas.

c. **Kompetensi**
   Auditor Internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup dalam pelaksanaan tugasnya, serta dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas jasa dengan mengupayakan pengembangan profesional berkelanjutan agar kompetensinya tetap relevan terhadap risiko dan teknologi terkini.

d. **Kecermatan Profesional**
   Auditor Internal menerapkan kecermatan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan jasa audit internal termasuk penerapan skeptisisme profesional untuk menilai dan mengevaluasi informasi secara kritis.

e. **Kerahasiaan**
   Auditor Internal harus menjaga informasi yang diperoleh selama penugasan, menggunakannya hanya untuk tujuan profesional dan tidak menggunakannya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Pengungkapan informasi hanya dilakukan bila diwajibkan oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku atau diperintahkan secara tertulis oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang.

## Komposisi Auditor dan Pengembangan Kompetensi

Dalam melaksanakan fungsinya, Direktorat Internal Audit didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan kualifikasi yang memadai.

Berikut komposisi auditor internal per 31 Desember 2025:

| No | Jabatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Managing Director | 1 |
| 2 | Senior Vice President | 1 |
| 3 | Vice President Internal Audit | 1 |
| 4 | Assistant Vice President Internal Audit | 2 |
| 5 | Lead Associate Internal Audit | 2 |
| 6 | Lead Associate Executive Assistant and Office Manager | 1 |

Secara rinci, informasi mengenai sertifikasi profesi yang dimiliki oleh auditor internal BPI Danantara adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Sertifikasi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Risiko 4-7 | 4 |
| 2 | Chartered Accountant (CA) | 1 |
| 3 | Certified Public Accountant (CPA) | 1 |
| 4 | Certified State Finance Auditor (CSFA) | 1 |
| 5 | Certified in International Public Sector Accounting Standards (CertIPSAS) | 1 |
| 6 | Certified Information Systems Auditor (CISA) | 1 |
| 7 | Certified Fraud Examiner (CFE) | 2 |
| 8 | Qualified Internal Auditor | 1 |
| 9 | Certified Forensic Auditor | 1 |
| 10 | CFP (Certified Financial Planner) | 1 |
| 11 | Certified Practitioner Internal Auditor | 1 |
| 12 | Certified Governance, Risk Management, Compliance Professional | 1 |
| 13 | Certified Governance, Risk Management, Compliance Auditor | 1 |
| 14 | Integrated Audit & Assurance Professional | 1 |



## Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Tahun 2025

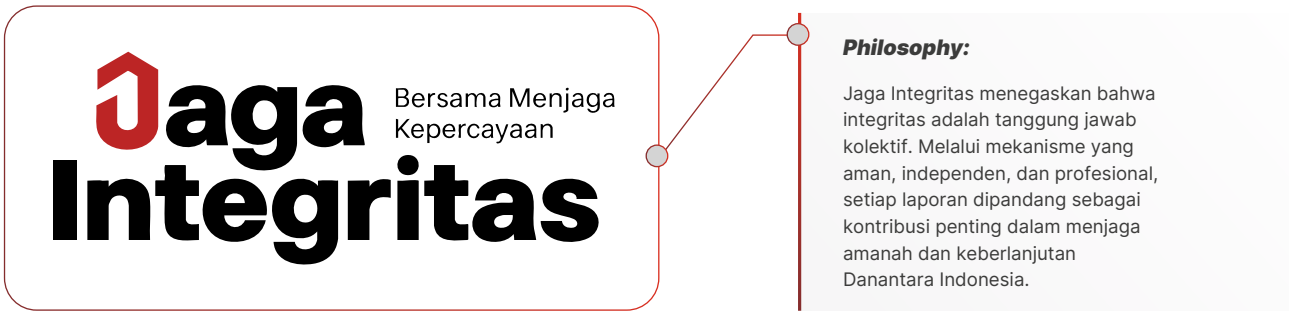
Pencapaian dan perkembangan inisiatif strategi Direktorat Internal Audit selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan pembentukan Tim Internal Audit pada akhir tahun 2025 adalah sebanyak 8 (delapan) personel;
2. Penyusunan Piagam Audit telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas pada tanggal 22 Desember 2025;
3. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Pelaksana (PERKA) No. 19 Tahun 2025 tentang Audit Internal yang disusun sebagai acuan bagi Direktorat Internal Audit BPI Danantara dalam pelaksanaan aktivitas audit internal telah disetujui oleh Kepala Badan Pelaksana dan berlaku pada 5 Desember 2025;
4. Peluncuran *Whistleblowing System* Danantara Indonesia "Jaga Integritas" tanggal 24 Desember 2025; dan
5. Penguatan kelembagaan audit internal dengan Asosiasi Profesi Audit Internal melalui partisipasi aktif pada 8 (delapan) konferensi dan pertemuan, baik sebagai *keynote speaker*, panelis, maupun *host*.

> **Tata kelola yang baik perlu dijaga secara berkelanjutan. Melalui audit internal yang independen, Danantara Indonesia memastikan setiap keputusan berjalan secara akuntabel, risiko dikenali sejak dini, dan perbaikan dilakukan secara berkelanjutan.**

## *Whistleblowing System* (WBS)

Integritas adalah fondasi utama dalam setiap langkah Danantara Indonesia. Sebagai institusi yang mengemban amanah strategis negara, Danantara Indonesia memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan tata kelola yang kuat, transparan dan dapat dipercaya. Dalam rangka mewujudkan semangat tersebut, Danantara Indonesia telah meluncurkan *Whistleblowing System* (WBS) pada tanggal 24 Desember 2025 sebagai bagian dari inisiatif **"Jaga Integritas-Bersama Menjaga Kepercayaan"**. Melalui mekanisme yang aman, independen, dan profesional, setiap laporan dipandang sebagai kontribusi penting dalam menjaga mandat dan keberlanjutan Danantara Indonesia.




***Branding* WBS Danantara Indonesia**

WBS menjadi mekanisme resmi yang disediakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang terjadi di lingkungan Danantara Indonesia. Setara dengan *best practice* yang umum diterapkan di pemerintahan dan perusahaan di seluruh dunia, WBS Danantara Indonesia dirancang sebagai sarana yang aman, mudah dan andal bagi seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk menyampaikan pengaduan.

Sistem ini dirancang agar setiap laporan dapat disampaikan secara aman, bertanggung jawab dan profesional, dengan jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan identitas pelapor (*whistleblower*) serta isi laporan. Ini mencakup memberikan perlindungan kepada setiap pelapor dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan WBS terkait dengan ancaman, retaliasi, atau tindakan dari siapa pun yang dapat merugikan pelapor dan pihak-pihak yang terlibat tersebut.

**Pengelolaan WBS oleh Pihak Ketiga Independen**

Untuk memastikan kerahasiaan dan kredibilitas proses pelaporan, penerimaan serta administrasi WBS, WBS Danantara Indonesia dikelola oleh pihak ketiga independen. Pengelolaan ini menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya, sehingga pegawai maupun pemangku kepentingan dapat melaporkan indikasi pelanggaran tanpa rasa khawatir.

Jenis penyimpangan yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. Kecurangan/*Fraud*
   a. Korupsi
   b. Benturan kepentingan
   c. Penyuapan
   d. Gratifikasi yang dilarang
   e. Pemerasan ekonomi
   f. Penyalahgunaan aset dan wewenang
   g. Pelanggaran akuntansi, rekayasa pelaporan keuangan dan/atau non-keuangan

2. Penyimpangan terhadap Undang-Undang
   a. Hukum pidana
   b. Hukum perdata
   c. Hukum dagang
   d. Hukum perpajakan

3. Penyimpangan terhadap Ketentuan BPI Danantara
   a. Pedoman perilaku dan etika
   b. Benturan kepentingan
   c. Transaksi orang dalam (*insider trading*)
   d. Kebijakan dan SOP
   e. Ketentuan lain yang berlaku

**Perlindungan bagi Pelapor**

Pemberian perlindungan terhadap pelapor merupakan pilar penting dalam kerangka pengelolaan WBS yang akuntabel dan transparan. WBS Danantara Indonesia dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaporkan dugaan pelanggaran, kecurangan, atau tindakan tidak etis tanpa takut akan pembalasan atau diskriminasi. Komitmen terhadap penyediaan perlindungan tersebut diwujudkan dalam beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Seluruh data terkait pengaduan bersifat rahasia termasuk identitas pelapor
2. Seluruh data terkait pengaduan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan
3. Semua pihak yang terkait wajib menjaga kerahasiaan kepada siapa pun dan dalam bentuk apa pun

**Sarana dan Media Penyampaian Aduan melalui *Whistleblowing System***

Sebagai salah satu bentuk komitmennya dalam mewujudkan tata kelola yang baik, Danantara Indonesia telah memiliki halaman khusus terkait WBS dalam *website* resminya, termasuk sarana dan media penyampaian aduan WBS melalui alamat:



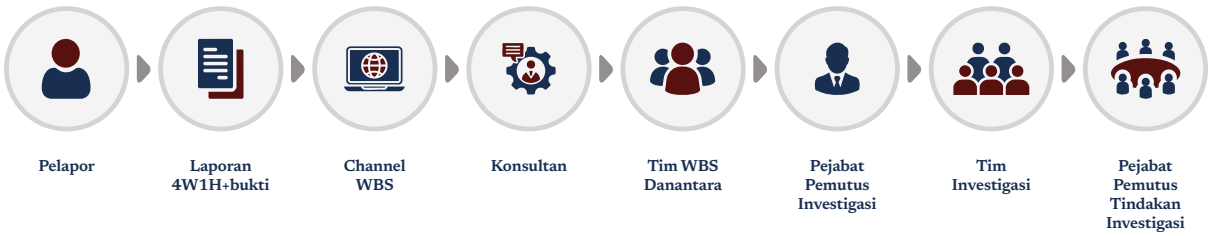

https://www.danantaraindonesia.co.id/corporate-governance/wbs.

Dalam rangka memudahkan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan aduan pelanggaran, Danantara Indonesia menyediakan berbagai sarana dan media pelaporan sebagai berikut:

**Website:** https://whistleblowing.tips/wbs/@wbsdanantara
**E-mail:** wbs@danantaraindonesia.com
**Surat:** PO Box 11880 JAKARTA CENTRUM 11000
**SMS dan WhatsApp:** +62 811 1100 1188

**Alur Penyampaian Laporan *Whistleblowing System***

Seluruh komunikasi dengan pelapor dalam WBS dikelola dan dilaksanakan oleh pihak independen yang terpercaya, mencakup penyampaian informasi mengenai status laporan, hasil investigasi, serta tindak lanjut yang dijalankan, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan keamanan data secara ketat.



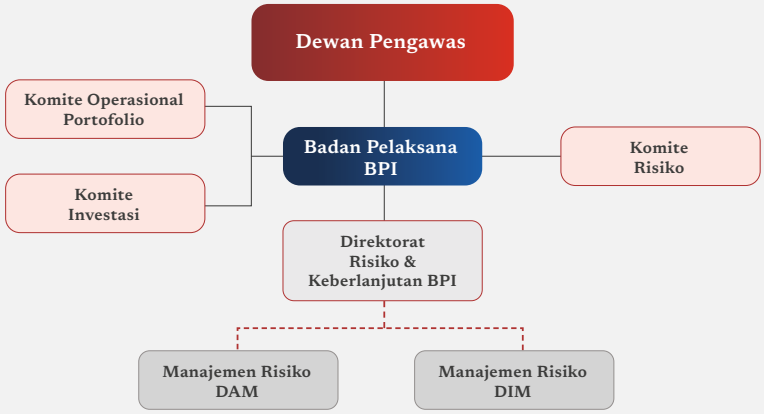
# Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan fondasi penting dalam mendukung pencapaian tujuan jangka panjang Danantara Indonesia. Kerangka manajemen risiko dirancang untuk memastikan proses pengambilan keputusan dilakukan secara disiplin, terukur, dan selaras dengan mandat institusi dalam menciptakan nilai ekonomi, menjaga ketahanan nasional, serta membangun kekayaan antargenerasi.

BPI Danantara menerapkan kerangka manajemen risiko yang dikoordinasikan secara terpusat oleh fungsi Risk & Sustainability. Fungsi ini menetapkan kerangka kerja, kebijakan, prosedur, dan standar manajemen risiko yang berlaku di tingkat Danantara Indonesia. Implementasi dilakukan melalui fungsi manajemen risiko di DAM dan DIM yang bertanggung jawab memantau, melaporkan, dan mengelola risiko sesuai karakteristik masing-masing entitas.

## Tata Kelola Manajemen Risiko

**Struktur Tata Kelola Risiko**




Dalam struktur tata kelola risiko, Dewan Pengawas memberikan pengawasan terhadap organisasi secara menyeluruh. Badan Pelaksana memegang akuntabilitas eksekutif atas penerapan manajemen risiko, dengan dukungan Komite Operasional Portofolio, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Investasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan portofolio, risiko, dan investasi.

Fungsi Risk & Sustainability BPI Danantara berperan sebagai koordinator utama dalam membangun kerangka manajemen risiko keberlanjutan di ekosistem Danantara Indonesia. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, standar, metodologi, dan kapabilitas yang diperlukan agar pengelolaan risiko dilakukan secara konsisten, terintegrasi, dan selaras dengan strategi organisasi.

Di tingkat operasional, manajemen risiko diterapkan melalui fungsi risiko khusus dalam DAM dan DIM, di mana fokus manajemen risiko DAM adalah pada BUMN; sedangkan fokus manajemen risiko DIM pada investasi lain yang tidak terkait dengan BUMN. Bersama-sama, unit-unit ini membentuk fungsi risiko garis depan yang memberi wawasan, analisis, dan penilaian risiko ke BPI Danantara melalui fungsi Risk & Sustainability untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana, dan akhirnya kepada Dewan Pengawas.

Pimpinan Risk Management DAM dan Pimpinan Risk Management DIM bertanggungjawab langsung kepada CEO masing-masing, dan secara tidak langsung kepada Managing Director Risk & Sustainability BPI Danantara. Kedua pimpinan ini memiliki tanggung jawab untuk menerapkan Kerangka Kerja Manajemen Risiko, Kebijakan, dan Praktik Danantara Indonesia dalam bisnis masing-masing.

Agar fungsi manajemen risiko dapat berjalan secara efektif, BPI Danantara, DAM, dan DIM akan memastikan tersedianya sumber daya dan alokasi waktu yang memadai dari manajemen masing-masing untuk mendukung investasi serta pengembangan personel, teknologi, sistem, dan data yang diperlukan.

## Kerangka Manajemen Risiko Danantara Indonesia




Manajemen risiko di Danantara Indonesia berlandaskan pada tujuan dan target strategis institusi, serta menjadi acuan dalam pengalokasian dan evaluasi modal di seluruh organisasi. Kerangka manajemen risiko ini berpedoman atas tiga (3) prinsip utama, yaitu:

1. Transparansi dan integritas;
2. Cakupan yang menyeluruh; dan
3. Manajemen risiko yang proaktif.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Danantara Indonesia dibangun atas lima (5) pilar terintegrasi yang ditopang oleh budaya risiko yang kuat dan komunikasi efektif di seluruh organisasi.

1. **Tata Kelola Risiko:** Memastikan bahwa manajemen risiko terintegrasi ke dalam kerangka tata kelola organisasi di seluruh tingkatan. Tata Kelola Risiko mencakup struktur organisasi, kebijakan, selera risiko, dan batasan-batasan.
2. **Identifikasi Risiko:** Mengelola proses identifikasi risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja portofolio. Proses ini mencakup pengembangan dan pemeliharaan taksonomi jenis risiko, penerapan kerangka dan metodologi penguraian risiko, dan kuantifikasi eksposur risiko.
3. **Kuantifikasi Risiko:** Memahami dan mengevaluasi faktor-faktor risiko kinerja serta mengukur volatilitas atau rentang hasil yang dapat terjadi, serta dampaknya terhadap kinerja portofolio.
4. **Pemantauan Risiko:** Mencakup komponen pelaporan dan komunikasi; pelaporan risiko internal, laporan batas dan utilisasi; *stress testing* dan analisis skenario, jika diperlukan; dan komunikasi eksternal mengenai risiko, bila relevan, kepada pemangku kepentingan utama.
5. **Evaluasi Risiko:** Kinerja risiko-imbal hasil (*risk-return*) investasi dan portofolio; konsentrasi portofolio dan opsi diversifikasi; kapasitas dan utilisasi risiko; serta efisiensi pengalokasian modal.

## Budaya Risiko

Budaya risiko yang kuat menjadi fondasi penting bagi Danantara Indonesia dalam menjalankan mandatnya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pimpinan dan fungsi manajemen risiko mendorong kesadaran risiko agar menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi. Hal ini didukung melalui komunikasi berkala, peningkatan kapasitas dan pelatihan manajemen risiko yang efektif.

Setiap insan organisasi diharapkan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan integritas, mendukung identifikasi dan penilaian risiko yang komprehensif, serta berkontribusi aktif dalam pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang berkelanjutan.

> Dengan menumbuhkan mentalitas proaktif dan sadar risiko, Danantara Indonesia berupaya memperkuat ketahanan, mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi, dan menjaga penciptaan nilai jangka panjang.

# Keberlanjutan

Pendekatan keberlanjutan Danantara Indonesia didasarkan pada keyakinan bahwa pertimbangan keberlanjutan termasuk faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environmental, Social, and Governance*/ ESG), dan perubahan iklim, merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi, manajemen aset, disiplin operasional, dan tata kelola organisasi. Sebagai institusi investasi jangka panjang, pendekatan ini mendukung alokasi modal yang bertanggung jawab, memperkuat ketahanan portofolio, menciptakan nilai jangka panjang, serta menjaga kredibilitas institusional.

Dalam Laporan Tahunan perdana ini, Danantara Indonesia memperkenalkan rancangan awal Kerangka Kerja Keberlanjutannya (*Sustainability Framework*). Kerangka Kerja tersebut menerjemahkan tujuan keberlanjutan ke dalam arsitektur operasional untuk tata kelola dan akuntabilitas, integrasi ke dalam proses inti kelembagaan, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan pemantauan, pelaporan, dan transparansi. Kerangka kerja ini akan terus dikembangkan secara bertahap seiring meningkatnya kapabilitas organisasi, berkembangnya praktik terbaik, serta bertambahnya pengalaman dalam pengelolaan investasi dan portofolio.

Danantara Indonesia mempertimbangkan pendekatan materialitas ganda (*double materiality*) terhadap keberlanjutan di dalam siklus hidup investasi, kepemilikan aset, dan manajemen portofolio. Pendekatan ini menilai keberlanjutan melalui dua perspektif yang saling melengkapi: pertama, bagaimana faktor risiko dan peluang keberlanjutan dapat memengaruhi kinerja keuangan, nilai investasi, ketahanan portofolio, serta penciptaan nilai jangka panjang (*financial materiality*); kedua, bagaimana aktivitas investasi, kepemilikan aset, dan transformasi yang dilakukan Danantara Indonesia dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta berkontribusi pada tujuan keberlanjutan yang diharapkan (*impact materiality*).

## Tujuan Keberlanjutan

Selaras dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), agenda strategis nasional di bidang keberlanjutan, dan kebijakan internal yang berlaku, Danantara Indonesia berupaya mendukung pencapaian tujuan-tujuan keberlanjutan berikut sebagai landasan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, tangguh, dan berorientasi pada nilai sesuai mandat dan kewenangannya:

1. mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk kemakmuran bersama;
2. meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendorong pembangunan yang inklusif;
3. melindungi integritas lingkungan untuk memperkuat ketahanan ekosistem dan iklim;
4. menegakkan tata kelola yang bertanggung jawab melalui pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel; serta
5. mendukung penciptaan nilai jangka panjang serta ketahanan (*resilience*) bagi generasi sekarang dan mendatang.



## Kerangka Kerja Keberlanjutan (*Sustainability Framework*)

Kerangka Kerja Keberlanjutan disusun sebagai panduan utama Danantara Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam tata kelola, kegiatan investasi dan non-investasi, serta pemantauan portofolio. Kerangka menyediakan kebijakan, standar, dan perangkat operasional agar faktor keberlanjutan dapat diidentifikasi, dinilai, dipantau, dan dilaporkan secara konsisten di seluruh ekosistem Danantara Indonesia.

Kerangka Kerja ini disusun berdasarkan lima (5) komponen institusional: (1) prinsip keberlanjutan; (2) kebijakan dan standar; (3) tata kelola dan akuntabilitas; (4) panduan operasional; dan (5) pemantauan, pelaporan, dan transparansi.

**Tabel Rancangan Kerangka Kerja Keberlanjutan**

| Komponen kerangka kerja | Tujuan |
|---|---|
| Prinsip Keberlanjutan | Menetapkan visi dan prinsip dasar keberlanjutan sebagai arah dalam merumuskan prioritas, tema, dan inisiatif keberlanjutan di seluruh Danantara Indonesia. |
| Kebijakan dan standar | Ketentuan formal yang menetapkan prinsip implementasi, komitmen, ruang lingkup, tata kelola dan akuntabilitas, dan ekspektasi minimum untuk penerapan keberlanjutan yang konsisten di seluruh Danantara Indonesia. |
| Tata kelola dan akuntabilitas | Menetapkan peran, tanggung jawab, pengawasan, dan akuntabilitas yang jelas untuk pengambilan keputusan dan koordinasi terkait keberlanjutan di dalam struktur organisasi Danantara Indonesia. |
| Panduan operasional | Panduan untuk mengintegrasikan faktor keberlanjutan ke dalam fungsi inti seperti pengambilan keputusan investasi, mobilisasi modal dan keuangan keberlanjutan (*sustainable finance*), manajemen portofolio dan praktik kepemilikan aktif, operasional kelembagaan, dan manajemen risiko. |
| Pemantauan, pelaporan, dan transparansi | Mengembangkan sistem analisis data tingkat portofolio, KPI, proses pemantauan kinerja dan pelaporan bidang keberlanjutan untuk mendukung akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan keputusan, selaras dengan peraturan yang berlaku dan standar yang diakui. |



# Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPI Danantara dan Entitas Anak untuk periode sejak 24 Februari 2025, tanggal pendirian BPI Danantara, hingga 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan opini wajar tanpa pengecualian. Per 31 Desember 2025, total aset konsolidasian Danantara Indonesia tercatat sebesar Rp11.607,04 triliun. Aset tersebut mencerminkan skala dan keragaman portofolio Danantara Indonesia, yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp1.221,2 triliun, aset spesifik lembaga keuangan dan aset investasi surat berharga sebesar Rp6.154,9 triliun, serta aset tidak lancar sebesar Rp4.230,9 triliun.

Dibandingkan dengan posisi konsolidasian awal per 31 Maret 2025 yang disajikan sebagai informasi komparatif ketika Danantara Indonesia menerima inbreng BUMN, total aset meningkat sebesar Rp555,6 triliun atau sekitar 5,0% hingga 31 Desember 2025. Peningkatan tersebut antara lain tercermin pada pertumbuhan kredit dan piutang pembiayaan, investasi surat berharga, aset tetap dan aset produktif lainnya di seluruh portofolio.

Kredit dan piutang pembiayaan meningkat sebesar 7,2% menjadi Rp3.998,9 triliun, sementara investasi surat berharga meningkat sebesar 11,1% menjadi Rp1.485,9 triliun dibandingkan dengan posisi konsolidasian awal per 31 Maret 2025.

Aktivitas investasi portofolio juga tercermin dari peningkatan bersih aset tetap dan aset produktif lainnya sebesar Rp257,7 triliun berdasarkan laporan arus kas konsolidasian selama periode pelaporan.

Per 31 Desember 2025, total liabilitas konsolidasian tercatat sebesar Rp8.331,4 triliun, sementara dana *syirkah* temporer yang disajikan secara terpisah tercatat sebesar Rp296,0 triliun. Dari total liabilitas tersebut, simpanan nasabah mencapai Rp3.887,5 triliun. Struktur liabilitas mencerminkan karakteristik operasional portofolio BUMN, khususnya sektor jasa keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, total ekuitas konsolidasian tercatat sebesar Rp2.979,7 triliun. Posisi ekuitas tersebut terutama terbentuk dari inbreng saham BUMN kepada Danantara Indonesia sebagai fondasi permodalan, serta diperkuat oleh kinerja portofolio selama sembilan bulan sejak tanggal inbreng (Maret 2025). Struktur permodalan ini menjadi landasan bagi Danantara Indonesia dalam memperkuat kapasitas investasi dan pengelolaan portofolio ke depan.

Untuk periode 24 Februari hingga 31 Desember 2025, portofolio konsolidasian Danantara Indonesia membukukan pendapatan sebesar Rp2.385,2 triliun, laba bruto Rp680,0 triliun, laba usaha Rp390,4 triliun, laba sebelum pajak Rp292,7 triliun, serta laba bersih periode berjalan Rp203,4 triliun. Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan tercatat sebesar Rp192,3 triliun. Angka tersebut mencakup sembilan (9) bulan kinerja BUMN sejak tanggal inbreng di bulan Maret 2025 hingga 31 Desember 2025. Kinerja tersebut mencerminkan skala, kapasitas pendapatan, dan profitabilitas portofolio konsolidasian Danantara Indonesia selama periode pelaporan.

Profitabilitas tersebut juga didukung oleh arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp563,1 triliun selama periode pelaporan, yang mencerminkan kapasitas portofolio dalam menghasilkan arus kas dari kegiatan operasional.

## Sumber Pendanaan

Struktur permodalan BPI Danantara dibentuk antara lain melalui inbreng saham BUMN kepada DAM. Selain itu, pada 2025 BPI Danantara menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp4,7 triliun untuk diteruskan melalui DAM kepada tiga BUMN penerima penugasan khusus pemerintah, yaitu PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Industri Kereta Api (Persero).

Distribusi dividen menjadi salah satu mekanisme utama Danantara Indonesia dalam mengelola nilai yang dihasilkan portofolio BUMN dan mengalokasikannya kembali untuk mendukung kebutuhan permodalan dan investasi. Sepanjang 2025, DAM menerima dividen sebesar Rp131,4 triliun dari BUMN. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp79,9 triliun didistribusikan kepada BPI Danantara dan Rp808 miliar didistribusikan kepada Pemerintah, sementara sisanya dialokasikan antara lain untuk pemberian pinjaman dan penyertaan modal kepada BUMN serta pembiayaan kegiatan operasional DAM.

Dari dividen yang diterima BPI Danantara dari DAM, sebesar Rp70 triliun digunakan sebagai penyertaan modal kepada DIM.

Dalam membangun kapasitas pendanaan investasinya, DIM menerbitkan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) atau “Patriot Bonds” pada Oktober dan Desember 2025 masing-masing sebesar Rp50 triliun dan Rp11,38 triliun.

Pada 31 Desember 2025, nilai tercatat Patriot Bonds mencapai Rp61,3 triliun. Instrumen tersebut diterbitkan dalam dua seri dengan tenor lima dan tujuh tahun, tingkat bunga 2% per tahun. Berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia, peringkat atas SUJP adalah idAAA. Penerbitan SUJP tersebut ditujukan untuk mendanai kegiatan usaha umum DIM, dan tidak terbatas dalam kaitannya dengan program-program investasi sesuai mandat pemerintah. DIM wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan SUJP kepada pemegang SUJP yang dalam hal ini diwakili oleh agen pemantau. Selain itu, DIM wajib memberikan informasi yang wajar kepada agen pemantau apabila sewaktu-waktu diminta mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva penerbit, dan hal lain.

Mengingat DIM masih berada pada tahap awal operasional pada 2025, fokus pada tahun pertama diarahkan pada pembangunan kapasitas pendanaan dan kesiapan platform investasi sebagai fondasi bagi pelaksanaan investasi pada fase berikutnya.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan 2025 mencerminkan skala dan kapasitas ekonomi portofolio BUMN yang dikelola Danantara Indonesia, dengan pertumbuhan pada sejumlah aset produktif, profitabilitas dan arus kas operasional yang kuat. Nilai yang dihasilkan portofolio juga mulai diarahkan untuk membangun kapasitas investasi. Tahun pertama ini menjadi fondasi bagi Danantara Indonesia untuk memperkuat pengelolaan portofolio dan memasuki fase berikutnya dari transformasi dan pelaksanaan investasi.

**Ringkasan Posisi Keuangan Konsolidasian**

(dalam miliar Rp)

| Neraca konsolidasian | 31 Desember 2025 |
|---|---|
| Aset lancar | 1.221.214 |
| Aset spesifik lembaga keuangan dan aset investasi surat berharga | 6.154.889 |
| Aset tidak lancar | 4.230.935 |
| **Total aset** | **11.607.038** |
| Liabilitas jangka pendek | 1.225.443 |
| Liabilitas spesifik lembaga keuangan | 4.655.606 |
| Liabilitas jangka panjang | 2.450.311 |
| **Total liabilitas** | **8.331.360** |
| **Dana *syirkah* temporer** | **295.979** |
| Modal | 1.032.345 |
| Komponen ekuitas lainnya | 1.215.266 |
| Saldo Laba | 134.653 |
| Pendapatan komprehensif lainnya | (28.849) |
| Ekuitas diatribusi ke kepentingan non-pengendali | 626.284 |
| **Total ekuitas** | **2.979.699** |

**Ringkasan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**

(dalam miliar Rp)

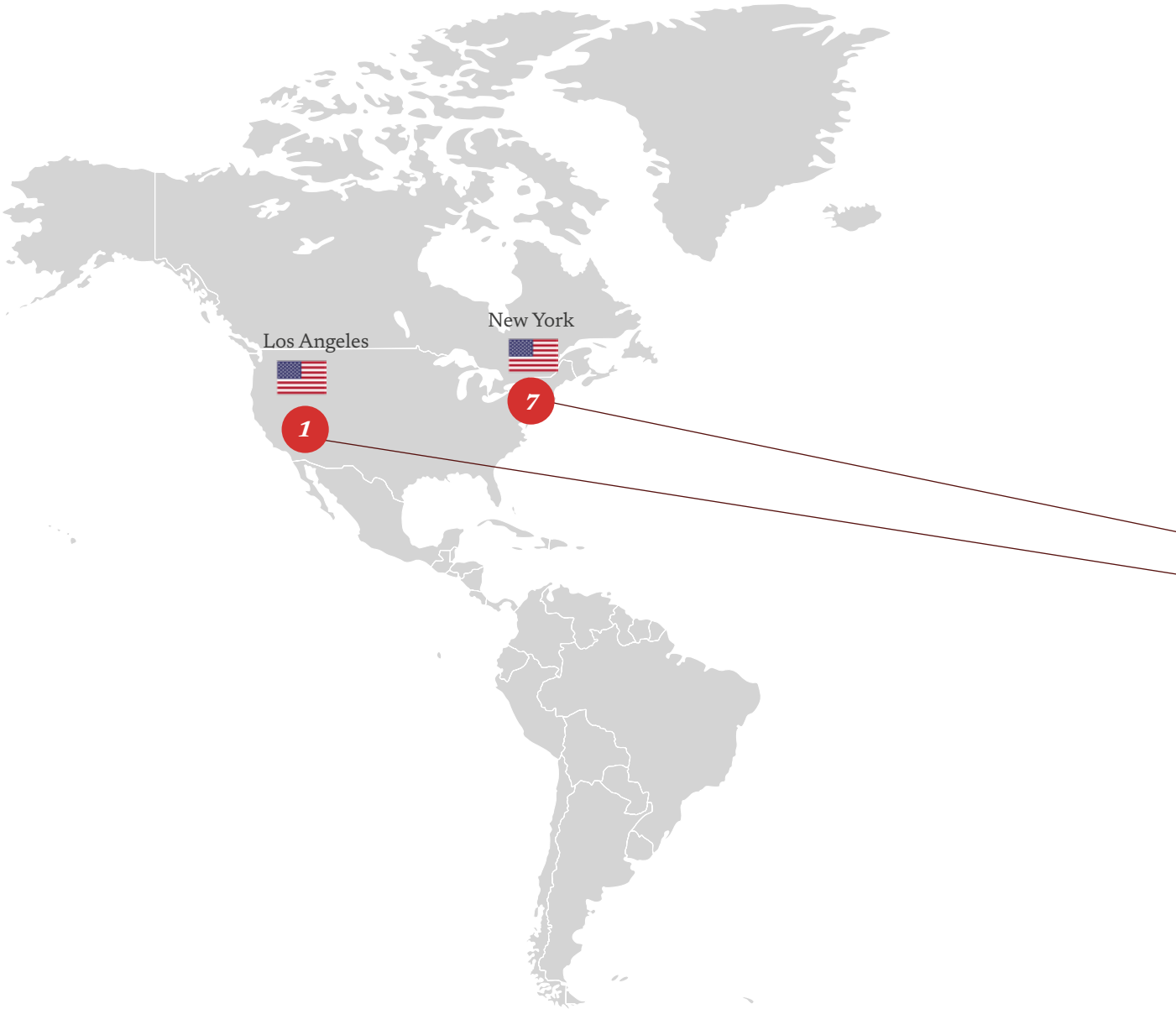
| Laba rugi konsolidasian | 24 Februari (tanggal pendirian BPI Danantara) - 31 Desember 2025 *) |
|---|---|
| Pendapatan usaha | 2.385.245 |
| Beban pokok pendapatan | (1.705.279) |
| **Laba bruto** | **679.966** |
| Beban umum dan administrasi | (255.687) |
| Beban penjualan | (33.869) |
| **Laba usaha** | **390.410** |
| Pendapatan keuangan | 19.924 |
| Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama | 19.955 |
| Beban keuangan | (109.236) |
| Beban lain-lain - bersih | (28.307) |
| **Laba sebelum pajak penghasilan** | **292.746** |
| Beban pajak penghasilan | (89.337) |
| **Laba periode berjalan** | **203.409** |
| Penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak | (11.096) |
| **Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan** | **192.313** |
| **Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan yang diatribusikan kepada:** | |
| Pemilik entitas induk | 121.127 |
| Kepentingan non-pengendali | 71.186 |

*) Mencakup kinerja BUMN untuk periode 9 (sembilan) bulan sampai dengan 31 Desember 2025, setelah inbreng saham BUMN kepada DAM.

# Kelembagaan dan Kerja Sama Strategis

Sebagai katalis utama dalam menarik investasi domestik maupun global, Danantara Indonesia memainkan peran krusial dalam mendukung transformasi ekonomi dan memperkuat daya saing Indonesia di panggung dunia. Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi dan sektor strategis nasional lewat kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah, lembaga multilateral, investor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pelaku usaha, dan mitra/institusi lainnya untuk membangun ekosistem investasi dan usaha yang kokoh dan berkelanjutan.

**17 Forum dan Pertemuan Internasional Tahun 2025**

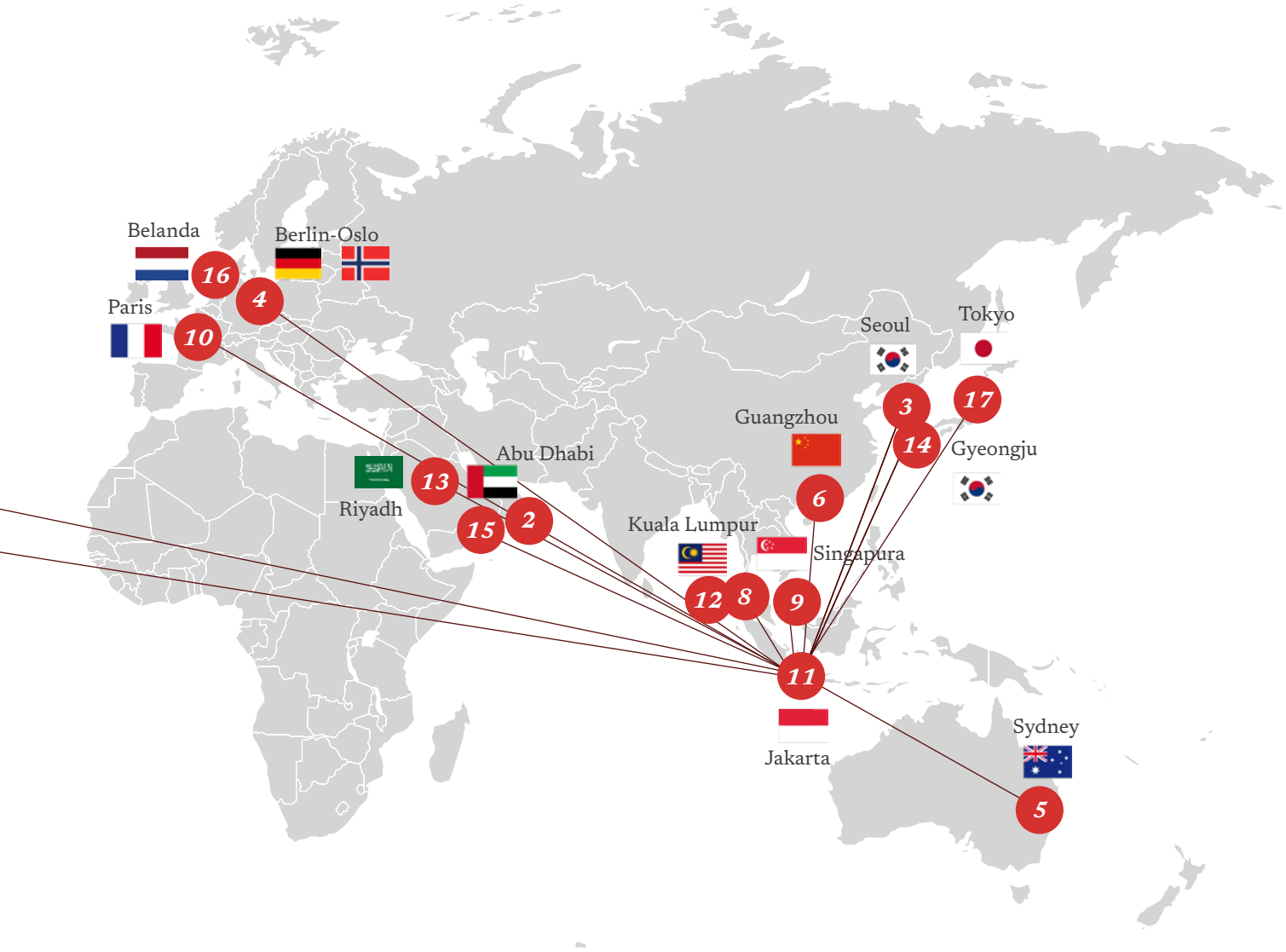


## Kerja Sama Investasi Global & Kolaborasi Internasional

Sepanjang tahun pertama, Danantara Indonesia memperluas kerja sama global melalui berbagai forum internasional, pertemuan strategis, serta penandatanganan kerja sama dengan mitra dari berbagai negara. Upaya ini memperkuat posisi Danantara Indonesia agar terhubung dengan ekosistem investasi global, pertukaran pengetahuan, dan investasi untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional, termasuk membuka peluang kerja sama baru bagi BUMN.

**Nota Kesepahaman (MoU) Internasional**

Danantara Indonesia menandatangani 11 (sebelas) nota kesepahaman strategis untuk menyalurkan investasi global, keahlian, dan teknologi ke sektor-sektor prioritas Indonesia. Detail lebih lanjut dapat dilihat di bagian Peristiwa Penting.



| No | Acara \| Lokasi | Tanggal | Nilai bagi Danantara Indonesia |
|---|---|---|---|
| 1 | Milken Institute Global Conference<br>**Los Angeles** | 4-7 Mei | Membuka akses ke komunitas *capital allocators* dan *thought leaders global*, sekaligus memperkenalkan Danantara Indonesia sebagai *institutional platform* Indonesia untuk investasi jangka panjang. |
| 2 | Formalisasi Kerja Sama dengan ADQ<br>**Abu Dhabi** | 17 Juni | Memperkuat *credibility signalling* Danantara Indonesia di mata *sovereign and strategic investors*, dan mengubah hubungan bilateral menjadi *platform* kerja sama konkret. |
| 3 | Korea *Engagement Trip*<br>**Seoul** | 21-22 Agustus | Membangun kanal korporasi Korea untuk peluang investasi dan kemitraan industri yang relevan dengan agenda hilirisasi dan transformasi BUMN. |
| 4 | Indo-Europe Business Forum<br>**Berlin-Oslo** | 3-9 September | Menempatkan Danantara Indonesia dalam narasi Indonesia Inc. di Eropa dan memperluas akses ke *government-linked counterparts* serta investor korporat. |
| 5 | Australia *Engagement Trip*<br>**Sydney** | 8-10 September | Memperkuat basis kerja sama di sektor prioritas Danantara Indonesia, sekaligus menghubungkan agenda investasi Danantara Indonesia dengan keunggulan Australia di pangan, energi, dan iklim. Menjadi langkah awal pembahasan MoU dengan Pemerintah Australia. |
| 6 | Guangzhou Business Conference<br>**Guangzhou** | 20-23 September | Membuka akses ke ekosistem industri Tiongkok dan memperkuat posisi Danantara Indonesia dalam kanal investasi Asia Timur. |
| 7 | Sidang Majelis Umum PBB ke-80<br>**New York** | 22-24 September | Meningkatkan visibilitas kelembagaan Danantara Indonesia pada panggung multilateral dan memperkuat koneksi dengan pemangku kepentingan di bidang kebijakan dan pembangunan. |
| 8 | Canada-ASEAN Business Forum<br>**Kuala Lumpur** | 24-25 September | Memperluas konektivitas Danantara Indonesia ke investor Kanada dan jejaring ASEAN, guna meningkatkan peluang bisnis regional dan multilateral. |
| 9 | Milken Asia Summit<br>**Singapura** | 1-3 Oktober | Mengonsolidasikan hubungan dengan investor dan *allocators* Asia, dan meningkatkan *visibility* Danantara Indonesia di pusat keuangan regional. |
| 10 | OPSWF Annual Summit<br>**Paris** | 21-22 Oktober | Memperkuat kredibilitas Danantara Indonesia dalam agenda *responsible investment* dan transisi energi, serta membangun hubungan dengan sesama *sovereign investors*. |
| 11 | Kunjungan Kenegaraan Presiden Afrika Selatan<br>**Jakarta** | 24 Oktober | Menerjemahkan momentum diplomatik tingkat tinggi menjadi peluang kerja sama ekonomi yang lebih konkret untuk Danantara Indonesia dan ekosistem BUMN. |
| 12 | 47th ASEAN Leaders Summit<br>**Kuala Lumpur** | 25-28 Oktober | Memperkuat posisi Danantara Indonesia sebagai platform Indonesia untuk kerja sama investasi di kawasan ASEAN. |
| 13 | Future Investment Initiative<br>**Riyadh** | 27-30 Oktober | Menempatkan Danantara Indonesia dalam arus utama percakapan investasi global dan membuka jalur komunikasi dengan investor strategis Timur Tengah. |
| 14 | 4th APEC ABAC Meeting<br>**Gyeongju** | 28-31 Oktober | Memperluas jejaring Danantara Indonesia pada kanal bisnis APEC dan meningkatkan peran Danantara Indonesia sebagai mitra dan platform utama bisnis di negara-negara APEC. |
| 15 | IFSWF Annual Meeting<br>**Abu Dhabi** | 29-31 Oktober | Memperkuat legitimasi kelembagaan Danantara Indonesia sebagai *sovereign investment institution* dan mendukung agenda peningkatan standar tata kelola internasional. Sebagai langkah utama upaya pemenuhan standar tata kelola Santiago Principle. |
| 16 | Netherlands Engagement & Renewables<br>**Belanda** | 24-27 November | Membangun *pipeline* kerja sama di bidang energi bersih, sekaligus menghubungkan agenda investasi Danantara Indonesia dengan teknologi dan kapabilitas Eropa. |
| 17 | Indonesia Day (MUFG)<br>**Tokyo** | 4-5 Desember | Memperkuat kanal Jepang sebagai sumber modal dan mitra industri, serta memperdalam kepercayaan investor terhadap Indonesia dan Danantara Indonesia. |

## Kemitraan Strategis dengan DPR RI

DPR RI merupakan pemangku kepentingan kunci dalam memastikan akuntabilitas, legitimasi, serta keselarasan arah strategis Danantara Indonesia dengan mandat konstitusional. Melalui fungsi pengawasan terhadap investasi negara dan BUMN, DPR RI memastikan setiap kebijakan serta keputusan investasi berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang demi kemakmuran rakyat.

Sejak ditetapkan sebagai mitra kerja Komisi VI dan Komisi XI DPR RI, Danantara Indonesia secara konsisten membangun keterlibatan yang terstruktur dan substansial. Komisi VI DPR RI dalam kaitannya dengan pengelolaan Holding Operasional, sementara Komisi XI DPR RI dalam kaitannya dengan BPI Danantara dan pengelolaan Holding Investasi, termasuk pelaksanaan penugasan negara untuk memastikan kelancaran distribusi barang/jasa bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga/ekonomi.

Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban tata kelola, interaksi ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan keselarasan antara arah kebijakan perusahaan, prioritas pembangunan nasional, serta kepentingan publik.

## Konsultasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP): Menjaga Keselarasan Strategi dan Kepentingan Nasional

Danantara Indonesia secara aktif melaksanakan konsultasi RKAP dengan DPR RI sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam pengelolaan investasi negara. Ketentuan ini diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang memberikan kewenangan kepada BPI Danantara untuk mengesahkan serta mengonsultasikan rencana kerja dan anggaran perusahaan DAM dan DIM kepada DPR RI.

Sepanjang tahun 2025, konsultasi RKAP DAM dilaksanakan bersama Komisi VI dan RKAP DIM dilaksanakan bersama Komisi XI DPR RI, dengan fokus pada pembahasan rencana kerja dan peta jalan pengembangan masing-masing *holding*. Forum ini menjadi sarana utama untuk memastikan bahwa strategi investasi, prioritas program, serta penguatan tata kelola tetap selaras dengan agenda pembangunan nasional dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

## Rapat Dengar Pendapat (RDP): Memperkuat Akuntabilitas Publik

Partisipasi Danantara Indonesia dalam RDP merupakan pilar utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Melalui forum ini, Danantara Indonesia menyampaikan perkembangan kinerja, arah kebijakan investasi, serta respons terhadap isu-isu strategis nasional. Keterlibatan dalam forum ini mencerminkan komitmen Danantara Indonesia dalam memperkuat akuntabilitas publik serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## Koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L)

Koordinasi dengan K/L merupakan elemen penting dalam memastikan keselarasan kebijakan, sinkronisasi strategi, serta efektivitas implementasi mandat Danantara Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Danantara Indonesia secara aktif membangun komunikasi strategis dengan berbagai K/L melalui forum koordinasi yang terstruktur, untuk membahas arah kebijakan, penguatan tata kelola, optimalisasi portofolio BUMN, serta dukungan terhadap pelaksanaan penugasan negara, termasuk *Public Service Obligation (PSO)*.

Dalam konteks yang lebih luas, koordinasi ini juga mencakup kolaborasi lintas sektor untuk mendukung beberapa agenda strategis nasional, termasuk partisipasi dalam forum internasional, penguatan peran BUMN dalam respons terhadap bencana di Indonesia, serta pelaksanaan aktivitas sosial dan pengembangan infrastruktur. Pendekatan kolaboratif ini menjadi fondasi dalam memastikan bahwa kebijakan dan implementasi program berjalan secara terpadu, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

# Transformasi BUMN melalui Danantara Asset Management



Transformasi BUMN bertumpu pada penguatan tata kelola, disiplin pengelolaan, dan peningkatan daya saing. Melalui pembenahan yang konsisten, Danantara Indonesia berkomitmen mengembangkan BUMN menjadi perusahaan yang tangguh dan mampu menggerakkan perekonomian Indonesia.

Danantara Indonesia

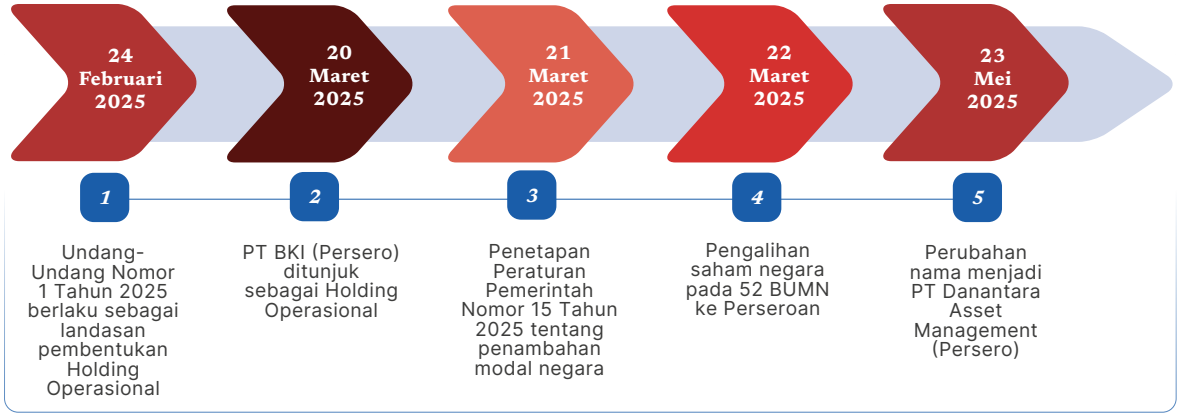


04



PT Danantara Asset Management (Persero) (“DAM”) didirikan oleh BPI Danantara sebagai tindak lanjut langsung dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Pendirian DAM berawal dari penetapan PT BKI sebagai Holding Operasional pada 20 Maret 2025 dan pada 23 Mei 2025 berganti nama menjadi PT Danantara Asset Management (Persero). DAM dibentuk dengan mandat utama untuk mengoptimalkan pengelolaan aset yang tersimpan dalam portofolio BUMN, sekaligus mendorong transformasi korporasi secara menyeluruh.

**Kronologi Singkat Pembentukan DAM**




# Tugas dan Fungsi

Tujuan pembentukannya mencakup tiga dimensi strategis:

1. Meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN secara kolektif melalui pengelolaan yang terintegrasi dan profesional.
2. Menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.
3. Memastikan seluruh kinerja BUMN selaras dengan agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam visi Asta Cita khususnya dalam hal akselerasi industrialisasi, penguatan ketahanan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

## Program Transformasi BUMN

Indonesia memiliki portofolio BUMN yang luas dan beragam, dengan peran strategis yang melekat pada hampir setiap sektor perekonomian nasional. Di balik luasnya portofolio tersebut, terdapat ruang yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang lebih jauh. Pemetaan awal yang dilakukan oleh DAM menunjukkan bahwa ~95% kontribusi laba bersih dan ~97% dividen Danantara Indonesia berasal dari delapan BUMN teratas. Pola ini menyiratkan adanya potensi yang belum sepenuhnya tergali pada entitas-entitas lain dalam portofolio, sebuah peluang yang patut dioptimalkan agar nilai yang dihasilkan dapat lebih merata dan berkelanjutan.

Pemahaman ini diperkaya oleh hasil evaluasi kinerja tahun buku 2024, yang menunjukkan bahwa sebagian BUMN beserta entitas anaknya masih menghadapi tantangan profitabilitas, dengan total inefisiensi yang teridentifikasi mencapai Rp50 triliun. Sebagian besar tantangan ini berakar pada hal-hal yang bersifat struktural, seperti proses bisnis yang berlapis, pendekatan antarentitas yang masih belum efisien, serta perlunya kerangka rencana bisnis dan *roadmap* yang lebih terarah.

Refleksi atas kondisi tersebut menjadi pijakan yang menumbuhkan keyakinan bahwa transformasi adalah sebuah keniscayaan, bukan sebagai respons terhadap persoalan yang dihadapi, melainkan sebagai langkah strategis untuk membuka potensi penuh BUMN sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus instrumen penciptaan nilai jangka panjang bagi negara.

## Tahapan Transformasi Pengelolaan Portofolio BUMN

Berangkat dari pemahaman tersebut, transformasi BUMN di bawah pengelolaan DAM dilaksanakan melalui peta jalan lima (5) fase yang berlangsung dari 2025 hingga 2030. Peta jalan tersebut disusun secara bertahap untuk membangun BUMN sebagai perusahaan berkelas dunia yang sehat secara finansial, dikelola secara profesional, serta mampu bersaing di tingkat regional dan global.




1. Fase pertama, ***Restructuring and Consolidation (2025-2026)***, penataan portofolio dan konsolidasi entitas untuk membangun struktur yang lebih jelas, sehat, dan efektif. Tujuannya bukan semata-mata mengurangi jumlah entitas, melainkan memastikan setiap perusahaan memiliki peran yang jelas, fokus bisnis yang tepat, serta kemampuan untuk memberikan kontribusi optimal bagi portofolio. Proses tersebut diawali dengan *Fundamental Business Review* terhadap BUMN dalam portofolio DAM. Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kondisi keuangan, prospek industri, posisi kompetitif, skala usaha, kualitas layanan, produktivitas, kapabilitas organisasi, dan relevansi strategis setiap perusahaan.

2. Fase kedua, ***People and Corporate Culture* (2027)**, fokus pada pengembangan talenta yang profesional, produktif, dan adaptif serta pembangunan budaya kerja berbasis kinerja. Perubahan struktur tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak disertai dengan penguatan cara kerja. Organisasi yang telah ditata memerlukan pemimpin yang mampu mengambil keputusan, talenta dengan kapabilitas yang relevan, serta budaya yang mendorong kinerja dan akuntabilitas.

3. Fase ketiga, ***Innovation through Technology* (2028)**, memanfaatkan teknologi, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*/AI), analitik data, dan otomasi sebagai akselerator untuk meningkatkan efektivitas operasional serta mengembangkan cara

baru dalam menjalankan bisnis BUMN. Pada tahap ini, teknologi tidak lagi diposisikan sebagai pendukung administratif semata, tetapi sebagai instrumen strategis yang membentuk cara BUMN beroperasi, mengambil keputusan, dan melayani pelanggan.

4. Fase keempat, ***Value Creation* (2029)**, merupakan tahap ketika fondasi yang dibangun pada fase sebelumnya diharapkan mulai menghasilkan nilai yang lebih nyata. Restrukturisasi portofolio, penguatan kualitas talenta dan budaya perusahaan, serta pemanfaatan teknologi diharapkan tercermin dalam peningkatan kinerja operasional, profitabilitas, dan valuasi BUMN.

5. Fase kelima, ***World-Class Corporation (2030)***, diarahkan untuk membentuk BUMN unggulan Indonesia sebagai perusahaan berkelas dunia yang memiliki skala, kapabilitas, tata kelola, dan daya saing setara dengan perusahaan global terkemuka di industrinya masing-masing. Menjadi perusahaan berkelas dunia tidak hanya ditentukan oleh posisi dalam pemeringkatan internasional. Perusahaan berkelas dunia juga harus mampu menciptakan nilai secara konsisten, menarik dan mengembangkan talenta terbaik, memanfaatkan teknologi, mengelola risiko, serta mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Kelima fase ini dirancang sebagai sebuah perjalanan yang saling terhubung: dimulai dari pemahaman yang mendalam atas kondisi setiap entitas untuk menentukan penataan strategis BUMN, dilanjutkan dengan pengembangan talenta yang profesional dan berdaya saing global, pemanfaatan teknologi sebagai instrumen strategis, dilanjutkan pada penciptaan nilai yang berkelanjutan, dan pada akhirnya untuk membentuk BUMN yang berkelas global dan terdepan di setiap lininya.

Melalui kerangka ini, DAM menapaki sebuah proses transformasi yang utuh dan terukur, sebuah perjalanan untuk menghadirkan BUMN yang lebih sehat, lebih sinergis, dan lebih berdaya saing, sejalan dengan cita-cita besar Indonesia dalam membangun perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan.

## Kebijakan Dividen

Manajemen dividen merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, terutama bagi DAM dan BUMN. Kebijakan dividen yang tepat tidak hanya mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan, tetapi juga memengaruhi persepsi investor dan mendukung tujuan strategis jangka panjang.

Pada tingkat entitas, keputusan dividen spesifik untuk BUMN tertentu pada prinsipnya ditentukan oleh BPI Danantara melalui konsultasi dengan BP BUMN selaku pemegang saham Seri A.

Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan kebijakan dividen bagi DAM:

1) **Profitabilitas BUMN**
   Profitabilitas yang konsisten menunjukkan kinerja operasional yang baik dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
2) **Kemampuan Kas dan Likuiditas**
   Perseroan harus memastikan bahwa mereka memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendukung operasional sehari-hari sebelum membagikan dividen.
3) **Kebutuhan Pendanaan Perusahaan (termasuk BPI Danantara, Perseroan, dan DIM)**
   Perseroan mungkin perlu menahan sebagian laba untuk mendanai proyek-proyek strategis yang dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa depan, termasuk kebutuhan yang terkait dengan pengelolaan BUMN yang menjadi anak perusahaan DAM.
4) **Pemenuhan *Covenant***
   Perseroan harus memastikan bahwa kebijakan dividen tidak melanggar *covenant* atau perjanjian dengan kreditur.
5) **Kepatuhan terhadap Regulasi yang Berlaku**
   Kebijakan dividen harus mematuhi semua regulasi yang berlaku, termasuk peraturan dari otoritas pasar modal dan peraturan perpajakan.
6) **Program Strategis Pemerintah**
   Sebagai BUMN, perusahaan juga harus mempertimbangkan program strategis pemerintah yang dijalankan baik di DAM maupun di BUMN yang menjadi anak perusahaan DAM.
7) **Penataan dan Penyehatan serta Perbaikan Perencanaan Strategis BUMN**
   Kebijakan dividen juga harus mendukung upaya penataan dan penyehatan BUMN serta perbaikan perencanaan strategis. Ini termasuk restrukturisasi, efisiensi operasional, dan inisiatif transformasi yang dapat meningkatkan daya saing dan kinerja jangka panjang perusahaan.
8) **Aspirasi Pemegang Saham**
   Dalam menetapkan dan mengusulkan target dividen baik yang dibayarkan oleh DAM maupun BUMN, maka akan disesuaikan dengan aspirasi yang diharapkan dan kebijakan dividen yang diterbitkan oleh Pemegang Saham.

# Program dan Proyek Strategis

## Tiga *Workstream* untuk Mewujudkan Transformasi Di 2025

Keseluruhan proyek dikelompokkan ke dalam tiga (3) *workstream* yang merepresentasikan tahap awal hingga tahap operasionalisasi dari perjalanan transformasi yang telah dirancang.

*Workstream* pertama, **Restrukturisasi Keuangan dan Bisnis**, mencakup 4 (empat) proyek penyehatan fundamental pada BUMN yang menghadapi tantangan struktural keuangan, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda Indonesia"), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("Krakatau Steel"), PT Kereta Cepat Indonesia China ("KCIC"), serta tiga BUMN Asuransi (PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo"), PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") dan PT ASABRI (Persero) ("Asabri"). Inisiatif pada tahap ini mencerminkan komitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar terlebih dahulu, sehingga transformasi dapat berjalan di atas fondasi yang lebih kokoh.




*Workstream* kedua, ***Streamlining* dan Konsolidasi Bisnis**, terdiri dari 9 (sembilan) proyek yang berfokus pada penataan portofolio melalui konsolidasi entitas-entitas BUMN dengan bidang usaha sejenis. Inisiatif ini mencakup konsolidasi manajemen aset, asuransi, dan perhotelan; *refocusing* bisnis PT Danareksa (Persero) ("Danareksa"); *streamlining* bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Pupuk Indonesia") beserta tata kelola pupuk bersubsidi; konsolidasi manajemen portofolio rumah sakit BUMN melalui PT Pertamina Bina Medika IHC ("IHC"); konsolidasi bisnis gula antara PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN") dan PT Rajawali Nusantara Indonesia ("IDFOOD"); *streamlining* bisnis hilir PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"); hingga integrasi BUMN Karya yang proyeknya dilanjutkan di periode 2026. Melalui tahap ini, struktur portofolio diarahkan menjadi lebih ramping, lebih sinergis, dan lebih fokus pada bidang usaha yang menjadi keunggulan masing-masing entitas.



*Workstream* ketiga, **Implementasi Perjalanan Transformasi**, mencakup 8 (delapan) proyek yang menyasar transformasi pada tataran operasional dan model bisnis. Termasuk di dalamnya adalah transformasi PT Bank Syariah Indonesia ("BSI"); transformasi bisnis galangan kapal, operasionalisasi PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) ("Agrinas Palma"), PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) ("Agrinas Jaladri") dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) ("Agrinas Pangan"); konsolidasi bisnis *fiber optic*, *data center*, dan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (“Mitratel”); restrukturisasi PT Industri Baterai Indonesia (“IBC”); restrukturisasi dan transformasi PT Semen Indonesia (Persero) (“SIG”). Melalui inisiatif-inisiatif ini, BUMN didorong untuk memperkuat daya saing, memperkaya model bisnis, dan menjawab kebutuhan strategis nasional di berbagai sektor.



Sejumlah proyek inisiatif tersebut menandakan transformasi bisnis dilakukan dengan konkret dan menyentuh sektor-sektor strategis seperti keuangan, energi, kesehatan, pangan, transportasi, manufaktur dan lain-lain. Cakupan yang luas ini sekaligus menggambarkan dedikasi DAM untuk menghadirkan dampak transformasi yang merata, sebagai bekal menuju penciptaan nilai jangka panjang yang menjadi muara dari seluruh perjalanan ini.

## Inisiatif Transformasi BUMN: Penguatan Struktur Garuda Indonesia

Sebagai wujud transformasi di sektor transportasi, pada tahun 2025 Danantara Indonesia melalui DAM memberikan penguatan struktur keuangan kepada Garuda Indonesia senilai Rp23,67 triliun. Penguatan tersebut terdiri dari setoran modal tunai sebesar Rp17,02 triliun serta konversi *shareholder loan* sebesar Rp6,65 triliun menjadi ekuitas sebagai bagian dari upaya penyehatan fundamental perusahaan pascarestrukturisasi.

Pendanaan tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperkuat kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga mendukung pemulihan kesiapan operasional Garuda Indonesia secara menyeluruh. Sebagian pendanaan dimanfaatkan untuk kebutuhan *maintenance*, *repair, and overhaul* (MRO) armada guna mengembalikan pesawat yang sebelumnya *grounded* agar dapat kembali beroperasi, sehingga meningkatkan reliabilitas layanan dan kapasitas operasional perusahaan. Dukungan ini juga digunakan untuk pemenuhan *working capital* operasional Garuda Indonesia dan Citilink, penyelesaian kewajiban operasional strategis, serta peningkatan *service readiness* guna memastikan kualitas layanan penerbangan tetap terjaga.

Transformasi yang dijalankan dilakukan secara bertahap dan adaptif dengan mempertimbangkan dinamika industri penerbangan global. Pendekatan ini bertujuan memperkuat daya saing Garuda Indonesia sekaligus meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan transformasi Garuda Indonesia telah memberikan sejumlah dampak positif pada sisi operasional. Pada posisi Desember 2025, Garuda Indonesia telah berhasil menyelesaikan 30 *Maintenance Event* dan 56 *Maintenance Event* pada Citilink. Capaian tersebut membuat Garuda Indonesia mampu mempertahankan *serviceability* (tingkat kesiapan operasional armada) pada tahun 2025 yaitu sebanyak 59 pesawat. Sementara itu, Citilink berhasil melakukan reaktivasi 15 pesawat, sehingga pada akhir tahun 2025 Citilink mampu mempertahankan *serviceability* (tingkat kesiapan operasional armada) sebanyak 39 pesawat. Jumlah ini diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan perbaikan yang dilakukan pada internal perusahaan secara komprehensif dan terukur.

Melalui penguatan tersebut, Garuda Indonesia diharapkan mampu mempercepat transformasi menjadi maskapai yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing global, sekaligus memberikan *multiplier effect* terhadap sektor pariwisata, logistik, dan perekonomian nasional secara lebih luas. Langkah ini mencerminkan pendekatan Danantara Indonesia dalam menjalankan mandat transformasi BUMN, yaitu tidak hanya melalui restrukturisasi keuangan, tetapi juga melalui penguatan tata kelola, fokus bisnis, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi negara dan masyarakat.




## Inisiatif Transformasi BUMN: Dukungan Pendanaan Krakatau Steel

Di sektor industri, pada Desember 2025 Danantara Indonesia melalui DAM, memberikan dukungan pendanaan kepada Krakatau Steel melalui fasilitas *shareholder loan* senilai Rp4,93 triliun untuk memperkuat restrukturisasi dan pemulihan fundamental bisnis perusahaan. Dukungan tersebut terdiri dari fasilitas modal kerja sebesar Rp4,18 triliun dan pendanaan program efisiensi sebesar Rp752,8 miliar.

Pendanaan tersebut diarahkan untuk memperkuat likuiditas dan menjaga keberlangsungan operasional inti baja nasional, termasuk pengadaan bahan baku untuk fasilitas *Hot Strip Mill* (HSM), *cold rolled coil* (CRC), serta mendukung operasional manufaktur pipa baja. Selain itu, dukungan transformasi juga dimanfaatkan untuk menjalankan program efisiensi perusahaan, penataan sumber daya manusia, serta mendukung keberlanjutan program restrukturisasi utang perusahaan.

Melalui penguatan tersebut, Krakatau Steel berhasil mencatatkan perbaikan kinerja pada 2025, termasuk peningkatan volume penjualan baja, penguatan struktur ekuitas, serta penurunan liabilitas perusahaan. Transformasi ini sekaligus memperkuat kesiapan Krakatau Steel dalam meningkatkan utilisasi produksi dan mendukung penguatan industri baja nasional sebagai bagian dari agenda hilirisasi dan industrialisasi Indonesia.

Dukungan terhadap Krakatau Steel mencerminkan pendekatan Danantara Indonesia dalam menjalankan mandat transformasi BUMN, yaitu tidak hanya melalui penguatan keuangan, tetapi juga melalui pembenahan operasional, peningkatan efisiensi, penguatan daya saing industri nasional, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.



## Inisiatif Transformasi BUMN: Konsolidasi Bisnis Hilir Pertamina

Transformasi bisnis hilir Pertamina diarahkan pada integrasi kegiatan pengolahan, distribusi dan logistik, serta pemasaran dan perdagangan dalam satu rantai nilai *downstream* yang lebih terintegrasi. Melalui penerapan *Value Chain Optimization* (VCO), integrasi tersebut memungkinkan pengambilan keputusan produksi maupun impor (*make or buy*) secara lebih terpadu, optimalisasi pemanfaatan aset dan infrastruktur, serta peningkatan efisiensi rantai pasok. Implementasi integrasi ini diproyeksikan dapat menurunkan biaya operasional dari sekitar USD30,43/KL menjadi USD25,29/KL, seiring dengan realisasi sinergi operasional.

Selain meningkatkan efisiensi, konsolidasi bisnis hilir juga diarahkan untuk memperkuat kinerja dan keberlanjutan bisnis Pertamina melalui sinergi antara bisnis *Refinery & Petrochemical*, *Commercial & Trading*, dan *Integrated Marine Logistics*. Sinergi dan optimalisasi lintas bisnis tersebut diproyeksikan dapat memberikan peningkatan *Net Profit After Tax* (NPAT) hingga USD422 juta, sekaligus mendorong utilisasi aset yang lebih optimal dan peningkatan margin komersial. Penguatan rantai nilai secara *end-to-end* tersebut diharapkan turut memperkuat ketahanan rantai pasok serta kemampuan Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi nasional.



**Inisiatif Transformasi BUMN Lainnya di Tahun 2025**

Selain Garuda Indonesia, Krakatau Steel, dan Pertamina, DAM juga memberikan dukungan penuh kepada Agrinas Pangan untuk mendukung operasionalisasi perusahaan yang sejalan dengan program ketahanan pangan yang diinisiasi Pemerintah Indonesia. Langkah penyehatan perusahaan juga dilakukan oleh DAM kepada Bio Farma Group, khususnya Kimia Farma. Hal ini dilakukan untuk menjaga fundamental bisnis BUMN sektor farmasi agar tetap sehat dan kembali kokoh.



# Penerapan Tata Kelola

Sebagai bagian dari pelaksanaan mandatnya, DAM terus memperkuat tata kelola untuk mendukung pengelolaan BUMN yang akuntabel, terarah, dan berorientasi pada penciptaan nilai berkelanjutan. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk membangun fondasi tata kelola yang semakin kuat, modern, dan selaras dengan praktik terbaik internasional. Fokus utama tidak hanya pada pencapaian kinerja, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan, proses, dan pengelolaan sumber daya dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dalam konteks tersebut, DAM menjalankan *Governance Reset* yang merupakan penataan ulang secara mendasar terhadap cara BUMN dikelola, diawasi, dan dievaluasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap BUMN dalam portofolio beroperasi di atas kerangka tata kelola yang setara dengan praktik terbaik internasional, sehingga mampu mendukung pencapaian transformasi yang lebih luas.

*Governance Reset* mencakup beberapa pilar utama:

1. **Penajaman peran *shareholder*:** Danantara Indonesia menjalankan peran *active shareholder* yang mengarahkan strategi portofolio sekaligus memberi ruang otonomi operasional yang memadai bagi manajemen BUMN.
2. **Pembaruan kerangka KPI**: Mengadopsi ukuran kinerja yang lebih berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang, seperti *return on equity*, *return on capital employed*, dan indikator-indikator finansial kelas dunia lainnya, bukan sekadar pencapaian target tahunan jangka pendek.
3. **Penguatan struktur kepemimpinan**: Melalui proses seleksi, evaluasi, dan pengangkatan yang berbasis kompetensi, struktur Dewan Komisaris dan Direksi lebih memperhatikan profesionalisme dan independensi.
4. **Penerapan kerangka manajemen risiko terintegrasi**: Risiko dikelola secara portofolio dan tidak hanya pada tingkat entitas individual.
5. **Pemisahan antara tujuan komersial dan penugasan publik**: Pemisahan yang jelas dilakukan agar BUMN tetap dapat menjalankan mandat strategisnya tanpa mengaburkan penilaian kinerja komersialnya.
6. **Penyelarasan standar transparansi dan pelaporan**: Mengadopsi praktik *holding* investasi global yang mencakup ukuran finansial, ESG, dan dampak strategis bagi perekonomian nasional.



> DAM menjalankan *Governance Reset* yang merupakan penataan ulang secara mendasar terhadap cara BUMN dikelola, diawasi, dan dievaluasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap BUMN dalam portofolio beroperasi di atas kerangka tata kelola yang setara dengan praktik terbaik internasional, sehingga mampu mendukung pencapaian transformasi yang lebih luas.

Dengan kerangka *Governance Reset* ini, DAM memposisikan diri bukan hanya sebagai pengelola portofolio, melainkan sebagai pengelola yang menjamin BUMN dikelola dengan disiplin, akuntabilitas, dan visi jangka panjang yang konsisten.

### Penyelarasan standar tata kelola BUMN

Salah satu langkah penting yang terus diperkuat adalah penyelarasan standar tata kelola BUMN. Melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, berbagai perusahaan didorong untuk menerapkan standar yang konsisten dalam aspek pengawasan, manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian internal, serta pelaporan kinerja. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kualitas tata kelola yang semakin merata dan berkelanjutan di seluruh ekosistem.

Penguatan tata kelola juga tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kapasitas organisasi dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN. Kompetensi, profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa tata kelola tidak hanya diterapkan sebagai kerangka formal, tetapi juga tercermin dalam cara BUMN mengambil keputusan, mengelola risiko, dan menjalankan mandat strategisnya.

### Peningkatan kepemimpinan BUMN

Di bidang kepemimpinan BUMN, penguatan juga dilakukan melalui peningkatan kualitas evaluasi kinerja dan pengawasan korporasi. Proses tersebut terus disempurnakan agar sejalan dengan kebutuhan bisnis yang semakin dinamis, ekspektasi pemangku kepentingan, serta tuntutan atas pengelolaan BUMN yang semakin profesional, responsif, dan bertanggung jawab.

### Peningkatan kualitas transparansi

Penguatan tata kelola juga tercermin melalui peningkatan kualitas transparansi dan pelaporan. Informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan diarahkan untuk semakin komprehensif, relevan, dan mudah dipahami, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik serta memperkuat kepercayaan publik dan investor.

### Penciptaan nilai

Pada saat yang sama, DAM mendorong penguatan budaya pengelolaan BUMN yang berorientasi pada penciptaan nilai. Pengukuran kinerja BUMN tidak hanya mempertimbangkan pencapaian target jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kualitas pertumbuhan, efisiensi pemanfaatan modal, pengelolaan risiko, keberlanjutan usaha, kontribusi strategis terhadap pembangunan nasional, serta kematangan tata kelola sebagai faktor yang mendukung kualitas pengambilan keputusan, efektivitas pengawasan, dan penciptaan nilai jangka panjang.

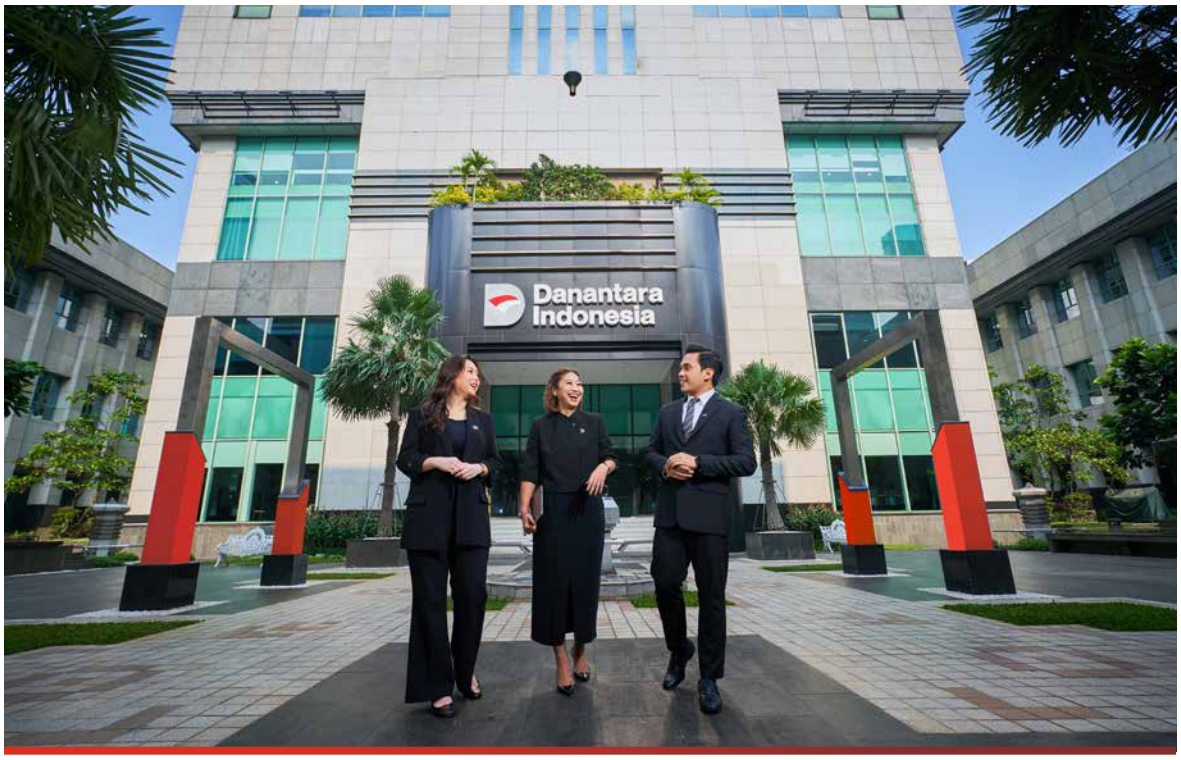


**Berbagai inisiatif yang dijalankan mencerminkan upaya membangun tata kelola BUMN yang semakin adaptif terhadap tantangan masa depan.**

# Transformasi *Human Capital*

**Dalam pengelolaan aset negara, DAM meyakini bahwa keunggulan kompetitif tidak hanya ditentukan oleh kekuatan modal maupun aset fisik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menggerakkannya. *Human capital* merupakan aset paling strategis bagi setiap BUMN dalam portofolio DAM sekaligus menjadi fondasi utama dalam penguatan tata kelola perusahaan.**

Sebagai pemegang mandat pengelolaan BUMN, DAM berperan aktif memastikan setiap entitas dalam portofolionya dipimpin oleh individu yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang unggul, tetapi juga kapasitas kepemimpinan strategis yang relevan dengan dinamika bisnis saat ini maupun tantangan masa depan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program pengembangan kepemimpinan di tingkat eksekutif, antara lain Danantara CBDO *Executive Program* bagi Direktur Pengembangan Bisnis, Danantara CRO *Executive Program* untuk Direktur Enterprise Risk Management, serta Danantara CHRO *Executive Program* guna memperkuat kapabilitas Direktur SDM dalam mengelola *human capital* di masing-masing BUMN. Selain itu, penguatan *pipeline* kepemimpinan juga dilakukan melalui *Top Talent Top Gun Program* yang ditujukan bagi talenta potensial di level BOD-1.




Melalui berbagai inisiatif tersebut, DAM tidak hanya fokus pada pengembangan kompetensi yang dibutuhkan saat ini, tetapi juga membangun kapabilitas masa depan yang selaras dengan agenda transformasi Danantara Indonesia. Pengembangan kepemimpinan menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberlanjutan kinerja dan daya saing BUMN dalam jangka panjang.

Sejalan dengan upaya penguatan kepemimpinan, DAM terus menyempurnakan proses penentuan Direksi BUMN melalui mekanisme seleksi dan asesmen yang komprehensif, terstruktur, dan terstandardisasi. Proses tersebut mencakup evaluasi menyeluruh terhadap rekam jejak profesional, kompetensi manajerial, integritas, serta kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks.

Pendekatan yang dilakukan tidak semata berorientasi pada pengisian jabatan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan strategis masing-masing perusahaan. Setiap BUMN memiliki karakteristik industri, tantangan, serta tahapan transformasi yang berbeda. Oleh karena itu, DAM memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki kapabilitas yang selaras dengan kebutuhan perusahaan, mampu membangun organisasi yang adaptif, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global.



Komitmen terhadap penguatan *human capital* berangkat dari keyakinan bahwa kualitas kepemimpinan merupakan salah satu penentu utama penciptaan nilai jangka panjang. Melalui kepemimpinan yang tepat, BUMN diharapkan mampu memperkuat kinerja, meningkatkan ketahanan organisasi dan mempercepat transformasi. Oleh karena itu, pengembangan dan penempatan talenta kepemimpinan menjadi bagian penting dari strategi dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara serta menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

# Kolaborasi Strategis

## KDKMP, KUR, Program Perumahan, dan Penanganan Bencana



Kemitraan menjadi salah satu pendekatan utama Danantara Indonesia dalam memastikan transformasi dan penciptaan nilai dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah, hingga berbagai pemangku kepentingan strategis, Danantara Indonesia berupaya memperkuat pelaksanaan program-program prioritas nasional secara lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun, DAM turut mendukung berbagai inisiatif strategis nasional, termasuk penguatan program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi, hingga penanganan bencana di Aceh dan Sumatera. Keterlibatan tersebut tidak hanya berfokus pada dukungan operasional dan pembiayaan, tetapi juga pada upaya memastikan sinergi antar-ekosistem berjalan efektif sehingga manfaat program dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dalam sektor perumahan, DAM berkolaborasi bersama dengan Pemerintah untuk mendukung program prioritas nasional yakni pembangunan 3 juta rumah, dengan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau, sekaligus memperkuat ekosistem pendukung pembangunan nasional. Sementara dalam penanganan bencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Danantara Indonesia bersama ekosistem BUMN bergerak cepat menghadirkan dukungan yang dibutuhkan masyarakat terdampak, termasuk penyediaan hunian sementara, bantuan logistik, dan dukungan sosial lainnya sebagai bagian dari komitmen menghadirkan solusi yang responsif dan humanis.



**Melalui semangat kemitraan dan gotong royong, Danantara Indonesia percaya bahwa keberhasilan transformasi tidak hanya diukur dari pencapaian bisnis dan investasi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan manfaat sosial, memperkuat ketahanan masyarakat, dan mendukung pembangunan Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.**




# Mentransformasikan Pelayanan Publik: Melayani Sepenuh Hati

Konsep Melayani Sepenuh Hati dalam Danantara Indonesia lahir dari keyakinan bahwa transformasi BUMN tidak cukup hanya dilakukan melalui restrukturisasi bisnis dan peningkatan kinerja keuangan, tetapi juga melalui perubahan cara melayani masyarakat. Program ini menjadi jiwa transformasi BUMN Indonesia (*The Transformation Soul of Indonesia's State-Owned Enterprises*), yang menempatkan pelayanan sebagai inti dari pengalaman publik terhadap BUMN.

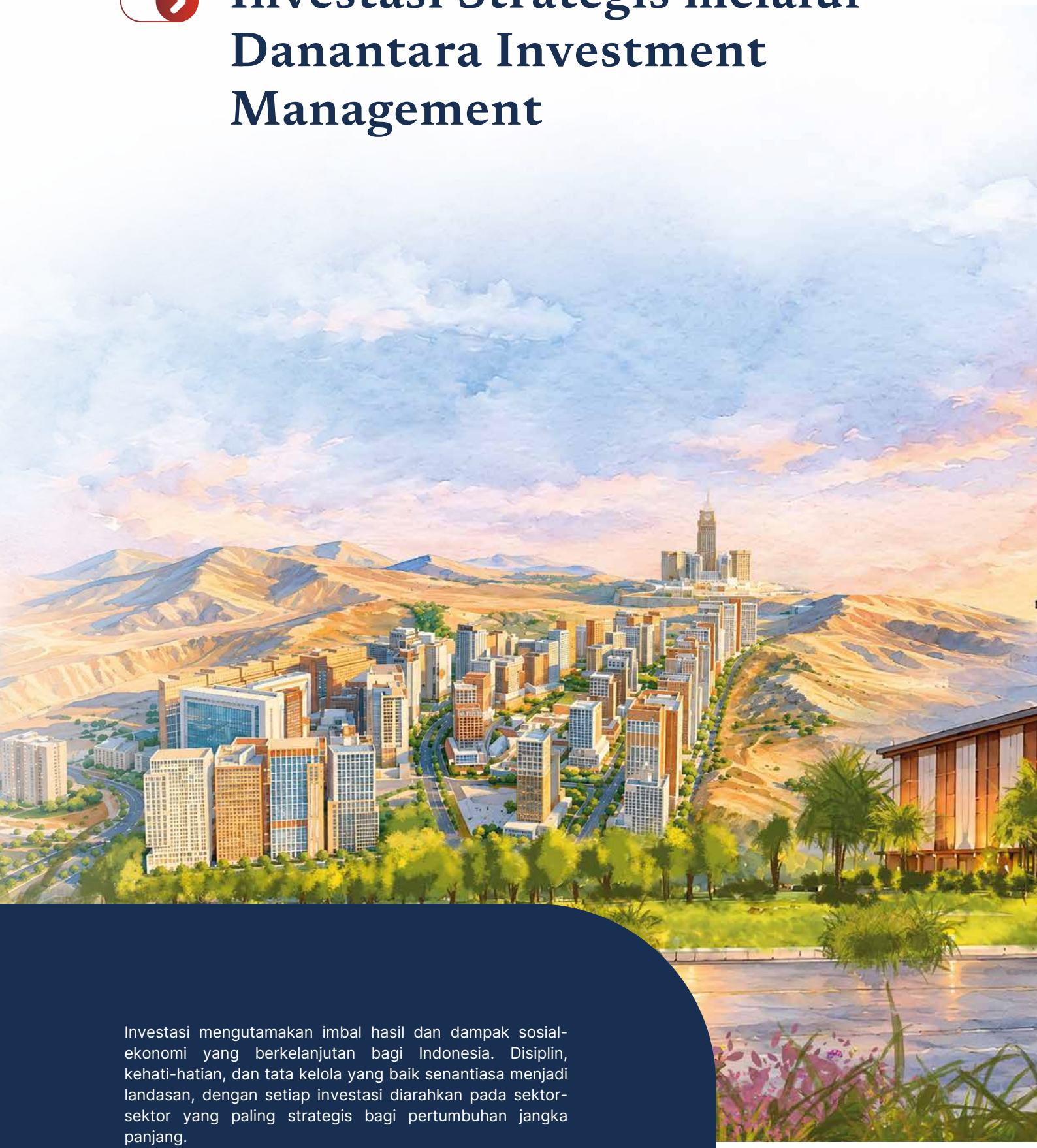
Melalui semangat "*From the heart of BUMN, for the heart of Indonesia*," Danantara Indonesia mendorong transformasi pola pikir dan budaya kerja yang berlandaskan pelayanan yang tulus, rendah hati, responsif, dan konsisten dalam menghadirkan dampak yang berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kualitas layanan, tetapi sebagai upaya membangun pengalaman menyeluruh yang dirasakan masyarakat dalam setiap interaksi dengan ekosistem BUMN.

Pelaksanaan Melayani Sepenuh Hati dilakukan melalui transformasi budaya, transformasi bisnis, dan transformasi layanan secara terintegrasi. Dalam aspek budaya, program ini diarahkan untuk membangun insan BUMN yang terinspirasi, rendah hati, bahagia, dan memiliki kapabilitas yang andal. Dalam aspek bisnis, transformasi dilakukan dengan membangun perusahaan yang lebih hangat dan profesional sehingga seluruh unit usaha dapat bergerak secara selaras mendukung tujuan besar perusahaan. Sementara dalam aspek layanan, fokus diarahkan pada penyediaan layanan yang tidak hanya memuaskan, tetapi mampu melampaui harapan masyarakat dan pelanggan.






# Investasi Strategis melalui Danantara Investment Management



Investasi mengutamakan imbal hasil dan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia. Disiplin, kehati-hatian, dan tata kelola yang baik senantiasa menjadi landasan, dengan setiap investasi diarahkan pada sektor-sektor yang paling strategis bagi pertumbuhan jangka panjang.

Danantara Indonesia




05



PT Danantara Investment Management (Persero) ("DIM") didirikan pada 28 Juli 2025 sebagai tindak lanjut langsung dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 oleh BPI Danantara untuk mengemban mandat ganda: menciptakan dampak positif ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional melalui kegiatan investasi dan menghasilkan imbal hasil berkelanjutan untuk membangun kekayaan lintas generasi (*intergenerational wealth*).

Bagi Danantara Indonesia, investasi lebih dari sekadar penempatan modal. Investasi menjadi cara untuk menentukan arah pertumbuhan yang ingin dibangun. Fokus DIM diarahkan pada pencapaian imbal hasil sekaligus menggerakkan sektor-sektor prioritas yang mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi perekonomian nasional.

**Kronologi Singkat Pembentukan DIM**



# Tugas dan Fungsi

Pada tahun pertamanya, DIM mewujudkan program-program strategis nasional melalui investasi yang menghasilkan imbal hasil positif dan dampak sosial ekonomi yang nyata. Alokasi kapital diarahkan ke sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak ekonomi signifikan, termasuk dalam mendorong hilirisasi, memperkuat ketahanan nasional, mengembangkan manufaktur domestik, meningkatkan daya saing global, dan mendorong transisi energi. Setiap keputusan investasi mempertimbangkan keseimbangan antara imbal hasil, risiko, dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Pengelolaan portofolio investasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup perencanaan dan alokasi modal, optimalisasi sumber pendanaan, serta pengembangan aset melalui berbagai instrumen investasi dan kemitraan strategis. Seluruh fungsi ini dijalankan dalam kerangka yang terintegrasi untuk memastikan setiap investasi memberikan nilai tambah yang optimal.

Dalam menjalankan perannya, DIM mengedepankan tata kelola yang kuat, transparansi, serta disiplin investasi. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh portofolio dikelola secara profesional dan akuntabel, sekaligus mampu menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi Indonesia.

## Tren yang Mendorong Arah Investasi DIM

Arah investasi DIM mempertimbangkan dinamika ekonomi global, perubahan teknologi, serta pergeseran rantai pasok. **DIM memanfaatkan tren global untuk membangun portofolio yang relevan, adaptif, dan berdaya tahan jangka panjang.**

1. Pengembangan ***Artificial Intelligence*** **(AI):** Pesatnya teknologi AI, kebutuhan energi bersih global, serta kekayaan sumber daya mineral dan energi terbarukan menciptakan peluang strategis, di mana Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing.
2. **Dinamika China+1:** Pergeseran rantai pasok mendorong relokasi produksi dan investasi ke Asia Tenggara, di mana Indonesia berada dalam posisi strategis untuk menangkap peluang ini.
3. **Transisi hijau dan ketahanan nasional:** Fokus pada infrastruktur berkelanjutan, penguatan sektor pangan, energi, dan kesehatan guna mengurangi ketergantungan impor. Di pasar publik, contoh eksposur adalah obligasi hijau dan instrumen pendapatan tetap berbasis prinsip ESG.
4. **Dinamika perdagangan global:** DIM membangun eksposur pada pasar internasional di luar Indonesia, sebagai strategi untuk meningkatkan potensi imbal hasil sekaligus memperluas diversifikasi.
5. **Disiplin makroekonomi:** Mempertimbangkan volatilitas suku bunga, inflasi, dan kondisi geopolitik, DIM menerapkan pengelolaan portofolio yang disiplin, seperti dengan menjaga keseimbangan komposisi aset dan mengalokasikan investasi pada kelas aset dengan profil risiko yang lebih stabil, termasuk infrastruktur dan kredit swasta.

Kelima tren ini menjadi dasar penyusunan investasi yang menyelaraskan dinamika global dengan kebutuhan domestik untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan.

**Perkembangan tren global membentuk arah investasi DIM**

| Tema | Tren global | Respons DIM |
|---|---|---|
| 01 Pengembangan AI | Kebutuhan pusat data dan teknologi AI tumbuh pesat | Memperkuat eksposur pada infrastruktur AI dan teknologi pendukungnya |
| 02 Dinamika China+1 | Rantai pasok bergeser ke Asia Tenggara | Menangkap peluang relokasi produksi dan investasi ke Indonesia |
| 03 Transisi Hijau dan Ketahanan Nasional | Kebutuhan energi bersih & kemandirian pasokan meningkat | Fokus pada infrastruktur berkelanjutan, pangan, energi, kesehatan, serta obligasi hijau |
| 04 Dinamika Perdagangan Global | Arus perdagangan global | Berinvestasi pada perdagangan dan distribusi serta pasar Internasional |
| 05 Disiplin Makroekonomi | Suku bunga, inflasi, dan gepolitik makin volatil | Menjaga komposisi aset, memperkuat sektor defensif, infrastruktur, dan kredit swasta |

## Strategi Investasi

DIM senantiasa menjalankan investasi secara disiplin dan terukur berdasarkan analisis mendalam. Dalam lanskap yang terus berubah, DIM membangun strategi responsif yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, ketahanan, dan keberlanjutan.

Seluruh upaya tersebut ditopang oleh lima (5) pilar strategis:

**Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi strategis**

**Menghasilkan imbal hasil berkelanjutan dan meningkatkan likuiditas nasional**

**Meningkatkan kapasitas investasi nasional**

**Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapabilitas**

**Tata kelola yang kuat dan transparan**

## Dua Segmen Investasi

Dalam membangun portofolio yang seimbang dan tangguh, DIM membagi strategi investasi ke dalam dua bidang utama: **investasi publik dan investasi privat** dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas, dan fleksibilitas. Setiap jenis investasi memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membentuk keseluruhan portofolio.

- **Investasi publik,** memberikan ruang bagi pengelolaan portofolio secara dinamis melalui instrumen yang likuid dan terdiversifikasi.
- **Investasi privat**, yang menjadi inti dalam membangun nilai jangka panjang. Investasi ini diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional.




Kedua jenis investasi ini membentuk satu kerangka yang utuh. Investasi publik menjaga fleksibilitas dan keseimbangan, sementara investasi privat membangun nilai secara mendalam. Dengan struktur ini, portofolio DIM dapat berkembang secara lebih adaptif dengan dinamika ekonomi global, serta berfokus pada penciptaan nilai berkelanjutan.

## Investasi Publik

DIM mengelola investasi publik secara terukur, disiplin, dan fleksibel. Tujuan portofolio publik adalah menghasilkan imbal hasil riil jangka panjang yang berkelanjutan dan sepadan dengan tingkat risiko yang diambil. Imbal hasil tersebut diupayakan dengan tetap menjaga likuiditas dan ketahanan portofolio melalui diversifikasi di berbagai pasar publik.

Dalam membangun portofolio investasi publik, DIM mengelola alokasi aset melalui empat (4) kelas utama yakni *equities, fixed income, liquid alternatives,* dan *cash*. Struktur ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas, dan likuiditas, sehingga portofolio dapat berkembang secara konsisten di tengah dinamika pasar. Selain berinvestasi di Indonesia, DIM juga membangun eksposur pada pasar internasional sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan potensi imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko, sekaligus memperluas diversifikasi lintas geografi dan siklus ekonomi.

### *Public Investment: Four Asset Classes*

#### *EQUITIES*

Investasi diarahkan pada perusahaan dengan fundamental yang kuat, baik di pasar domestik maupun global. Eksposur *onshore* dan *offshore* memberikan diversifikasi yang lebih luas, sekaligus membuka akses terhadap peluang di berbagai sektor dan geografi. Fokus utama berada pada kualitas bisnis, keberlanjutan laba, serta ketahanan terhadap perubahan siklus ekonomi.

#### *FIXED INCOME*

Berperan dalam menjaga stabilitas portofolio. Instrumen ini memberikan aliran pendapatan yang lebih terprediksi, sekaligus menjadi penyeimbang terhadap volatilitas dari aset berisiko. Penempatan dilakukan secara selektif, baik di pasar domestik maupun internasional, dengan mempertimbangkan tingkat imbal hasil, profil risiko, serta kondisi pasar yang berkembang.

#### *LIQUID ALTERNATIVES*

Menghadirkan dimensi tambahan dalam diversifikasi portofolio. Instrumen ini dirancang untuk memberikan eksposur yang berbeda dari aset tradisional, dengan karakteristik yang dapat membantu menjaga keseimbangan portofolio dalam berbagai kondisi pasar. Perannya menjadi penting dalam mengelola risiko secara lebih menyeluruh.

#### *CASH & SHORT-TERM INSTRUMENTS*

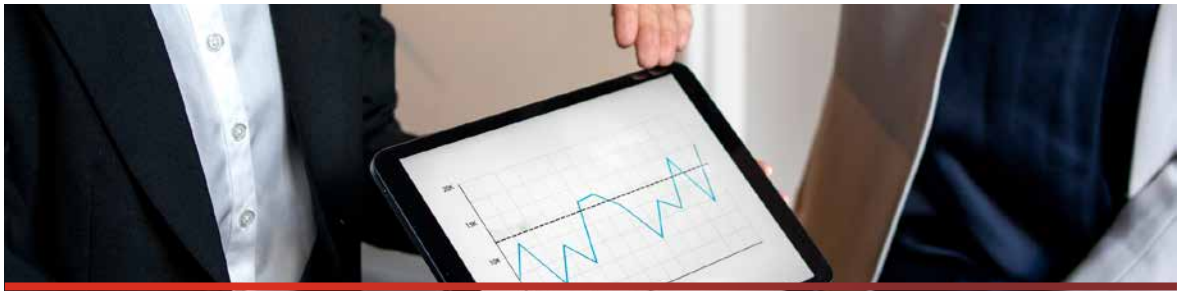
Menjadi komponen yang menjaga fleksibilitas. Likuiditas yang tersedia memberikan ruang bagi DIM untuk merespons peluang investasi secara cepat, sekaligus menjaga kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Keberadaan kas memastikan bahwa portofolio tetap memiliki daya tahan, tanpa kehilangan kemampuan untuk bergerak saat peluang muncul.

DIM menerapkan tata kelola dan pemantauan ketat dalam investasi publik. Direksi menetapkan arah strategis seperti alokasi aset, parameter risiko, dan tolok ukur, sementara Komite Investasi Publik memastikan pelaksanaan berjalan konsisten dan terukur. Proses ini diperkuat dengan pelaporan kinerja dan risiko secara berkala, audit independen, evaluasi kinerja berbasis *benchmark* dan *stress test*, serta aturan ketat terkait konflik kepentingan. Kebijakan investasi ditinjau secara berkala agar tetap relevan dengan perubahan prioritas, regulasi, dan kondisi pasar, memastikan investasi publik DIM dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam jangka panjang.

Implementasi portofolio memadukan kapabilitas internal DIM dengan manajer eksternal terpilih, dengan memanfaatkan keahlian khusus, infrastruktur, kemampuan eksekusi, serta akses pasar yang mereka miliki.

Membangun kapabilitas investasi mandiri di seluruh pasar dan kelas aset membutuhkan waktu, dan DIM menjalankannya secara terencana. Sementara itu, DIM merancang portofolio secara internal dan mengalokasikan modal kepada manajer eksternal terpilih untuk implementasi.

Tim Investasi Publik DIM mengawasi seluruh siklus investasi, mencakup perancangan mandat, alokasi modal, seleksi manajer, proses *onboarding*, hingga pemantauan berkelanjutan atas kinerja, risiko, eksposur, dan kepatuhan, sekaligus memastikan setiap mandat tetap menjalankan peran yang telah ditetapkan dalam keseluruhan portofolio.



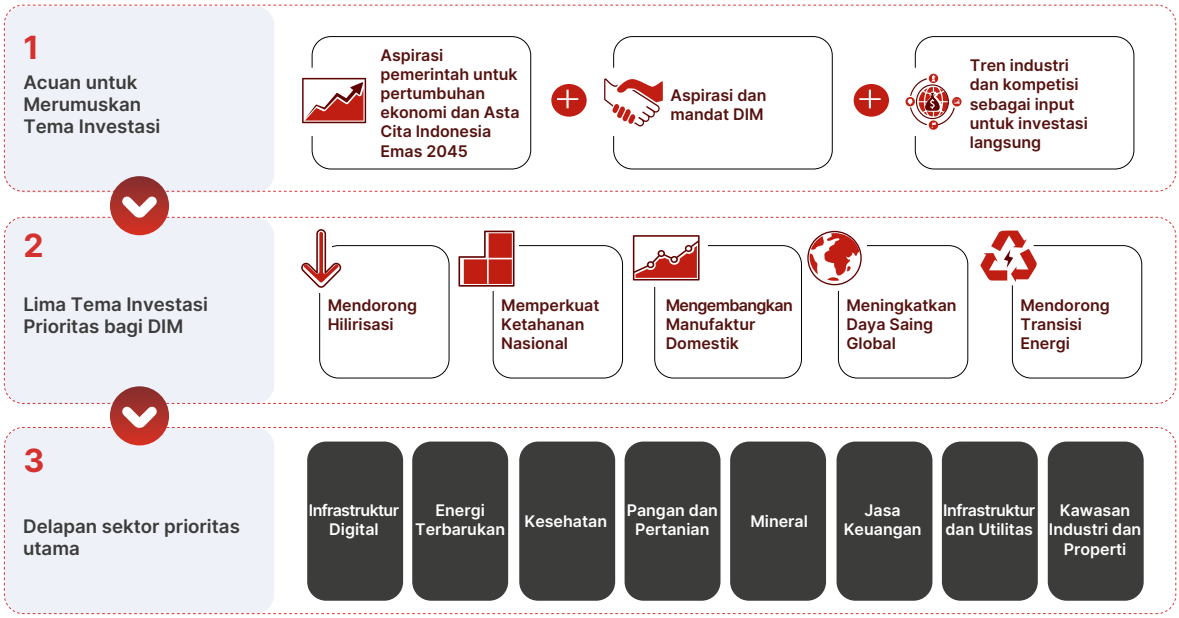
## Investasi Privat

Melalui investasi privat, DIM mengalokasikan modal jangka panjang secara aktif pada aset dan proyek strategis. Strategi ini dijalankan berdasarkan prinsip komersial yang disiplin, yang berfokus pada pencapaian imbal hasil kompetitif dalam jangka menengah dan panjang serta berkontribusi terhadap ekonomi nasional seperti penciptaan lapangan kerja, penguatan kapasitas industri, dan transfer pengetahuan.

**"*Investment Playbook*" DIM**

Di tengah dinamika global yang terus berubah, portofolio investasi privat dirancang untuk tetap tangguh dan adaptif. Setiap aset dikelola dengan perhatian terhadap kualitas, arah pengembangan, serta kontribusinya dalam struktur ekonomi yang lebih besar. Dengan cara ini, portofolio tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkembang dengan fondasi yang kuat. Investasi privat mencerminkan peran yang lebih luas guna menghubungkan kebutuhan hari ini dengan potensi masa depan, sekaligus membangun kapasitas dari dalam negeri.

Prioritas investasi privat kami bersumber dari agenda pembangunan nasional Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, yang kemudian diselaraskan dengan tren industri dan lanskap investasi terkini. Prioritas ini disusun ke dalam 5 (lima) tema investasi, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 8 (delapan) sektor prioritas.




**Delapan Sektor Prioritas DIM**

Arah investasi privat DIM berakar pada pemahaman mendalam terhadap sektor-sektor penting yang membentuk masa depan ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, DIM memfokuskan portofolionya pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak berlapis dan kemampuan untuk menciptakan nilai berkelanjutan.

Melalui penyaringan bertahap dari 22 sektor awal, DIM menetapkan delapan sektor prioritas berdasarkan tiga kriteria utama: dampak ekonomi nasional, keberlanjutan imbal hasil, dan ketersediaan peluang investasi. Melalui investasi di sektor-sektor tersebut, Danantara Indonesia menargetkan dampak yang nyata bagi perekonomian dan masyarakat. Dampak itu mencakup penciptaan lapangan kerja, inklusi sosial, serta penguatan ketahanan pangan dan energi. Investasi juga diharapkan mendorong pengelolaan energi dan limbah yang lebih baik, meningkatkan kapasitas lokal, menarik masuknya investasi swasta, dan berkontribusi pada pengurangan emisi.

Di luar delapan sektor prioritas, DIM tetap membuka peluang investasi di sektor lain berdasarkan hasil kajian atas peluang yang tersedia.

## Pertimbangan Sektor Prioritas

**~22 sektor**

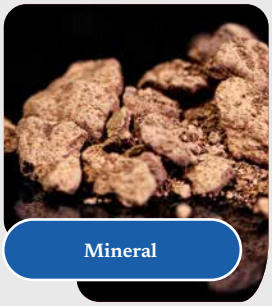
**Pertimbangan 1:** Memberikan dampak ekonomi nasional

**Pertimbangan 2:** Menghasilkan imbal hasil berkelanjutan

**Pertimbangan 3:** Ketersediaan peluang investasi

**8 sektor**

## Sektor Prioritas

























## Target Capaian (*Output*)

- Penciptaan Lapangan Kerja
- Inklusi Sosial
- Pengelolaan Energi dan Limbah
- Ketahanan Pangan dan Energi
- Peningkatan Kapasitas Lokal
- Mendorong Masuknya Investasi Swasta & Global
- Pengurangan Emisi

Di samping investasi yang bersumber dari peluang pasar, DIM juga dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek yang menjadi prioritas pemerintah yang didasarkan pada prinsip komersial yang sama, di mana setiap proyek harus menunjukkan kelayakan ekonomi, memiliki profil risiko yang dapat diterima, serta berpotensi menghasilkan imbal hasil jangka panjang. Kelayakan komersial merupakan syarat masuk (*entry point*), bukan evaluasi susulan.

Arah ini tercermin dalam proyek-proyek awal DIM, di mana beberapa di antaranya merupakan proyek strategis nasional yang dinilai memiliki prospek komersial yang kuat. Dua proyek dikategorikan sebagai investasi strategis nasional, yaitu pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau *Waste-to-Energy* (WtE) dan pengembangan ekosistem Haji dan Umrah di Makkah, Arab Saudi.

Pada pengembangan PSEL, investasi diarahkan untuk menjawab tantangan lingkungan yang semakin mendesak sekaligus menghadirkan sumber energi baru. Di kota-kota besar Indonesia, sampah yang sebelumnya menjadi beban diolah menjadi energi yang bernilai, proyek ini diharapkan dapat menghadirkan perubahan nyata terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.



Sementara itu, Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah di Makkah mencerminkan upaya dalam membangun ekosistem layanan yang terintegrasi bagi jemaah. Didukung tingginya pertumbuhan jemaah setiap tahunnya, investasi ini memiliki fundamental permintaan yang kuat dengan menyatukan akomodasi, layanan, dan infrastruktur dalam satu kawasan secara lebih tertata dan mendukung kelancaran ibadah.



Selain kedua proyek di atas, salah satu inisiatif yang tengah berjalan adalah investasi pada pengembangan pabrik *Chlor Alkali* dan *Ethylene Dichloride* (CA-EDC) di Cilegon, Banten — sebuah contoh proyek berorientasi komersial yang mendukung pertumbuhan dan industrialisasi nasional. Melalui kemitraan dengan Chandra Asri Group dan Indonesia Investment Authority (INA), DIM turut serta dalam upaya membangun kapasitas industri kimia dasar yang strategis bagi rantai pasok dalam negeri.

Sebagai bagian dari strategi diversifikasi portofolio, DIM juga berpartisipasi dalam sejumlah *fund*, membuka akses ke peluang investasi lintas sektor dan geografi yang melengkapi investasi langsung yang dijalankan.

Inisiatif ini menggambarkan bagaimana investasi privat dijalankan dengan visi yang luas namun terarah. Seluruh investasi dipilih berdasarkan potensi imbal hasil yang terukur dan berkelanjutan. Disiplin tetap dijaga, di mana setiap investasi diarahkan untuk melampaui biaya modalnya, memastikan keberlanjutan portofolio secara keseluruhan.

# Program dan Proyek Strategis





## 1. Fasilitas *Chlor Alkali* & *Ethylene Dichloride* (CA-EDC)

Proyek ini memperkuat agenda hilirisasi melalui pengembangan kapasitas industri kimia dasar yang strategis bagi rantai pasok domestik guna mengurangi ketergantungan impor *caustic soda*. Pada tahun 2025, Chandra Asri Group, DIM, dan INA menjalin kerja sama untuk pembangunan pabrik CA-EDC di Cilegon, Banten.

Indonesia masih menjadi pengimpor neto *caustic soda*, dengan volume impor saat ini sekitar 1 juta ton per tahun. Setelah beroperasi, pabrik CA-EDC diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor tersebut sekitar 400.000 ton per tahun (basis kering).

Dengan total nilai investasi sekitar USD800 juta, di mana porsi investasi DIM diperkirakan sekitar USD150 juta, fasilitas ini dirancang untuk memproduksi *caustic soda* dengan kapasitas sekitar 400 *kilotonnes per annum* (ktpa) dan EDC sekitar 500 ktpa. EDC sendiri merupakan bahan baku utama dalam produksi PVC, sehingga keberadaan kedua produk ini dalam satu fasilitas terintegrasi menciptakan basis yang lebih kuat bagi pengembangan industri hilir domestik. Proyek berada dalam tahap konstruksi dengan target operasionalisasi pada 2027, dan akan dikelola oleh pelaku industri domestik yang telah memiliki kapabilitas di sektor petrokimia.

Selain memperbaiki neraca perdagangan melalui substitusi impor bahan kimia dasar, inisiatif ini sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai lokasi investasi industri hilir dengan ketersediaan bahan baku dalam negeri yang lebih baik. Proyek ini juga melibatkan kerja sama dengan pemberi lisensi teknologi global dan pelaku industri regional, yang dapat menjadi landasan bagi transfer teknologi dan penguatan kompetensi teknis nasional.



## 2. Kerja sama dengan Qatar Investment Authority (QIA)

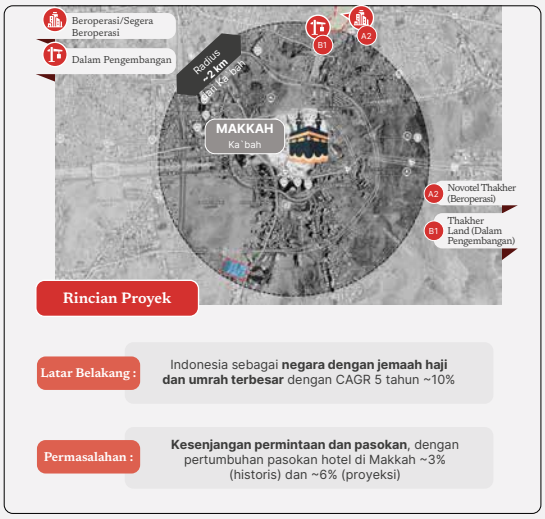
BPI Danantara menandatangani MoU dengan QIA senilai USD4 miliar pada April 2025, dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Doha. Pelaksanaan investasi ditugaskan kepada DIM selaku Holding Investasi. Dana ini akan difokuskan pada peluang investasi di berbagai sektor prioritas, antara lain hilirisasi, kesehatan, energi terbarukan, pariwisata, teknologi, serta sektor-sektor lain yang dipandang relevan oleh pengelola dana.



## 3. Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah di Makkah

Setiap tahunnya, lebih dari 1,5 juta jemaah haji dan umrah berangkat ke Tanah Suci, menurut data Kementerian Agama (2023 & 2024). Namun di balik angka tersebut, masih tersimpan tantangan nyata yakni keterbatasan kapasitas layanan di Makkah yang belum mampu mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat.

Melalui pembangunan kawasan terpadu di Thakher, dekat dari Masjidil Haram, proyek ini menghadirkan lebih dari sekadar fasilitas akomodasi. Dengan pengembangan awal berupa kawasan hotel berkapasitas 1.461 kamar di atas lahan seluas 4,4 hektar, ekosistem ini menjadi fondasi bagi sebuah sistem layanan yang lebih terintegrasi.







Langkah strategis ini diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan akuisisi aset hotel dan lahan di lokasi strategis pada Desember 2025. Namun, nilai sesungguhnya dari proyek ini terletak pada visi yang diemban guna melayani kebutuhan jemaah, sekaligus menciptakan efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, dan membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Sama pentingnya, inisiatif ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang lebih tertata dan layak. Ketika seluruh aspek perjalanan telah terintegrasi dengan baik, jemaah tidak lagi disibukkan oleh kompleksitas logistik. Mereka dapat memusatkan perhatian pada esensi ibadah dengan menjalani perjalanan spiritual yang lebih tenang, nyaman, dan khusyuk.

Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah di Makkah mencerminkan pendekatan investasi yang berorientasi jangka panjang yang dibangun dengan kesabaran, dikelola dengan disiplin, dan dijalankan dengan arah yang jelas. Di setiap tahapannya, prinsip tata kelola dan manajemen risiko tetap menjadi pijakan utama. Dengan demikian, proyek ini dapat menciptakan nilai ekonomi, serta menghadirkan dampak sosial yang terus tumbuh, seiring dengan perjalanan jutaan jemaah yang dilayani setiap tahun.



## 4. Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)

Melalui pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau *Waste-to-Energy* (WtE), sampah tidak lagi dilihat sebagai akhir dari siklus, melainkan awal dari nilai baru dengan energi yang lebih bersih, lingkungan yang lebih sehat, dan sistem yang lebih berkelanjutan.

Pada Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang menjadi landasan percepatan PSEL dan menegaskan peran Danantara Indonesia dalam pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP). Setelah kajian awal diselesaikan, DIM membuka proses seleksi mitra dan dan pada November 2025, DIM memulai proses pemilihan mitra untuk tiga lokasi tahap pertama.

**Pengolahan Sampah menjadi Energi Skala Nasional**

**Permasalahan Sampah**

56,6 juta ton per tahun (2023)

>50% tidak terkelola (2023)

**Risiko Kesehatan**

**+70%** Risiko kanker

**+40%** Risiko asma

**+72%** Risiko diare

**+33%** Risiko cacat lahir

**Solusi PSEL**

| | |
|---|---|
| Target 2030 | Cakupan: 33 kabupaten/kota |
| Kapasitas terpasang | ~500 MW |
| Total investasi | US$3 miliar |
| Investasi per lokasi | ~Rp3 triliun (~US$170juta) |
| Target sampah terkelola per tahun | >10 juta ton |

Indonesia menghasilkan sekitar 56,6 juta ton sampah setiap tahun (2023), dengan sebagian besar belum terkelola secara optimal. Dampaknya terlihat di tempat pembuangan akhir dan meluas dalam bentuk polusi udara, gangguan kesehatan, hingga kerugian ekonomi yang signifikan. Bagi banyak orang yang hidup dengan kualitas udara yang menurun akibat pembakaran sampah, persoalan ini menjadi realitas sehari-hari sekaligus isu lingkungan yang nyata.

PSEL hadir untuk menjawab tantangan tersebut secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, sampah diolah menjadi sumber energi, sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Di kota-kota besar, model ini berpotensi mengurangi secara signifikan volume sampah yang tidak terkelola, bahkan menghilangkan akumulasi sampah baru yang selama ini menjadi beban publik. Pengalaman di berbagai negara, termasuk Tiongkok dan beberapa kawasan di Eropa, menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat berjalan secara efektif ketika didukung oleh sistem yang tepat.

Lebih dari itu, pengembangan PSEL juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah sebelum tahun 2029, sekaligus mendorong transisi menuju ekonomi sirkular. Dalam kerangka ini, setiap limbah memiliki potensi untuk diolah kembali menjadi sumber daya yang produktif.

Proyek ini dirancang agar tetap layak secara komersial melalui mekanisme pengolahan sampah menjadi listrik dan pembelian listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah tersebut, tanpa mengabaikan manfaat lingkungan dan sosial yang dihasilkan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, PSEL menjadi solusi teknis sekaligus investasi jangka panjang yang menciptakan nilai berlapis yakni mengurangi beban lingkungan, memperkuat ketahanan energi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada akhirnya, inisiatif ini membawa satu pesan yang sederhana namun mendasar bahwa lingkungan yang bersih bukan sekadar tujuan, melainkan hak yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.



**Sepanjang 2025 DIM berfokus pada persiapan penanaman modal, pembangunan kemitraan strategis, penjajakan peluang investasi ke depan, sekaligus memulai proses kajian dan *due diligence* untuk beberapa investasi-investasi utama.**

# Instrumen Pendanaan

Dalam perjalanan membangun portofolio investasi yang dinamis, ketersediaan modal mencerminkan keseimbangan antara jumlah, waktu, dan fleksibilitas. DIM menjadikan instrumen utang sebagai bagian dari strategi yang menyatu dengan pembiayaan. Perannya menghubungkan peluang yang bergerak cepat dengan kesiapan institusi dalam merespons secara tepat.

## *Revolving Credit Facility* (RCF)

Salah satu instrumen yang dimanfaatkan adalah *Revolving Credit Facility* (RCF). Instrumen ini memberikan fleksibilitas pendanaan jangka pendek hingga menengah yang dapat digunakan, dilunasi, dan digunakan kembali sesuai kebutuhan. Dalam praktiknya, RCF memberi fleksibilitas bagi DIM untuk menjaga likuiditas tanpa perlu mengunci dana dalam jumlah besar sejak awal. Ketika peluang investasi muncul, akses terhadap pembiayaan telah tersedia. Saat kebutuhan mereda, fasilitas dapat dikembalikan tanpa beban jangka panjang. Fleksibilitas ini menjadi kunci dalam menjaga kecepatan sekaligus disiplin dalam pengelolaan kas.

Fasilitas ini digunakan untuk mendukung kebutuhan likuiditas jangka pendek hingga menengah. Pengelolaan RCF dilakukan secara disiplin untuk memastikan keseimbangan antara efisiensi biaya dan fleksibilitas pendanaan.

## Patriot Bonds

Dalam rangka memperkuat kapasitas pendanaan, DIM menerbitkan obligasi jangka panjang melalui instrumen Patriot Bonds sebagai kanal mobilisasi modal domestik untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional. Pada bulan Oktober dan Desember 2025, DIM mengeluarkan Surat Utang Jangka Panjang ("SUJP") yang ditawarkan tanpa melalui penawaran umum ("Patriot Bonds") masing-masing sebesar Rp50 triliun dan Rp11,38 triliun. Instrumen ini menjadi salah satu pilar utama dalam struktur pendanaan DIM, melengkapi setoran modal dari BPI Danantara sehingga total kapasitas pendanaan yang berhasil dibangun sepanjang 2025 mencapai skala yang signifikan.

Melalui Patriot Bonds, DIM membuka ruang bagi kolaborasi antara negara dan sektor swasta dalam membiayai pembangunan ekonomi jangka panjang. Penerbitan Patriot Bonds mencerminkan komitmen DIM dalam membangun struktur pendanaan yang *prudent* dan fleksibel, selaras dengan kebutuhan investasi jangka panjang. Dengan struktur yang dirancang secara disiplin, instrumen ini menjaga keseimbangan antara kapasitas pembiayaan dan pengelolaan kewajiban jangka panjang dalam kerangka tata kelola yang kuat.

Patriot Bonds mendapatkan peringkat idAAA dari PT Fitch Ratings Indonesia, peringkat tertinggi dalam skala pemeringkatan domestik. Peringkat ini mencerminkan kepercayaan lembaga pemeringkat independen terhadap profil kredit DIM sejak tahun pertama operasinya.

## Pengelolaan Struktur Pendanaan

Kombinasi antara RCF dan Patriot Bonds mencerminkan pendekatan yang seimbang. Di satu sisi, terdapat kebutuhan akan kecepatan dan kelincahan dalam merespons peluang. Di sisi lain, terdapat kebutuhan akan stabilitas dan daya tahan dalam jangka panjang. Dengan memanfaatkan kedua instrumen ini secara terintegrasi, DIM dapat menjaga keseimbangan antara likuiditas, *leverage*, dan keberlanjutan struktur pendanaan.

Secara keseluruhan, struktur pendanaan DIM dikelola dengan mempertimbangkan keseimbangan neraca. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga fleksibilitas keuangan sekaligus memastikan keberlanjutan dalam mendukung ekspansi portofolio investasi.

Penggunaan instrumen ini berada dalam kerangka tata kelola dan manajemen risiko yang disiplin. Setiap keputusan pembiayaan mempertimbangkan profil risiko, struktur modal, serta kapasitas jangka panjang dalam memenuhi kewajiban. Upaya ini sejalan dengan praktik global *sovereign fund* yang menekankan pengelolaan utang secara *prudent* dan transparan dalam kerangka tata kelola yang kuat.

# Penerapan Tata Kelola

DIM membangun tata kelola investasi yang dirancang untuk menghasilkan keputusan yang tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap peluang investasi dievaluasi melalui proses yang terstruktur, didukung oleh kerangka manajemen risiko yang terintegrasi dan prinsip GCG. Risiko dipandang sebagai bagian yang melekat dalam pelaksanaan mandat yang dikelola secara terukur dalam kerangka tata kelola yang kuat.

DIM mengelola kegiatan investasinya di pasar privat dan publik, yang masing-masing diatur melalui kebijakan, proses persetujuan, dan parameter risiko tersendiri. Sepanjang tahun 2025, DIM telah menyelesaikan penyusunan kebijakan dan pedoman yang mencakup investasi privat dan publik, manajemen risiko, audit internal, serta pengadaan, dan mulai menerapkan kerangka kerja tersebut secara menyeluruh dalam kegiatannya.

Setiap peluang investasi melalui proses peninjauan dan persetujuan yang terstruktur guna menguji keselarasan strategis, kelayakan investasi, risiko, aspek hukum, serta kesesuaian dengan alokasi aset dan sasaran risiko-imbal hasil DIM:

**Proses Seleksi Investasi yang Ketat**




Sebelum menunjuk manajer investasi eksternal, DIM melakukan uji tuntas yang mencakup kapabilitas investasi, tata kelola, ketahanan operasional, dan praktik manajemen risiko. Setiap mandat dijalankan berdasarkan tolok ukur (*benchmark*), ekspektasi risiko-imbal hasil, dan ketentuan pelaporan yang telah ditetapkan. DIM tetap bertanggung jawab atas desain portofolio, tolok ukur, eksposur pasar yang diperkenankan, dan parameter risiko, sementara manajer investasi eksternal melaksanakan pengelolaan investasi dalam batasan mandat tersebut.

**Benturan Kepentingan**

Potensi benturan kepentingan diidentifikasi dan dinilai pada tahap Tinjauan Awal, sebelum suatu investasi dilanjutkan ke tahap uji tuntas menyeluruh. Kami menyadari bahwa benturan kepentingan dapat timbul dari beragam peran DIM sebagai pengelola aset, pembina perusahaan portofolio, dan investor jangka panjang, termasuk di pasar tempat perusahaan portofolionya tercatat. Untuk investasi publik yang dikelola secara eksternal, DIM tetap bertanggung jawab atas desain portofolio, tolok ukur, eksposur pasar, dan parameter risiko, sementara pemilihan efek didelegasikan kepada manajer investasi yang beroperasi berdasarkan mandat yang telah ditetapkan.

> DIM's governance framework is designed to translate its mandate into clear authority, disciplined investment decision-making, effective oversight, and accountability for the assets entrusted to the company.




## Komite Investasi

Proses pengambilan keputusan investasi dijalankan melalui dua komite yang bekerja secara independen: Komite Investasi Privat dan Komite Investasi Publik. Fungsi tim Risk melekat di kedua komite ini, memastikan pertimbangan risiko hadir sejak tahap awal evaluasi hingga pemantauan portofolio yang sedang berjalan. Setiap komite berperan memberikan rekomendasi kepada Direksi DIM, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan Direksi, dan untuk transaksi yang bersifat strategis atau berskala besar, persetujuan diperoleh dari BPI Danantara.

**Investasi Publik**

Untuk investasi publik yang berfokus pada instrumen likuid seperti ekuitas dan *fixed income*, Komite Investasi menetapkan mandat risiko dan pedoman investasi sebagai kerangka kerja bagi tim investasi publik. Tim bekerja sehari-hari dalam batasan tersebut, menimbang peluang berdasarkan *risk-adjusted returns* dan diversifikasi lintas kelas aset. Komite Investasi turut terlibat ketika terdapat perubahan signifikan pada mandat atau parameter risiko.

**Investasi Privat**

Untuk investasi privat, setiap peluang investasi wajib disampaikan kepada Komite Investasi untuk memperoleh rekomendasi, karena setiap transaksi bersifat unik. Alur prosesnya dimulai dari pengembangan *pipeline* dan *pre-screening* di rapat mingguan, dilanjutkan dengan *Preliminary Due Diligence* oleh fungsi Investment, Legal, dan Risk, kemudian penyusunan *Early Investment Memo*. Pada tahap ini, Komite Investasi mengevaluasi kesesuaian investasi dengan mandat ganda DIM — imbal hasil komersial sekaligus dampak sosial ekonomi — sebelum memutuskan apakah layak dilanjutkan ke tahap *Full Due Diligence*. Setelah *Full Due Diligence* selesai dilakukan, tim menyusun *Final Investment Memo* yang dipresentasikan kembali kepada Komite Investasi guna memperoleh rekomendasi akhir untuk selanjutnya diajukan kepada Direksi DIM untuk mendapatkan persetujuan. Setelah investasi berjalan, tim investasi dan unit kerja terkait melakukan pemantauan atas investasi yang dilakukan dan melaporkan perkembangannya kepada Komite Investasi dan Direksi DIM.

## Manajemen Risiko

Kerangka manajemen risiko DIM dibangun melalui lima pilar utama yang mencakup:

1. Tata kelola risiko
2. Identifikasi risiko
3. Kuantifikasi risiko
4. Pemantauan risiko
5. Evaluasi risiko

Kelima pilar ini membentuk satu sistem yang saling terhubung, memastikan bahwa risiko dikenali sejak awal, dianalisis secara mendalam, dipantau secara berkelanjutan, dan dievaluasi untuk perbaikan yang berkesinambungan.

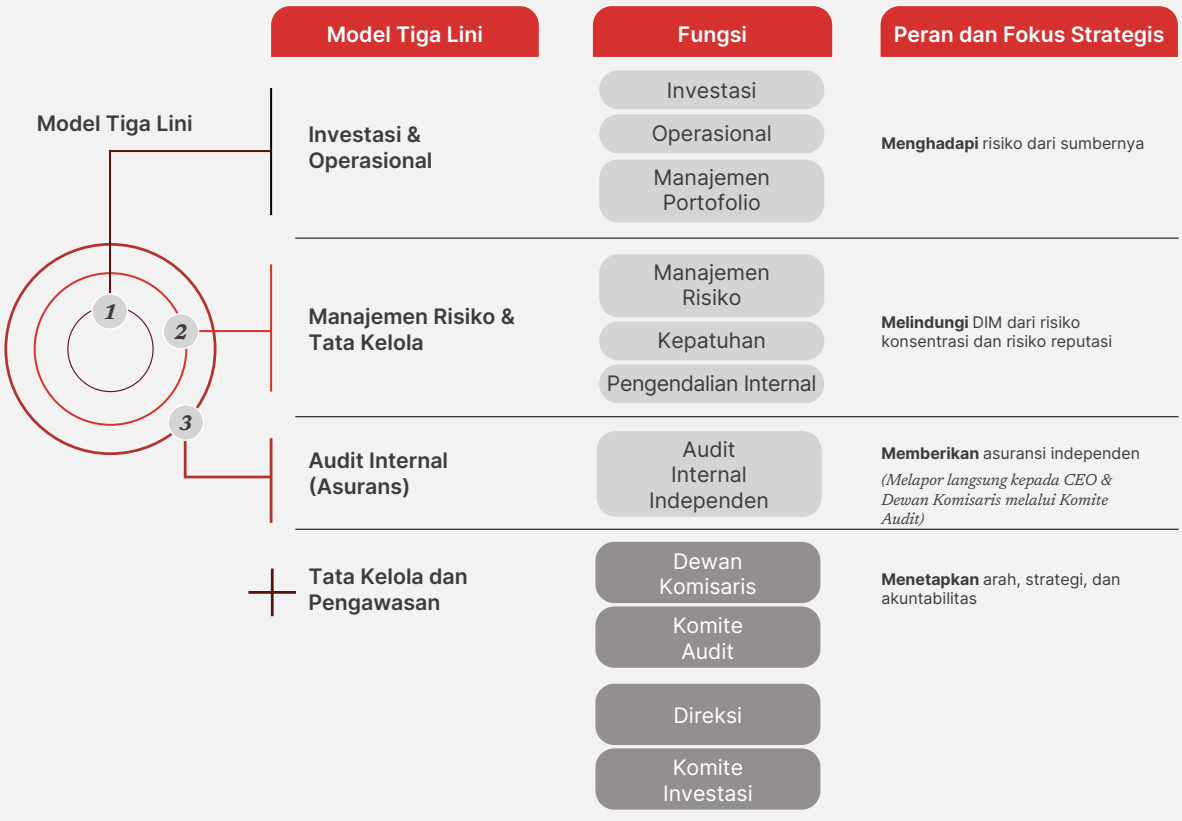
Sebagai panduan dalam pelaksanaan kerangka tersebut, Direksi DIM telah menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS). Melalui RAS, DIM menegaskan bahwa risiko adalah konsekuensi yang melekat pada misinya, yang harus dikelola dan ditangani dalam batas-batas yang terukur. DIM menerima risiko investasi yang sebanding dengan potensi penciptaan nilai bagi perekonomian Indonesia, dengan prioritas pada ketangguhan portofolio dan diversifikasi yang cermat. Pada saat yang sama, DIM memiliki toleransi rendah terhadap risiko operasional, serta nol toleransi terhadap risiko kepatuhan dan reputasi.

Manajemen risiko hadir di seluruh siklus investasi, bahkan sebelum sebuah investasi diputuskan hingga pascaimplementasi. Setiap proses diperkuat oleh budaya risiko yang tertanam di organisasi, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian dari keseharian. Dengan memadukan praktik terbaik global dan pemahaman terhadap karakteristik pasar domestik, DIM menjaga setiap keputusan tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan tujuan jangka panjang.

Setiap peluang dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi risiko, baik yang bersifat finansial, operasional, hukum, maupun strategis. Proses ini tidak berhenti pada identifikasi, tetapi dilanjutkan dengan pengujian berbagai skenario, termasuk kondisi yang paling menantang.

Manajemen risiko dilakukan secara berkelanjutan sepanjang siklus investasi. Setelah keputusan diambil, proses pemantauan dilakukan secara aktif untuk memastikan bahwa setiap investasi tetap berjalan sesuai dengan asumsi awal dan strategi yang telah ditetapkan. Perubahan kondisi eksternal baik dari sisi ekonomi, regulasi, maupun dinamika industri, direspons melalui penyesuaian yang terukur, sehingga portofolio tetap adaptif tanpa kehilangan arah.

**Manajemen Risiko & Tata Kelola | DIM Dilindungi oleh Tata Kelola yang Kokoh**



# Kolaborasi Strategis

Bagi DIM, kemitraan bukan sekadar pelengkap strategi investasi. Kemitraan menjadi cara untuk memperluas jangkauan, memperdalam kapabilitas, dan mempercepat dampak. Dalam lanskap investasi yang semakin kompleks, tidak ada satu institusi pun yang dapat bergerak sendiri. Nilai terbaik lahir dari kolaborasi, ketika keahlian, modal, dan perspektif bertemu dalam satu arah yang sama. Dengan demikian, investasi menjadi lebih besar sekaligus lebih matang dalam perencanaan dan eksekusi.

**Berinvestasi bersama Danantara Indonesia membuka akses bagi investor asing untuk memperoleh imbal hasil berkelanjutan di pasar berkembang**




Lebih jauh, kemitraan juga menjadi jembatan untuk menghubungkan Indonesia dengan ekosistem investasi global, seperti QIA, yang menandatangani MoU dengan BPI Danantara senilai USD4 miliar pada April 2025.

> **Melalui kolaborasi lintas negara, DIM tidak hanya menarik modal, tetapi juga membangun kepercayaan. Setiap proyek yang dijalankan menjadi representasi dari kemampuan Indonesia dalam mengelola investasi secara profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang.**

## Pengajuan *Associate Member* IFSWF pada 2025

Dalam membangun institusi investasi yang kredibel dan berdaya saing global, DIM memahami bahwa standar tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta manajemen risiko dibentuk dari kekuatan internal sekaligus keterhubungan dengan ekosistem internasional. Keanggotaan pada International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat posisi tersebut. Pada tahun 2025, DIM mendaftar sebagai *associate member* IFSWF.

IFSWF merupakan forum global yang menghimpun *sovereign wealth fund* dari berbagai negara dengan tujuan mendorong praktik investasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang. Forum ini juga dikenal sebagai pengusung *Santiago Principles*, yaitu landasan prinsip yang menjadi acuan global dalam tata kelola dana kekayaan negara. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan risiko yang *prudent* dalam aktivitas investasi.

Status sebagai *associate member* akan memberikan akses bagi DIM untuk terlibat dalam pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antarsesama *sovereign wealth fund*. Forum ini menjadi ruang pembelajaran yang mempertemukan berbagai pengalaman global, sehingga memperkaya pendekatan dalam perumusan strategi investasi, penguatan tata kelola, serta pengelolaan risiko secara lebih komprehensif. Keterlibatan ini juga memungkinkan DIM untuk terus mengikuti perkembangan tren investasi global yang dinamis.

Lebih dari itu, keanggotaan dalam IFSWF memperkuat kredibilitas institusi di mata mitra internasional. Dalam ekosistem investasi global, kepercayaan menjadi fondasi utama. Partisipasi dalam forum ini menunjukkan komitmen DIM untuk menjalankan investasi dengan standar internasional yang mengedepankan transparansi, disiplin, dan akuntabilitas.

# Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia



Pada tahun pertamanya, Danantara Indonesia membangun fondasi institusi yang profesional dan berintegritas. Sumber daya manusia yang tepat menjadi kunci bagi Danantara Indonesia untuk menjalankan mandatnya sebagai mesin penggerak perekonomian Indonesia.

Danantara Indonesia



06



# Memperkuat Talenta dan Kapabilitas Organisasi untuk Mendukung Pertumbuhan Jangka Panjang

Sepanjang tahun 2025, Danantara Indonesia melalui Direktorat Human Resources & General Affairs terus membangun talenta dan kapabilitas organisasi yang menjadi penopang pertumbuhan. Salah satu fokus utama ini diwujudkan melalui rekrutmen 313 talenta unggulan yang berasal dari berbagai latar belakang profesional guna mengisi kebutuhan organisasi yang terus berkembang.

Proses seleksi dilaksanakan secara profesional, akuntabel, serta berbasis meritokrasi, dengan menempatkan integritas, kompetensi, pengalaman, serta keselarasan dengan kebutuhan organisasi sebagai pertimbangan utama. Untuk mempercepat integrasi dan kesiapan kerja, Danantara Indonesia juga menjalankan program *onboarding* yang dirancang agar setiap pegawai baru dapat memahami budaya, tata kelola, dan mandat strategis Danantara Indonesia sejak awal perjalanan kariernya.

Penguatan organisasi turut dilakukan melalui pengembangan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sepanjang tahun 2025, sebanyak 240 pegawai mengikuti berbagai program pelatihan yang mencakup penguatan kompetensi teknis dan pemahaman proses bisnis. Inisiatif ini diarahkan untuk membangun kesiapan operasional, memperluas wawasan profesional, serta memperkuat kemampuan organisasi dalam menjalankan peran dan tanggung jawab secara efektif. Danantara Indonesia memandang pengembangan talenta sebagai investasi strategis yang akan menentukan kualitas pengambilan keputusan, ketangguhan organisasi, dan kapasitas pertumbuhan dalam jangka panjang.

Di saat yang sama, Danantara Indonesia memperkuat sistem dan infrastruktur pendukung melalui penyusunan kebijakan SDM yang komprehensif, penerapan kerangka manajemen kinerja berbasis KPI, serta pembangunan layanan operasional SDM yang andal dan konsisten. Berbagai inisiatif modernisasi juga dijalankan, termasuk digitalisasi pengelolaan akses pengunjung dan pegawai di Wisma Danantara Indonesia, penyediaan fasilitas kerja yang mendukung produktivitas dan kenyamanan, serta kerja sama dengan mitra strategis untuk memenuhi kebutuhan ruang kerja dan peralatan operasional. Keseluruhan langkah tersebut mencerminkan komitmen Danantara Indonesia dalam membangun organisasi yang profesional, adaptif, dan siap mengakselerasi penciptaan nilai secara berkelanjutan.



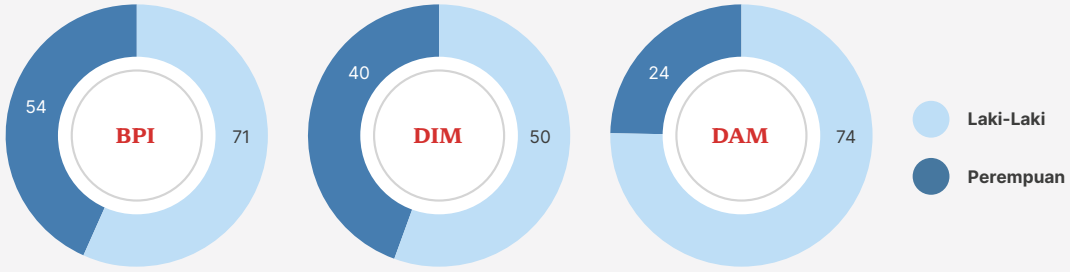
# Data Demografi Pegawai

Sepanjang 2025, Danantara Indonesia membangun organisasi berbasis meritokrasi dengan merekrut lebih dari 300 talenta unggulan melalui proses yang mengutamakan integritas dan kompetensi.

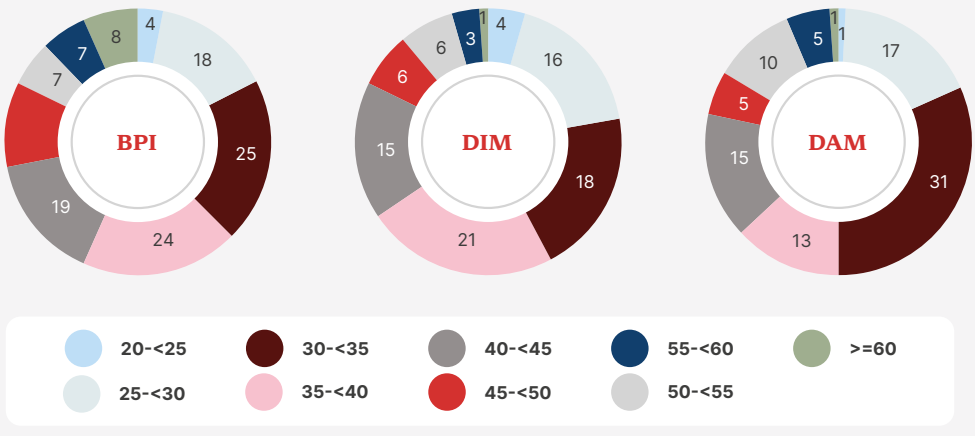


**Per 31 Desember 2025**

## Gender




## Usia (Tahun)

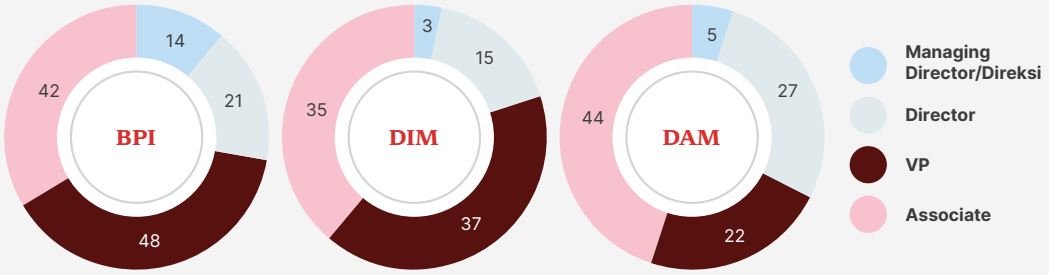




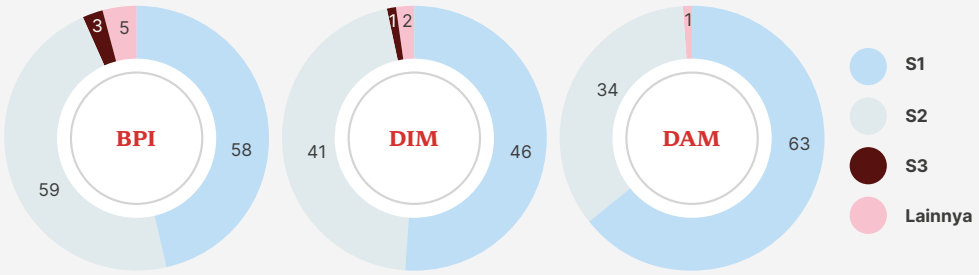


**Per 31 Desember 2025**

## Level




## Pendidikan



# Nilai dan Dampak untuk Indonesia



Nilai yang kami ciptakan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan memperluas manfaat bagi masyarakat. Danantara Indonesia terus melangkah maju untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan sejahtera.

Danantara Indonesia



07

# Danantara Indonesia Trust



**Sepanjang tahun 2025, komitmen Danantara Indonesia dalam pelaksanaan aktivitas sosial diwujudkan melalui berbagai inisiatif, mulai dari pembentukan unit filantropi Danantara Indonesia Trust serta pembangunan hunian sementara di area bencana Sumatera.**

Selain menjalani mandatnya dalam mengelola BUMN dan melakukan investasi strategis, Danantara Indonesia memiliki komitmen terhadap pilar sosial dan lingkungan. Bagi Danantara Indonesia, pelaksanaan aktivitas sosial tidak terpisahkan dari aktivitas pengelolaan aset negara dan investasi untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Danantara Indonesia memandang bahwa setiap keputusan yang dijalankan akan membawa dampak yang lebih luas, melampaui kinerja finansial, serta berpengaruh langsung ke masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, komitmen Danantara Indonesia dalam pelaksanaan aktivitas sosial diwujudkan melalui berbagai inisiatif, mulai dari pembentukan unit filantropi Danantara Indonesia Trust (DIT) serta pembangunan hunian sementara di area bencana Sumatera. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi dan operasional, Danantara Indonesia senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa nilai dan dampak yang dihasilkan bersifat inklusif, dapat diakses dan selaras dengan kebutuhan generasi di masa yang akan datang.

Danantara Indonesia Trust (DIT) didirikan pada 17 Oktober 2025 sebagai unit filantropi dari Danantara Indonesia, dengan mandat untuk mendorong dampak pembangunan sosial di Indonesia. DIT menjalankan operasional dengan tata kelola yang kuat, transparansi, dan pengawasan profesional.

DIT dirancang untuk melengkapi mandat investasi Danantara Indonesia dengan menyalurkan 1–2,5% dari dividen yang diterima ke berbagai inisiatif sosial strategis dan bidang-bidang prioritas tinggi yang masih membutuhkan dukungan pendanaan, guna memperkuat pembangunan sumber daya manusia serta ketahanan jangka panjang Indonesia.

Program DIT difokuskan pada tiga (3) pilar pembangunan utama, yaitu air dan sanitasi (*Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH)), pendidikan, dan kesehatan, sebagai fondasi bagi penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

DIT mengembangkan pendekatan dengan konsep *Trust Fund*, sebagai wadah pengelolaan dana yang diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif strategis dan pembangunan jangka panjang secara berkelanjutan.

Melalui beragam program yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemitraan strategis, dan model pembiayaan inovatif, DIT bertujuan membuka peluang investasi bersama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, serta membangun model acuan global bagi pengembangan dana perwalian berbasis *sovereign wealth fund* di negara berkembang.

*Trust Fund* memiliki tiga (3) peran strategis yang mencakup:

**Grant-maker**

Menyediakan pendanaan langsung ke sektor-sektor yang kurang terlayani

**Catalyst**

Membangun kemitraan dengan berbagai lembaga global, regional, dan domestik untuk melipatgandakan dampak

**Ecosystem Enabler**

Membangun platform, kapasitas, dan pengetahuan guna mendorong reformasi sistemik



## Visi dan Misi DIT

DIT membuka peluang-peluang baru dan mendorong aksi kolektif demi mewujudkan masa depan yang lebih sehat, lebih terdidik, dan berkelanjutan. Dengan visi yang selaras dengan Indonesia Emas 2045, DIT bercita-cita menjadi contoh teladan global bagi pasar-pasar berkembang dalam inovasi filantropi.

Guna mewujudkan visi tersebut, DIT menjalankan misi dengan bertindak sebagai pemberi hibah, katalisator, dan penggerak ekosistem yang meningkatkan kualitas hidup di komunitas yang kurang terlayani, memperkuat kemitraan global, dan mendorong transformasi tingkat sistem di sektor-sektor pembangunan prioritas Indonesia.

## Kemitraan

DIT berkolaborasi dengan jaringan mitra yang beragam, termasuk lembaga pemerintah dan lembaga filantropi baik lokal maupun internasional. Kemitraan ini menyatukan kepemimpinan kebijakan, keahlian teknis, dukungan pendanaan, dan keterlibatan masyarakat.

Bersama-sama, para mitra mendesain model penyaluran filantropi dan menempatkan DIT sebagai rujukan pionir bagi *trust fund* yang terhubung dengan lembaga kekayaan negara.



## Langkah ke Depan

Memandang ke depan, DIT akan fokus pada peluncuran program-program katalitiknya, memperkuat kemitraan dengan institusi global, serta memperluas peluang pendanaan bersama untuk memperbesar dampak dari dana yang dimiliki.

Melalui kolaborasi, tata kelola yang baik, serta pendekatan *results-based*, DIT berupaya menjadi rujukan bagi filantropi yang terhubung di negara berkembang, sekaligus mendukung perjalanan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dan berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

# Rumah Hunian Danantara

Danantara Indonesia menginisiasi pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) dengan prinsip layak dan beradab (*civilized*), sebagai upaya percepatan penanganan warga terdampak bencana banjir bandang Sumatera. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen Danantara Indonesia dalam menghadirkan solusi yang cepat, layak, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak bencana.

Pembangunan Huntara didukung kolaborasi tujuh BUMN Karya untuk menghadirkan hunian layak huni. PLN, Telkom, PTPN, dan Himbara mendukung melalui penyediaan listrik, konektivitas, lahan, dan pendanaan, sehingga Huntara dapat dihuni secara aman dan nyaman. Selain itu, Pertamina, Jasa Marga, Pupuk Indonesia, MIND ID, Pelindo, SIG, dan Pegadaian juga turut mendukung pengembangan Huntara dalam berbagai aspek.

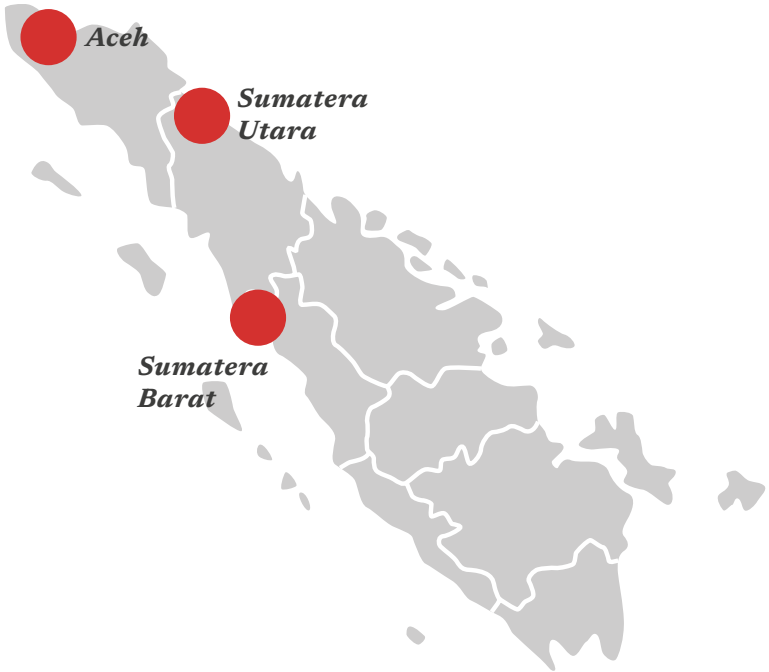
Pada akhir tahun 2025, 600 unit Huntara telah selesai dibangun di Kabupaten Aceh Tamiang, dan akan dilanjutkan di awal tahun 2026. Setiap kawasan Huntara dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial, termasuk kamar mandi, dapur umum, taman bermain, serta musala, guna mendukung kenyamanan dan kebutuhan dasar para penghuni.







Pekerjaan pembangunan dilaksanakan secara intensif oleh tim pekerja dari berbagai daerah, termasuk tenaga kerja lokal setempat dan dari Pulau Jawa, dengan dukungan pasokan bahan bangunan yang didatangkan dari berbagai wilayah di Indonesia. Kolaborasi nasional ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong BUMN dalam merespons cepat bencana dan mempercepat pemulihan masyarakat.



**Laporan Tahunan**

# 2025

Badan Pengelola Investasi
Daya Anagata Nusantara
(BPI DANANTARA)

# ENERGI *untuk MASA DEPAN*

Danantara Indonesia

**Wisma Danantara Indonesia**
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38,
Jakarta Selatan, Indonesia 12190

www.danantaraindonesia.co.id